

MANAJEMEN PERPUSTAKAAN



PENULIS:

- Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A.
- Dewi Maharani Rachmaningsih., S.Hum., M.A.
- Elva Rahmah, S.Sos, M.I.Kom.
- Anita Tri Widiyawati, S.S.,M.A.
- Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
- Fitri Handayani, M.A.
- Rahmita Sari, S.Pd. M.A.
- Nove E Variant Anna, S.Sos., MIMS.
- Fahrullah, S.I.Pust., M.Kom.

MANAJEMEN PERPUSTAKAAN

Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A.
Dewi Maharani Rachmaningsih., S.Hum., M.A.
Elva Rahmah, S.Sos, M.I.Kom.
Anita Tri Widiyawati, S.S.,M.A.
Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
Fitri Handayani, M.A.
Rahmita Sari, S.Pd. M.A.
Nove E Variant Anna, S.Sos., MIMS.
Fahrullah, S.I.Pust., M.Kom.



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MANAJEMEN PERPUSTAKAAN

Penulis:

Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A.
Dewi Maharani Rachmaningsih., S.Hum., M.A.
Elva Rahmah, S.Sos, M.I.Kom.
Anita Tri Widiyawati, S.S.,M.A.
Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
Fitri Handayani, M.A.
Rahmita Sari, S.Pd. M.A.
Nove E Variant Anna, S.Sos., MIMS.
Fahrullah, S.I.Pust., M.Kom.

ISBN: 978-623-8004-38-6

Editor: Ariyanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum

Desain Sampul Dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website: www.Globaleksekutifteknologi.Co.Id

Email: Globaleksekutifteknologi@Gmail.Com

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Manajemen Perpustakaan. Buku ini disusun secara lengkap sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami dan sebagai salah satu sumber referensi belajar. Kami menyadari, bahan Buku ajar ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Penyusun, Oktober 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	
BERBASIS INKLUSI SOSIAL	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Perpustakaan	3
1.3 Inklusi Sosial.....	4
1.4 Inklusi Sosial Di Perpustakaan	8
1.5 Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	10
1.6 Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.....	11
BAB 2 PERANCANGAN PERPUSTAKAAN DARI SUDUT	
SDM DAN INFRASTRUKTUR.....	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Regulasi Perpustakaan	18
2.2.1 Regulasi Nasional Ri.....	20
2.2.2 Regulasi Internasional	25
2.2.3 Implementasi Regulasi Perancangan Perpustakaan....	29
2.3 Sumber Daya Manusia Dan Infrastuktur	30
2.4 Penutup	32
BAB 3 PENGEMBANGAN KOLEKSI, COMMUNITY STUDY	
DAN PRESERVASI.....	36
3.1 Pendahuluan.....	36
3.2 Pengembangan Koleksi	36
3.2.1 Pengertian Dan Tujuan Pengembangan Koleksi.....	37
3.2.2 Kebijakan Pengembangan Koleksi.....	37
3.2.3 Seleksi Koleksi.....	38
3.2.4 Pengadaan Koleksi.....	39
3.2.5 Evaluasi Pengembangan Koleksi	41
3.3 <i>Community Study</i>	42
3.4 Preservasi.....	42
3.4.1 Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Preservasi.....	42
3.4.2 Kebijakan Preservasi Koleksi	43
3.4.3 Penyebab Kerusakan Koleksi.....	44

3.4.4 Penanggulangan Kerusakan Koleksi.....	45
BAB 4 KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI DALAM	
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	49
4.1 Pendahuluan.....	49
4.2 Organisasi Perpustakaan.....	50
4.3 Administrasi dan Manajemen Perpustakaan	51
4.4 Leadership (Kepemimpinan) dalam Manajemen Perpustakaan.....	53
4.5 Pengambilan Keputusan pada Organisasi Perpustakaan ..	54
4.6 Motivasi dalam Manajemen Perpustakaan.....	56
4.7 Contoh Kasus dan Analisis	60
BAB 5 STRATEGI LAYANAN PERPUSTAKAAN DALAM	
MENGEMBANGKAN BUDAYA BACA	63
5.1 Pendahuluan.....	63
5.2 Peran Perpustakaan	64
5.3 Konsep Pelayanan Publik.....	68
5.4 Pelayanan Perpustakaan	70
5.5 Konsep Strategi.....	70
5.6 Manajemen Strategis	71
5.7 Lingkungan Strategis	74
5.8 Budaya Gemar Membaca.....	76
5.9 Pengembangan Budaya Baca	77
BAB 6 KEPEMIMPINAN PERPUSTAKAAN UNTUK	
MENDUKUNG AGILITAS PERPUSTAKAAN MASA	
DEPAN.....	86
BAB 7 CARA PENGUKURAN KINERJA PUSTAKAWAN	105
7.1 Pendahuluan.....	105
7.2 Pengukuran Kinerja Pustakawan.....	106
7.2.1 Jenis Pengukuran.....	107
7.2.2 Kompetensi.....	110
Karakteristik Kompetensi Pustakawan	110
7.3 Penilaian Angka Kredit Pustakawan.....	113
7.3.1 Evaluasi Kinerja Pustakawan melalui ISO	114
7.3.2 Evaluasi standar kinerja berdasarkan PAK.....	116
BAB 8 LAYANAN SIRKULASI DAN REFERENSI.....	119
8.1 Pendahuluan.....	119
8.2 Layanan Sirkulasi.....	119

8.2.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Layanan Sirkulasi	120
8.2.2 Peraturan dan Tata Tertib Layanan Sirkulasi	120
8.2.3 Sistem Pelayanan Layanan Sirkulasi	121
8.3 Layanan Referensi	124
8.3.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Layanan Referensi	124
8.3.2 Tugas Layanan Referensi	125
8.3.3 Jenis-jenis Koleksi Referensi	125
BAB 9 BENTUK USER EDUCATION	132
9.1 Pengertian <i>User Education</i>	132
9.2 Tujuan <i>User Education</i>	133
9.3 Bentuk <i>User Education</i>	134
BAB 10 PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE	
UNTUK LAYANAN PERPUSTAKAAN	141
10.1 Pendahuluan	141
10.2 Teknologi AI di perpustakaan	143
10.3 Information Retrieval	143
10.4 <i>Cataloguing & Classification</i>	145
10.5 <i>Research Support</i>	145
10.6 <i>Reference Services</i>	146
10.7 <i>Information Literacy</i>	147
10.8 <i>Communication & Public realtion</i>	148
BAB 11 LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS AI	153
11.1 Pendahuluan	153
11.2 Jenis-jenis Layanan Pemustaka	153
11.3 Pengertian AI	158
11.4 Sejarah AI dari Waktu ke Waktu	159
11.4.1 Sejarah AI: Sebelum Abad ke-20	159
11.4.2 Sejarah AI: Abad ke-20	160
11.4.3 Sejarah AI di Akhir Abad Millenium: 1990	164
11.4.4 Sejarah AI: Abad ke-21	165
11.4.5 Perkembangan AI di Abad ke-21	166
11.5 Pentingnya Kehadiran <i>Artificial Intelligence</i> untuk Pelayanan	167
11.6 Library 4.0 untuk Perpustakaan Masa Depan	168
11.7 Penerapan Berbasis AI di Pelayanan Perpustakaan	168
11.8 Penutup	176
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perpustakaan	19
Gambar 2.2 Korelasi perundangan bidang perpustakaan	33
Gambar 3.1 Alur Kerja Pengadaan Bahan Pustaka	40
Gambar 4.1 Tahapan Proses Pencapaian Tujuan Organisasi	52
Gambar 4.2 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan	55
Gambar 4.3 Tingkatan Piramida Hierarki (<i>hierarchy</i> <i>pyramid</i>)	58
Gambar 9.1 Jenis-jenis koleksi Referensi	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Regulasi Terkait Perpustakaan.....	21
Tabel 2.2 Daftar Regulasi Terkait Perpustakaan.....	23
Tabel 2.3 Ringkasan Inti Deklarasi.....	26
Tabel 9.1. Sistem Buku Besar	121

BAB 1

PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Oleh Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A

1.1 Pendahuluan

Kesadaran para penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi terlihat dari minat para difabel dalam mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari pernyataan Kemendikbud bahwa para peserta seleksi masuk perguruan tinggi dari kalangan penyandang disabilitas pemintanya semakin tinggi dan tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Diantaranya banyak yang masuk keperguruan tinggi negeri seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UI, UGM, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan masih banyak perguruan tinggi yang lain. Bahkan banyak mahasiswa difabel yang menempuh kuliah S3 di Universitas Hasanuddin Makasar, dan adanya penerimaan mahasiswa difabel karena tersedianya fasilitas baik dari infrastruktur maupun pengajar yang menunjang perkuliahan para penyandang disabilitas (Farida, 2014).

Lembaga perpustakaan merupakan sarana pendukung pendidikan dan juga sebagai sumber belajar bagi masyarakat, maka juga harus mendukung program pendidikan inklusi (Asari et al., 2018). Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan di perpustakaan. maka dari itu hendaknya perpustakaan siap mendukung layanan inklusi baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia atau pustakawan pemberi layanan, dan sumber informasi atau koleksi perpustakaan semuanya harus berbasis inklusi sosial. Akan tetapi dilapangan masih banyak perpustakaan yang belum

siap memberikan layanan pada masyarakat penyandang disabilitas atau difabel. Masyarakat difabel memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik maupun non fisik, oleh sebab itu perpustakaan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang ramah difabel baik dari segi fisik maupun non fisik. Secara fisik perpustakaan hendaknya menyiapkan layanan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan yang ramah difabel dan dari segi non fisik perpustakaan hendaknya bisa memberikan perhatian, dukungan dan budaya lingkungan perpustakaan yang ramah difabel. Dari segi fisik perpustakaan bisa menyiapkan sarana pendukung difabel mulai dari desain tata ruang perpustakaan, koleksi perpustakaan, teknologi dan sarana lain untuk mendukung layanan bagi masyarakat penyandang disabilitas (Mahdi et al., 2020).

Kemudian dari segi non fisik perpustakaan bisa membangun kompetensi pustakawan sebagai pemberi layanan. Mulai dari kompetensi *softskill* untuk memberikan layanan yang prima terhadap pemustaka difabel dan kompetensi *hardskill* seperti kemampuan pustakawan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan bagi pemustaka difabel, juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun budaya inklusi sosial di perpustakaan (Mahdi & Asari, 2020). Perpustakaan sebaiknya menjadi lembaga yang berbasis inklusi sosial, dan siapapun bisa masuk ke perpustakaan dan bisa menikmati layanan perpustakaan. Namun kebanyakan perpustakaan hanya dikunjungi oleh pemustaka kalangan tertentu, beberapa masyarakat yang lain tidak menyadari dan bahkan tidak tahu dengan apa yang ditawarkan oleh perpustakaan. Bagi kalangan masyarakat yang tidak berkunjung ke perpustakaan menganggap bahwa perpustakaan merupakan tempat yang menakutkan dan anker. Hal ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kelas sosial ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan, gender, faktor fisik, dan lain sebagainya. Dan yang sangat ironis adalah masyarakat eksklusif yang tidak ke perpustakaan merasa bahwa perpustakaan tidak memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka dan membuat mereka

jauh dari perpustakaan. padahal fungsi perpustakaan untuk memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi semua kalangan masyarakat tanpa adanya perbedaan (Gidley et al., 2010). Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lembaga pelayanan informasi dapat tercipta dengan baik melalui bentuk inklusifitas yaitu partisipasi langsung dari kelompok masyarakat dalam pembangunan perpustakaan, partisipasi masyarakat menjadi penting terkait dengan orientasi keberadaan perpustakaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Karena masyarakat merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan keberadaan lembaga pelayanan informasi yakni perpustakaan. kebutuhan masyarakat akan informasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup sudah sepatutnya menjadi landasan pokok perpustakaan. Sehingga segala upaya pengembangan perpustakaan sangat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam mengembangkan diri.

1.2 Definisi Perpustakaan

Perpustakaan menurut undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, mengandung pengertian bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi para pemustaka (Indonesia, P. N. R., 2007). Sedangkan SK Menpan No. 132 tahun 2002 memberikan batasan tentang unit perpustakaan dokumentasi dan informasi yaitu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 100 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang menempati suatu tempat khusus yang didalamnya terdapat hasil karya yang dikelola dengan menerapkan kaidah kerja yang baku (Kosam Rimbarawa, 2001).

1.3 Inklusi Sosial

Konsep inklusi sosial datang dari suatu istilah yang disebut dengan eksklusi sosial atau *social exclusion*. Istilah tersebut memiliki arti suatu masyarakat yang merasa dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya (Mahdi et al., 2020). Hal ini mengenai ketidakmampuan dari beberapa masyarakat, baik kelompok maupun individu, untuk menjaga diri mereka dalam golongan masyarakat (Power & Wilson, 2000). Mereka merasa tidak tergolong dari masyarakat atau merasa eksklusi sehingga bisa memisahkan diri dari masyarakat umum. Lebih lanjut, eksklusi sosial bisa datang dari berbagai faktor, misalnya warna kulit yang berbeda, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi seseorang atau masyarakat, yang efeknya mencegah mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Charity Commission, 2011; Noor, 2019). Hal itu menyebabkan mereka dikucilkan atau mengucilkan diri dari masyarakat yang terjadi tidak hanya pada individu, tetapi juga suatu komunitas (Mahdi et al., 2020). Krisis kesejahteraan di Eropa, kemudian pada 1980-an dijadikan program oleh Uni Eropa dalam menyejahterakan masyarakat dari kemiskinan (Dipuspida Jabar, 2019; Warsilah, 2015).

Selain itu, konsep inklusi sosial juga mengangkat martabat masyarakat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini bisa mendorong interaksi sosial antara orang-orang dengan atribut yang relevan secara sosial atau mekanisme kelembagaan impersonal dalam membuka akses ke partisipasi dalam semua bidang kehidupan sosial (Silver, 2015). Ada enam cara untuk mempromosikan inklusi sosial kepada masyarakat menurut Charity Commission (2011) yaitu sebagai berikut (Mahdi et al., 2020).

- 1) Memberikan saran dan bantuan kepada masyarakat eksklusi. Hal ini termasuk juga mencakup pada bantuan yang sifatnya membangun kapasitas mereka, seperti pelatihan keterampilan dan kompetensi diri sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh.

- 2) Melakukan penelitian mengenai masyarakat eksklusi. Hal ini bisa diteliti dari segi efek ataupun penyebab munculnya masyarakat eksklusi sehingga diharapkan bisa memberdayakan atau memberi bantuan kepada mereka.
- 3) Mengampanyekan pendidikan dan penyadaran tentang kebutuhan masyarakat eksklusi atau yang berpotensi untuk mendorong tersedianya layanan yang sesuai dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka atau masyarakat pada umumnya, untuk lebih menerima, dan terlibat dengan komunitas tertentu.
- 4) Kegiatan regenerasi untuk mengubah dan meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu kelompok jaringan guna menghubungkan kelompok di area yang terkait dengan berbagai masalah yang memengaruhi komunitas tertentu untuk memungkinkan mereka membuat hal yang lebih efektif dan turut bergabung.
- 6) Meningkatkan atau mengoordinasikan peluang bagi komunitas tertentu untuk berpartisipasi dalam masyarakat (misalnya, pada lembaga pemerintahan daerah atau LSM).

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dirinci menjadi beberapa indikator. Hal ini juga bisa mengacu pada Undang-Undang No. 8 Thn. 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai berikut (Maftuhin & Aminah, 2020).

a) Partisipasi penuh

Masyarakat yang tergolong eksklusi mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah. Sebagai contoh, dalam Pasal 40 Ayat 2, penyandang disabilitas disiapkan fasilitas untuk berpartisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Hal ini bisa diterapkan untuk masyarakat eksklusi lainnya, seperti masyarakat miskin yang ingin belajar dan melakukan pengembangan diri

dengan suatu lembaga yang menyediakan fasilitas dan sarana untuk mereka.

b) Ketersediaan Layanan dan Hak

Sebagai contoh dalam hal ini terdapat pada Pasal 125, yakni Layanan informasi dan tindak cepat untuk difabel perempuan dan anak. Selain itu, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas termuat dalam pasal 1 Ayat 9 dan pasal 18-b. Tidak hanya itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial seperti yang tertulis pada pasal 90 dan 91. Ketersediaan layanan dan hak tersebut juga tepat untuk diterapkan kepada masyarakat dengan taraf perekonomian yang rendah. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan dari lembaga atau masyarakat umum.

c) Aksesibilitas

Aksesibilitas berarti kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas dan sarana umum seperti, jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, serta layanan peradilan (Pasal 9). Bagi mereka yang eksklusif, selain penyandang disabilitas, juga mempunyai hak yang sama dalam mengikuti atau mengakses kegiatan dan layanan dari lembaga yang diperuntukan untuk masyarakat umum. Contohnya, perpustakaan umum yang juga memberikan akses terhadap mereka yang memiliki taraf perekonomian rendah.

Pada hakikatnya inklusi sosial merupakan upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Mulligan et al., (2008) mendefenisikan bahwa inklusi sosial sebagai kepastian bahwa seseorang itu harus merupakan bagian dari masyarakat inklusi sosial bagi anak jalanan menyangkut upaya mengurangi hambatan-hambatan di masyarakat yang memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi penuh di masyarakat. Partisipasi tersebut

menurutnya antara lain ialah memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan sikap dan persepsi yang positif, memastikan adanya hukum dan kebijakan yang mendukung partisipasi tersebut dan yang sifatnya non- diskriminasi.

Menurut Hamil dan Everington (2002), inklusi sosial juga dapat di definisikan sebagai perkembangan pada setiap kompetensi anak untuk berpartisipasi dalam keanekaragaman dan ketidaktergantungan dalam masyarakat, yang di artikan lebih dari keberadaan fisik mereka. Lebih lanjut lagi Hamil dan Everington mengatakan bahwa setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dapat memberikan kontribusi nilai dan mendapatkan dukungan yang di perlukan. Menurut mereka inklusi sosial tidak hanya disebabkan dari lingkungan tetapi juga bisa terdapat aspek spiritual, emosional dan fisik. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, program peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun (Mahdi et al., 2020). Inklusi sosial adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan (Thamrin Husni, 2016). Inklusi sosial digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan (Mahdi et al., 2020).

Konsep inklusi sosial pertama kali muncul pada tahun 1970-an di Prancis sebagai respon terhadap krisis kesejahteraan di negara-negara Eropa, yang memiliki dampak

yang meningkat pada kerugian sosial di eropa. Konsep ini menyebar ke seluruh eropa dan inggris sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an (Suharyanto Malawa, 2019). Konsep ini mendapatkan perhatian yang luas setelah dibahas pada konferensi tingkat tinggi *World Summit for Social Development, Copenhagen, Denmark*, 6-12 Maret 1995 atau dikenal dengan *Copenhagen Declaration on Social Development*. Deklarasi pembangunan sosial ini menekankan pada konsensus program aksi baru tentang perlunya menempatkan masyarakat di pusat pembangunan. Konsep inklusi sosial merupakan pembangunan berkesejahteraan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan tujuan masyarakat yang stabil, aman, dan adil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa inklusi sosial dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka. Mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

1.4 Inklusi Sosial di Perpustakaan

Perpustakaan inklusi merupakan perpustakaan yang memberikan layanan kepada anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan baik fisik atau mental namun memiliki potensi untuk terus berkembang melalui proses belajar yang dilakukan. Perpustakaan inklusi berusaha untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga memberikan kesempatan akses informasi yang lebih luas bagi pemustaka difabel. Kesempatan akses bagi pemustaka difabel menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan inklusi berusaha memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan layanan bagi pemustaka difabel.

IFLA telah menyusun panduan tentang “akses perpustakaan bagi pemustaka dengan disabilitas”, panduan ini memberikan kesempatan akses terhadap layanan dan koleksi yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan inklusi (Irvall and

Nielsen, 2005). Kemudian ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan perpustakaan antara lain sebagai berikut ini.

- 1) Akses fisik
- 2) Format koleksi
- 3) Layanan perpustakaan dan komunikasi.

Untuk mewujudkan kondisi inklusi secara sosial, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perpustakaan sebagaimana diungkapkan oleh Adin Bondar (2019).

- a) Menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik bagi semua orang untuk menjadi kreatif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- b) Pengembangan potensi masyarakat juga merupakan tanggung jawab moral dari pustakawan untuk ikut mendorong kualitas hidup masyarakat, hal yang dapat dilakukan yaitu pendampingan yang dilakukan oleh pustakawan kepada masyarakat.

Menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar, pusat kegiatan dan pemberdayaan potensi masyarakat yang difasilitasi oleh akses terhadap informasi secara cepat.

Pada tahun 1994 Unesco dan IFLA mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan *Public Library Manifesto*. Ini merupakan pandangan, harapan dan cara menumbuhkan perpustakaan umum. Pokok berikut merupakan terjemahan bebas dari manifesto (Naibaho, 2007).

- a) Perpustakaan umum adalah pusat informasi yang menyediakan beragam pengetahuan dan informasi bagi penggunanya
- b) Layanan diberikan dengan dasar kesamaan akses bagi setiap orang tanpa membedakan umur, ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, bahasa maupun status sosial
- c) Layanan khusus harus disediakan bagi mereka yang mengalami hambatan seperti bahasa minoritas, penyandang cacat, pasien rumah sakit maupun narapidana
- d) Semua kelompok pengguna harus mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhannya

- e) Koleksi dan layanan harus mencakup semua jenis media dan teknologi, maupun materi tradisional
- f) Materi dengan kualitas prima dan sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi yang utama
- g) Materi harus mencerminkan arah dan evolusi masyarakat yang mutakhir, maupun memori usaha dan imajinasi manusia
- h) Koleksi dan layanan hendaknya bebas dari sensor ideologi, politik, agama, atau tekanan komersial.

1.5 Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Konsep inklusi sosial mengayomi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya dan rasa hormat bagi mereka. Oleh karena itu, konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, yakni melakukan pendekatan layanan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan perpustakaan tersebut (Utami & Prasetyo, 2019). Selanjutnya, dari konsep tersebut fungsi perpustakaan berbasis inklusi sosial terbagi menjadi lima sebagai berikut (Mahdi et al., 2020).

- 1) Koleksi perpustakaan yang berbasis inklusi mementingkan kebutuhan informasi dari pengguna dalam lingkup pengadaan. Jadi, nantinya koleksi perpustakaan dapat dijadikan solusi permasalahan dari masyarakat yang ingin mempelajari sesuatu.
- 2) Hadirnya koleksi yang mementingkan kebutuhan pengguna diharapkan menjadi pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
- 3) Konsep inklusi sosial menjadikan perpustakaan sebagai media bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri (sebagai contoh *makerspace*).
- 4) Pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi juga memungkinkan pelayanan terhadap masyarakat yang berkedudukan jauh dari suatu perpustakaan. Mereka bisa mengakses sumber daya informasi tanpa harus pergi ke lokasi.

- 5) Pustakawan berperan aktif sebagai agen informasi yang akan selalu memastikan bahwa informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program perpustakaan Nasional RI berupa kegiatan merevitalisasi fungsi perpustakaan umum daerah/kota agar berbasis inklusi sosial. Perpustakaan RI berperan sebagai perpustakaan pembina, fasilitator, dan eksekutor. Hal ini berawal dari suatu yayasan bernama Perpuseru dari *Coca-Cola Foundation* yang melaksanakan program transformasi perpustakaan pada tahun 2017 (Mahdi et al., 2020). Setelah banyak disorot pada tahun 2018 program tersebut dilepaskan kepada Perpustakaan RI (Hartati, 2020). Perbedaannya dengan konsep dari Perpuseru ialah adanya berbagai macam mentoring fasilitator di setiap daerah yang menjadi mitra Perpustakaan RI. Secara garis besar kegiatan ini memiliki tujuan untuk melakukan revitalisasi fungsi perpustakaan umum di berbagai kota/kabupaten menjadi pusat belajar berbasis inklusi sosial. Kegiatan tersebut juga dilakukan terhadap perpustakaan desa yang juga tergolong dalam salah satu perpustakaan umum. Revitalisasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis inklusi menitikberatkan pada kegiatan peningkatan kapasitas perpustakaan umum agar mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan melibatkan masyarakat dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak demi keberlanjutan (Perpustakaan RI, 2019).

Konsep dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah literasi untuk kesejahteraan yang artinya masyarakat sejahtera dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan dengan keberadaan perpustakaan di daerahnya. Adapun komponen konsep tersebut terdiri atas delapan (8) hal sebagai berikut (Mahdi et al., 2020).

- 1) Merangkul perbedaan, yakni tidak membedakan setiap masyarakat dari segi agama, ras, antar golongan, dan status sosial maupun ekonomi.

- 2) Partisipatif, membuat perpustakaan terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengikuti program yang ada maupun membuat program.
- 3) Terbuka bagi siapa saja yang ingin mengakses fasilitas dan layanan yang tersedia.
- 4) Ramah, maksudnya adalah pustakawan yang ramah terhadap pengunjung atau pengguna.
- 5) Kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dianggap sama haknya dalam mengakses perpustakaan. Akses tersebut berarti mencakup layanan, fasilitas, bahkan kegiatan yang diselenggarakan perpustakaan.
- 6) Meniadakan hambatan, maksudnya pustakawan siap menjawab kebutuhan pengguna.
- 7) Nyaman, membentuk suasana yang kondusif serta menyenangkan bagi masyarakat yang berada di perpustakaan.
- 8) Saling menghargai.

Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Tujuan kebijakan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi, dan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia (Departemen for Culture Media and sport, 1999).

Menurut Suharyanto Malawa (2019) transformasi tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa peran, yaitu:

- a) Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan.
- b) Perpustakaan dirancang lebih berdayaguna bagi masyarakat.
- c) Perpustakaan menjadi wadah untuk menentukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- d) Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari, A., Saksomo, D., Dewi, A. N., & Ernaningsih, D. N. (2018). Literacy Based Sharing Knowledge On The Community. *ISLLAC: Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 2(2), 92-98.
- Bondar, A. (2019). Analisis pembangunan bidang perpustakaan terhadap peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan. *Media Pustakawan*, 26(2), 72-80.
- Charity Commission. (2011). The promotion of social inclusion. *Charity Commission, December*, 1-9. <https://doi.org/10.1080/03085148800000016>
- Department for Culture Media and Sport. (1999). *Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries: Policy Guidance for Local Authorities in England*. Stationary Office.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat. (2019). *Siti, sebuah bukti positif dari praktik inklusi sosial di perpustakaan jawa barat*. Laman Web Dipuspida Jawa Barat. <http://dispusipda.jabarprov.go.id/artikel/detail/1906131604454>
- Gidley, J., Hampson, G., Wheeler, L., & Bereded-Samuel, E. (2010). Social inclusion: Context, theory and practice. *The Australasian Journal of University-Community Engagement*, 5(1), 6-36.
- Hamil, L and Everington, C (2002). *Teaching students with moderate to severe disabilities. An applied approach for inclusive environment*. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Hartati, T. S. (2020). Perpustakaan Nasional dalam Menciptakan Peradaban dengan “Heutagogy”. *PERPUSTAKAAN SEBAGAI SIMBOL PERADABAN DAN PUSAT BUDAYA BANGSA*, 55.
- IFLA, & UNESCO. (2012). *IFLA/UNESCO multicultural library manifestoimplementation kit. December*, 1-14. <https://www.ifla.org/files/assets/libraryservices-to->

multicultural-populations/publications/ifla-unesco-multiculturallibrary manifesto_implementation-kit_2012-12.pdf

- Indonesia, P. N. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Irvall, B., & Nielsen, G. S. (2005). *Access to Libraries for Persons with Disabilities: Checklist. IFLA Professional Reports, No. 89*. International Federation of Library Associations and Institutions. PO Box 95312, 2509 CH, The Hague, Netherlands.
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tata Loka*, 19(2), 93-103.
- Maftuhin, A., & Aminah, S. (2020). Universitas Inklusif: Kisah Sukses atau Gagal. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 7(2), 293-320.
- Mahdi, R., & Asari, A. (2020). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3).
- Mahdi, R., Hasanah, M., & Asari, A. (2020). Social Inclusion-Based Library Transformation: a National Library of Indonesia's Role to Support Sustainable Development Goals (SDGs).
- Malawa, S. (2019). Model Dan Konsep Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Era Digital. *Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mulligan, M., Scanlon, C., & Welch, N. (2008). Renegotiating community life: Arts, agency, inclusion and wellbeing. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 1, 48-72.
- Naibaho, K. (2007). Menciptakan Generasi Literat Melalui

- Perpustakaan. *Visi Pustaka*, 9(3),1-8.
- Noor, M. U. (2019). Aplikasi layanan informasi berbasis internet untuk menumbuhkan inklusi sosial di perpustakaan daerah. *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 4(1), 84-95.
- Perpustakaan Nasional, R. I. (2019). Surat edaran tentang Jabatan fungsional pustakawan Bo 7458/1/KPG. 09/XII. 2019.
- Power, A., & Wilson, W. J. (2000). Social exclusion and the future of cities. *LSE STICERD Research Paper No. CASE035*.
- Rimbarawa, K. (2001). Peranan perpustakaan dalam pembinaan minat baca dan menulis. *AL- MAKTABAH*, 3(2).
- Silver, H. (2015). The contexts of social inclusion. *Available at SSRN 2641272*.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Sugiyono, L. (2005). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.
- Thamrin Husni, *Proses Inklusi Sosial Anak Jalanan Dampungan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan KKSP (Repositori Institusi USU. 2016)*, hal. 56
- Titi Haryanti, Woro (2019). *Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Cerdaskan Masyarakat*. (Diakses tanggal 29 Agustus 2019)
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 21(1), 31-38.
- Warsilah, H. (2015). Inclusive Development Approach For Reducing Social Exclusion In Urban Area: A Case Study Of Marginal Groups In Kampung Semanggi, Solo, Central Java. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2), 207-232.

BAB 2

PERANCANGAN PERPUSTAKAAN DARI SUDUT SDM DAN INFRASTRUKTUR

Oleh Dewi Maharani Rachmaningsih., S.Hum., M.A.

2.1 Pendahuluan

Sejatinya kita sudah tidak asing lagi dengan keberadaan perpustakaan. Perpustakaan semakin terasa dekat seiring dengan program yang digalakkan pemerintah, khususnya kaitannya dalam mendukung pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam perkembangan peradaban suatu bangsa. Negara-negara maju berkembang dengan pesat bukan karena memiliki sumber alam yang melimpah ruah akan tetapi ditunjang pula dengan intelektualitas, disiplin, etos kerja rakyatnya (Sulastri. dkk, 2020). Pernyataan tersebut menguatkan betapa pentingnya peran pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan instrumen utama yang harus diupayakan oleh pemerintah guna mencerdaskan dan memajukan bangsa.

Perpustakaan merupakan salah satu bagian yang didesain untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Pemerintah melalui regulasinya seolah memberikan penekanan bahwa perpustakaan merupakan aset vital yang harus diupayakan. Dewasa ini secara terbuka, perpustakaan dituntut untuk dapat mengelaborasi seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk memfasilitasi proses belajar mengajar (baik didesain untuk pendidikan formal maupun non formal). Perpustakaan lembaga pendidikan baik tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan contoh perpustakaan yang didesain bagi pendidikan formal. Taman baca, perpustakaan keliling, perpustakaan perusahaan, perpustakaan komunitas baik skala kecil maupun besar

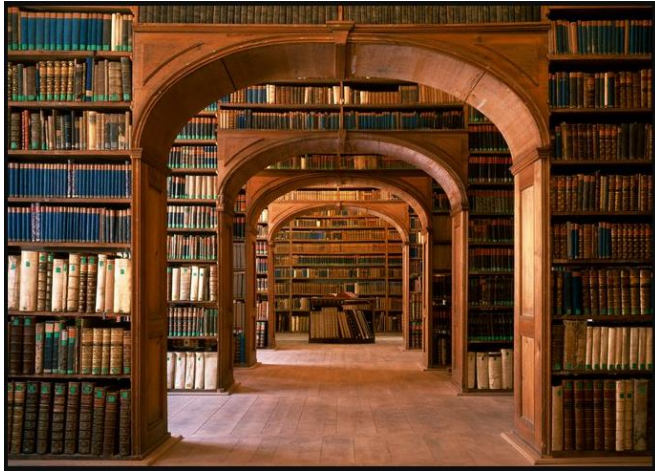
merupakan contoh perpustakaan yang didesain bagi pendidikan nonformal.

Beberapa contoh tersebut merupakan sebagian kecil perpustakaan, namun sejatinya masih banyak perpustakaan khusus milik lembaga pemerintah, swasta, LSM maupun pribadi yang didedikasikan bagi pendidikan/pengembangan diri. Seorang tokoh bernama John Dewey memberikan quote sebagai berikut ***“education is not preparation for life; education is life itself”***. Tersirat bahwa sejatinya pendidikan bukan dipersiapkan untuk kehidupan, namun yang dimaksud dengan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan merupakan proses belajar sepanjang hayat untuk pengembangan diri maupun karir dan bukan proses untuk mencapai tujuan, karena tidak ada tujuan akhir yang pasti dalam belajar. Harapan atas proses pembelajaran guna mengembangkan segala bentuk potensi seorang insan pribadi. Lantas bagaimana merancang perpustakaan jika dilihat dari sudut pandang sumber daya manusia beserta infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan?

2.2 Regulasi Perpustakaan

Proses belajar guna mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang, dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman baik formal maupun informal. Perpustakaan hadir untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mengembangkan potensi diri tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan berikut:

“Perpustakaan sebagai pusat pengetahuan terseleksi, dengan perkembangan sumber daya teknologi dan akses terhadap berbagai sumber informasi di era pengetahuan, telah memberi penekanan pada kesadaran individu menjadi pembelajar seumur hidup.” (Nurhayati, 2018)



Gambar 2.1 Perpustakaan
(Sumber: tradewinds2016.wordpress.com)

Perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengasah potensi seseorang, mengingat perpustakaan merupakan sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan yang dimaksud adalah aneka ragam koleksi bahan pustaka yang tersimpan baik berupa cetak maupun elektronik. Gambar 2.1 merupakan ilustrasi yang menggambarkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan. Idealnya perpustakaan memiliki koleksi yang beragam sesuai dengan jenis dan kebutuhan pemustaka. Perpustakaan ibarat gerbang/pintu/penghubung untuk menembus segala informasi pengetahuan. Adapun pengertian perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya (KBBI, 2022).

Kompleksitas kebutuhan informasi pemustaka diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri untuk mengembangkan potensi pemustaka. Seorang aktivis yang merupakan istri dari Presiden Amerika Serikat ke 43, Laura Bush menyampaikan bahwa *"I have found the most valuable thing in my wallet is my library card"*. Kutipan tersebut mengandung makna bahwa kartu perpustakaan merupakan barang yang berharga. Dengan memiliki kartu anggota

perpustakaan maka seorang pemustaka memungkinkan untuk mendapatkan hak akses fasilitas perpustakaan, contohnya:

1. Sumber informasi/literatur

Pemustaka dapat meminjam segala jenis koleksi perpustakaan, baik cetak maupun elektronik seperti buku, jurnal, majalah, koran, ensiklopedia, dll.

2. Sumber layanan internet

Dewasa ini, hampir seluruh perpustakaan menyediakan fasilitas internet, baik berupa jaringan wifi yang dapat diakses disekitar area perpustakaan maupun jaringan LAN menggunakan device/perangkat perpustakaan.

3. Sumber kegiatan

Pemustaka dapat ikut serta menghadiri ragam program kegiatan yang akan meningkatkan keterampilan/potensi diri, seperti bedah buku, pendidikan pemakai, diklat, bimtek dengan tema yang bervariasi.

4. Sumber jaringan komunitas

Beberapa perpustakaan biasanya dijadikan sebagai tempat perkumpulan sekelompok orang dengan tujuan sama. Adakala kegiatan di perpustakaan digunakan sebagai media pertemuan mereka.

Dewasa ini perpustakaan harus melakukan refleksi diri atas sumber daya yang dimiliki kemudian bermetamorfosis menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat mutakhir. Rancangan perpustakaan dari sudut pandang sumber daya manusia dan infrastruktur. Memastikan dengan seksama mengingat heterogenitas kepentingan, kebutuhan, latar belakang pemustaka. Guna menguatkan rancangan perpustakaan, maka alangkah baiknya memahami regulasi terkait perpustakaan. Pemahaman akan penting regulasi sebagai dasar legalitas yang sah.

2.2.1 Regulasi Nasional RI

Regulasi tertinggi yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Dengan mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui tersedianya layanan perpustakaan di seluruh Indonesia,

pembudayaan kegemaran membaca, dan masyarakat yang cerdas dan sejahtera (Meinita, 2018).

Sejarah mengemukakan fakta bahwa zaman manusia purba, zaman kerajaan sampai zaman milenial saat ini, masyarakat cenderung menghasilkan rekaman informasi, baik di dinding gua, prasasti sampai media cyber. Manusia merekam informasi pengetahuannya untuk diingat dan disampaikan kepada orang lain. Secara sederhana perpustakaan memiliki perannya untuk melakukan diseminasi informasi. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 adalah UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28f tercantum materi tentang informasi, Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan serta didukung dengan UU Nomor 4 Tahun 1990. Pemerintah merasa perlu mengatur regulasi secara khusus terkait bidang perpustakaan. Berikut ini adalah daftar regulasi turunannya:

Tabel 2.1 daftar regulasi terkait perpustakaan

Regulasi	Keterangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28f, Pasal 31 dan Pasal 32	
Undang Undang	1. UU No 4 Th 1990, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 2. UU No 20 Th 2003, Sistem Pendidikan Nasional 3. UU No 43 Th 2007, Perpustakaan 4. UU No 14 Th 2008, Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No 6 Th 2014, tentang Desa 6. UU No 23 Th 2014, Pemerintah Daerah 7. UU No 28 Th 2014, Hak Cipta 8. UU No 13 Th 2018, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Peraturan Pemerintah	1. PP No 70 Th 1991, pelaksanaan UU No 4 Th 1990 2. PP No 23 Th 1991, pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera 3. PP No 102 Th 2000, Standarisasi Nasional 4. PP No 61 Th 2010, pelaksanaan UU No 14 Th 2008 5. PP No 24 Th 2014, pelaksanaan UU No 43 Th 2007 6. PP No 55 Th 2021, pelaksanaan UU No 13 Th 2018

Peraturan/ Keputusan Menteri	1. Permendiknas No 25 Th 2008, Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah 2. Permen No 9 Th 2014, Jabatan Fungsional Pustakawan 3. Permen No 12 Th 2014, Tata Cara Serah Simpan Karya Cetak/Rekam Bidang Kesejahteraan Sosial 4. Permen No 38 Th 2015, Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Link. Kemenkes 5. Permen No 38 Th 2017, Std Kompetensi Jabatan 6. Permen No 42 Th 2018, Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing 7. Permen No 8 Th 2019, Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 8. Permen No 41 Th 2019, Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingk. KKP 9. Keputusan Menteri No 236 Th 2019, Penetapan Standar KKNi Kategori Kesenian, Hiburan, Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan 10. Permen No 30 Th 2021, Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkup Kementerian Pertanian
------------------------------------	---

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian bertugas melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perpusnas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung. Tugas Perpusnas antara lain menetapkan kebijakan nasional yang bersifat umum maupun teknis; melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi; membina kerjasama dengan berbagai jenis perpustakaan; mengembangkan standar nasional perpustakaan. Terkait tugas dan fungsi Perpusnas tersebut, maka lahirlah beragam produk regulasi terkait perpustakaan. Selanjutnya perlahan namun pasti pemerintah daerah membuat regulasi perpustakaan wilayahnya masing-masing. Berikut adalah daftar regulasi turunan terkait perpustakaan:

Tabel 2.2 daftar regulasi terkait perpustakaan

Regulasi	Keterangan
Peraturan Perpustakaan Nasional	1. No 8 Th 2014, Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB No 9 Th 2014 2. No 9 & 10 Th 2014, Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional & Teknis Bidang Kepustakawanan 3. No 16 Th 2014, tata cara penyimpanan koleksi khusus 4. No 8 Th 2015, Lembaga Akreditasi Perpustakaan 5. No 11 Th 2015, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 6. No 16 Th 2015, Lembaga Sertifikasi Profesi 7. No 10 Th 2016, Nomenklatur Perpustakaan Daerah 8. No 6-14 Th 2017, Standar Nasional Perpustakaan 9. No3-11Th2018, Instrumen Akreditasi Perpustakaan 10.No 6 Th 2019, Sistem Klasifikasi Keamanan & Akses 11.No 8 Th 2019, Pedoman Penyusunan Program Kegiatan Bidang Perpustakaan Lingkup Pemda 12.No 2 Th 2021, KKNi Bidang Perpustakaan 13.No 4 Th 2021, Akademi Literasi 14. No 10 Th 2021, Satu Data Perpustakaan 15. No 1 Th 2022, Petunjuk Pengelolaan Dana Alokasi Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah 16. No 2 Th 2022, Pedoman Akreditasi Perpustakaan
Peraturan Daerah terkait Perpustakaan di ...	Kab. Semarang, Surabaya, Kepulauan Riau, Kab. Banjarnegara, Kab. Seram Timur, Prov. Jawa Barat, Kab. Temanggung, Kab. Luwu, Kab. Berau, Kota Pekalongan, Gresik, Prov. Jawa Tengah, Kota Probolinggo, Kab. Bangka Barat, Prov. Jawa Timur, Kab. Garut, Kota Baru, Kota Banjarmasin, Kab. Bekasi, Tabalong, Kab. Tulungagung, Muara Enim, Sukabumi, Kalimantan Timur, Kab. Dharmasraya,

Regulasi	Keterangan
	Bantul, Kab. Jepara, Kab. Banyuwangi, Kab. Grobogan, Kota Tangerang Selatan, Kota Pasuruan, Bandung, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kab. Wonosobo, Kab. Ngawi, Kab. Pekalongan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Kota Kediri, Kab. Lamongan, Kota Padang, Kab. Madiun, Kalimantan Barat, Kab. Mangarai Barat, Kab. Karanganyar, Bangka Selatan, Kota Surakarta, Padang Panjang, Gubernur Kalimantan Barat, Kab. Bangka, Provinsi Nusa Tenggara barat.

Perpustakaan Nasional mengatur secara umum setiap regulasi bidang perpustakaan, mengingat cakupan regulasi tersebut digunakan meluas sebagai pedoman bagi seluruh perpustakaan se-Indonesia. Selanjutnya masing-masing perpustakaan dapat menyusun regulasi teknis yang mengacu pada regulasi Perpustakaan. Sebagai contoh adalah pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Perda No 4. Th 2010 tentang Penyelenggaraan dan Layanan Perpustakaan Daerah Banjarnegara. Kemudian Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Perda No 40, Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Perda terbaru dikeluarkan oleh Provinsi NTB dengan nomor No 7. Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Seiring dengan sejarah dan perkembangan regulasi terkait perpustakaan, pemerintah mengeluarkan standar perpustakaan baik yang dikeluarkan oleh Perpustakaan maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN). Regulasi berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Perpustakaan yang telah dibahas dan disepakati secara konsensus oleh tim beserta tanggapan Masyarakat Standarisasi Indonesia. Adapun daftar SNI yang dimaksud antara lain:

1. SNI 7329 : 2009 Perpustakaan Sekolah
2. SNI 7330 : 2009 Perpustakaan Perguruan Tinggi
3. SNI 7495 : 2009 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
4. SNI 7496 : 2009 Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

5. SNI 7596 : 2010 Perpustakaan Desa/Kelurahan

Peraturan-peraturan yang tertulis diatas merupakan contoh regulasi yang dikeluarkan oleh instansi negeri (pemerintah). Penyusunan regulasi bagi perpustakaan khusus/swasta tidak jauh berbeda karena tetap mengacu pada regulasi nasional, hanya saja ada kemungkinan teknis peraturan disesuaikan dengan kondisi jenis perpustakaan.

2.2.2 Regulasi Internasional

Tujuan tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kalimat berikut: ikut menjaga ketertiban dunia, maka dirujuk kesepakatan internasional yang telah ditanda tangani. Dalam hal ini antara lain adalah Manifesto Unesco tentang perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah, serta kesepakatan dalam Millenium Development Goals (MDGs) dan World Summit of Information Society (WSIS), (Sudarsono, 2006).

MDGs diadakan pada Bulan September 2000, dihadiri oleh para pemimpin dunia. Hasil atas pertemuan tersebut adalah para pemimpin sanggup untuk menjalin kerjasama mengurangi kemiskinan dengan kesepakatan jadwal pelaksanaan dan berakhir pada 2015. Selanjutnya, WSIS merupakan pertemuan dalam rangka membangun masyarakat informasi global terjadi pada tanggal 10-12 Desember 2003 di Geneva dan tanggal 16-18 November 2005 di Tunisia. Deklarasi dalam pertemuan Geneva termaktub dalam Dokumen WSIS-03/Geneva/DOC/4-E dengan prinsip membangun masyarakat informasi: tantangan global dalam milenium baru.

Tabel 2.3 ringkasan inti deklarasi

MDGs	a. Menghapus kelaparan dan kemiskinan b. Mencapai pendidikan dasar universal c. Mempromosikan kesetaraan gender & memberdayakan perempuan d. Mengurangi kematian anak e. Meningkatkan kesehatan ibu f. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain.
WSIS	a. Visi bersama tentang masyarakat informasi, b. Prinsip kunci menuju masyarakat informasi, c. Menuju masyarakat informasi bagi semua berbasis pada berbagi pengetahuan

Pertemuan Geneva menghasilkan 67 butir prinsip dalam membangun masyarakat informasi yang berpusat pada manusia, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang setiap warganya dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi dan pengetahuan (Sudarsono, 2006).

MDGs dan WSIS merupakan contoh regulasi yang dirujuk sebagai dasar perumusan UU Perpustakaan, lebih lanjut regulasi skala internasional yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan standar perancangan perpustakaan dari sudut SDM dan infrastruktur adalah sebagai berikut:



1. IFLA berdiri pada 30 September 1927 di Perpustakaan Edinburgh, memiliki visi memberdayakan masyarakat literasi, informatif dan partisipatif, contoh produknya antara lain:
 - model konseptual: FRBRoo, PRESSoo, FRAD, FRBR, FRSD, LRM;
 - kode format digital: UNIMARC *Authorities & Bibliographic*;
 - deskripsi bibliografi: ISBD *International Standard Bibliographic Description*, Pedoman Pembacaan ISBD di RDF;
 - petunjuk umum: Pedoman Perpustakaan Anak, Program Literasi Pedoman Pinjaman Pameran, Perpustakaan Pemerintah, Kamus Multibahasa Istilah Konsep Katalogisasi, Pedoman Digitalisasi Buku & Naskah Langka, dsb.
2. ACRL didirikan pada 31 Mei 1940, merupakan bagian dari ALA yang berfokus pada kepustakawanan akademik dan penelitian.
 - regulasi perpustakaan di perguruan tinggi: Standar Perpustakaan di Perguruan Tinggi, Pedoman Pelayanan Perpustakaan Universitas, Standar Keanekaragaman Kompetensi Budaya Perpustakaan Akademik;
 - pendidikan, personalia dan status akademik: Pernyataan ACRL tentang Kebebasan Akademik, Pedoman Pengangkatan, Promosi dan Masa Jabatan Pustakawan

- Akademik, Sertifikasi & Perizinan Pustakawan Akademik, dll;
- literasi & instruksi informasi: Kerangka Literasi Informasi di Perguruan Tinggi, Standar Literasi Informasi Mahasiswa, Standar Kompetensi Literasi Visual, dll;
 - buku langka, naskah, arsip: Kompetensi Profesional Koleksi Khusus, Pedoman Literasi Sumber Primer, Pedoman Pengamanan dan Pencurian Koleksi Khusus, dll;
 - topik khusus: Standar Layanan Perpustakaan Pembelajaran Jarak Jauh, Pedoman Sumber Daya Media, Penilaian Pustakawan, dll.
3. ISO merupakan organisasi internasional non pemerintahan yang independen sejak 14 Oktober 1946. ISO menerbitkan dokumen berisi spesifikasi berkelas dunia yang digunakan secara konsisten untuk memastikan layanan, sistem, kualitas, keamanan sesuai dengan tujuannya. ISO telah banyak mengeluarkan standarisasi bidang perpustakaan, contohnya:
- 5123:1984 - header untuk mikrofiche monograf & serial;
 - 5963:1985-metode memeriksa subjek, istilah, indeks dokumen;
 - 690:2010 - pedoman referensi Bibliografi dan kutipan ke sumber informasi;
 - 11219:2012-ruang, fungsi dan desain bangunan perpustakaan;
 - 2789:2013 - statistik perpustakaan;
 - 11620:2014 - indikator kinerja perpustakaan;
 - 19814:2017 - manajemen koleksi perpustakaan;
 - 21248:2019 - penilaian kualitas perpustakaan nasional;
 - 3901:2019 - ISRC, 3297:2020 - ISSN, 10957:2021 - ISMN;
4. NISO didirikan pada tahun 1939 sebagai asosiasi nirlaba yang diakreditasi oleh ANSI menerbitkan standar teknis siklus hidup pengelolaan informasi digital, dimulai dari penciptaan, pendokumentasian, penyimpanan, metadata, diseminasi, pelestarian, pemusnahan. Contoh standarisasi antara lain:
- ANSI/NISO Z39.29-2005 (R2010) Bibliografi Referensi;

- ANSI/NISO Z39.50-2003 (S2014) Pengambilan Informasi: Definisi Layanan Aplikasi & Spesifikasi;
- ANSI/NISO Z39.7-2013 Layanan dan Penggunaan Informasi: Metrik & Statistik untuk Perpustakaan & Penyedia Informasi;
- ANSI/NISO Z39.43-1993 (R2017) Standard Address Number (SAN) untuk Industri Penerbitan;
- ANSI/NISO Z39.48-1992 (R2009) Permanen Paper untuk Publikasi dan Dokumen di Perpustakaan dan Arsip;
- ANSI/NISO Z39.18-2005 (R2010) Laporan Ilmiah dan Teknis - Persiapan, Penyajian, dan Pelestarian, dll.

Keempat badan standarisasi tersebut terbangun sejak tahun 90an dan menjadi rujukan. Kemudian berkembanglah standarisasi bidang perpustakaan. Indonesia telah memiliki standar perpustakaan yang dikembangkan oleh BSI dan Perpunas.

2.2.3 Implementasi Regulasi Perancangan Perpustakaan

Penjelasan terkait ragam regulasi tersebut merupakan sebagian kecil contoh baik skala nasional maupun internasional. Regulasi dibuat dengan landasan teoritis maupun praktek akademisi dan praktisi perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, serta disahkan lembaga hukum terkait untuk dijadikan sebagai sebuah standar baku. Ragam contoh regulasi tersebut dapat dijadikan sebagai pondasi dalam merancang perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kontribusi para ahli perpustakaan berperan penting dalam implementasi perancangan perpustakaan yang ideal. Dewasa ini, baik praktisi maupun akademisi memiliki kecenderungan untuk berafiliasi. Mereka yang berkomitmen dalam perkembangan perpustakaan dan informasi berkumpul guna tukar pengalaman dan pikiran. Setiap wilayah memiliki wadah, sebagai contoh di tingkat Asia Tenggara terdapat CONSAL (*Congress of Southeast Asian Librarians*), ASIALA (*Asian Library Association*), AfLIA (*African Library & Information Associations & Institution*), EBLIDA (*The European Bureau of*

Library, Information and Documentation), ALIA (*The Australian Library and Information Association*). Di Indonesia organisasi kepastakawanan disebut dengan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia), ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia) dan APISI (Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia) (Murniaty, 2012). Para anggota perkumpulan tersebut berperan serta sebagai pelaksana, pengawas dalam menerapkan regulasi terkait.

Regulasi yang telah disepakati bersama dan disahkan secara hukum dijadikan sebagai standar yang perlu diimplementasikan. Standar yang terpenuhi diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal. Fasilitas, pelayanan, kompetensi perpustakaan terstandar guna mendukung pendidikan sepanjang hayat serta meningkatkan potensi diri (pemustaka). Praktek di Indonesia, implementasi perancangan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan ragam jenis perpustakaan.

2.3 Sumber Daya Manusia Dan Infrastuktur

Keberadaan perpustakaan sebaiknya dirancang dengan baik. Perancangan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan dan standar yang berlaku tanpa melanggar regulasi yang ada. Merangkum dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan infrastuktur termasuk dalam poin penting ketika merancang perpustakaan. Pernyataan tersebut diperkuat dalam regulasi terkait perpustakaan dan informasi baik skala nasional maupun internasional. Adapun contohnya, undang-undang RI beserta turunannya mengatur tentang kompetensi pengelola perpustakaan, pemakai, sarana, prasarana, anggaran, beserta standar minimal yang harus dipenuhi oleh perpustakaan. Perpustakaan ideal yang terakreditasi tentu tidak akan tercapai tanpa didukung kompetensi SDM dan infrastruktur terstandarisasi.

Standar minimal yang harus dipenuhi oleh perpustakaan harus disesuaikan dengan jenis perpustakaan. UU No 43 Tahun

2007 Bab VII Pasal 20 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang jenis perpustakaan terdiri atas:

1. Perpustakaan Nasional
2. Perpustakaan Umum
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi
5. Perpustakaan Khusus

Setiap jenis perpustakaan memiliki jenis koleksi, layanan dan target pemustaka yang berbeda. BSI sebagai badan standarisasi telah mengeluarkan SNI sesuai jenis perpustakaan di Indonesia. Sebagai contoh, perpustakaan sekolah/madrasah memiliki koleksi utama berupa buku ajar penunjang kurikulum pembelajaran dengan gedung/ruang yang minimal terdiri dari area koleksi, area baca, area kerja. Layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembimbingan akademik bagi siswa. Dukungan peralatan sarana prasarana yang disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan civitas akademik. Meja, kursi, almari buku untuk siswa SD sampai SMK tentulah berbeda ukuran dan bentuk. Pendekatan dalam rangka pendidikan pemakai meningkatkan minat baca siswa SD sampai SMA tentulah menggunakan penanganan kompetensi pustakawan yang berbeda pula.

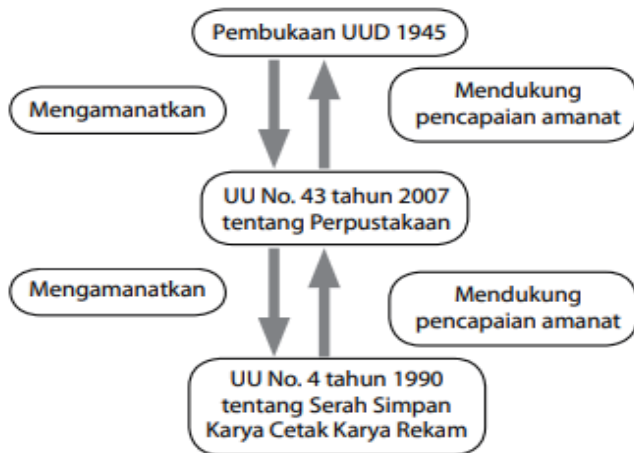
Keberadaan perpustakaan sekolah utamanya dikhususkan bagi siswa-siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tertentu, guna memenuhi kebutuhan tersebut tentunya diperlukan sumber daya manusia dan infrastruktur yang sesuai. Lebih lanjut Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 menjabarkan tentang standar tenaga perpustakaan sekolah mencakup kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Indonesia menjadi anggota ISO sejak tahun 1965. Standar ISO diterapkan di berbagai lini, termasuk perpustakaan. Pada tanggal 11 Maret 2022, BSN dan Perpustnas mengadakan kerjasama webinar dengan tajuk "Menjadi Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan SNI". BSN telah menetapkan standar nasional bidang perpustakaan yang

diadopsi dari ISO 19814:2017, 2789:2013, 11620:2014, 20000-1:2018, 27001:2013. SNI yang mengatur tentang manajemen koleksi perpustakaan, statistik perpustakaan, indikator kinerja, manajemen layanan TI, manajemen keamanan informasi. Kode 01.140.20 merupakan ICS ISO bidang ilmu informasi termasuk dokumentasi, pustakawan dan sistem kearsipan. Tercatat kurang lebih 106 standar, belum termasuk standar dari bidang lain yang dapat diimplementasikan pada perpustakaan.

2.4 Penutup

Keberadaan perpustakaan sekolah utamanya sebagai penunjang pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan dapat merancang beragam kegiatan guna meningkatkan kompetensi pemustaka. Perancangan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan antar perpustakaan pun tentunya akan berbeda dipengaruhi oleh jenis perpustakaan. Jenis perpustakaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 5, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Landasan pelaksanaan perpustakaan di Indonesia adalah UUD 1945 beserta regulasi turunannya. Secara garis besar regulasi inti terkait perpustakaan digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.2 Korelasi perundangan bidang perpustakaan
(Sumber : Kustanti, 2013)

Perundang-undangan tersebut diperkuat dengan regulasi teknis seperti pedoman, panduan dan standarisasi dari Perpustnas dan lembaga terkait. Praktisi, akademisi, pemerhati baik anggota asosiasi maupun sejenisnya ikut serta berperan aktif. Merujuk pada regulasi yang berlaku baik skala nasional maupun internasional. Pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dan infrastruktur yang sesuai dan spesifik. Merancang perpustakaan yang terstandarisasi agar tercipta perpustakaan ideal bagi pembelajaran sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi*.
- Badan Standarisasi Nasional. 2022. Menjadi Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan SNIBadan *Standarisasi Nasional*. Diunduh melalui <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12768/menjadi-perpustakaan-bertaraf-internasional-dengan-sni>
- <https://www.ifla.org/>
- <https://www.ala.org/>
- <https://www.iso.org/>
- <https://www.niso.org/>
- International Federation of Library Association and Institution. 2022. <https://www.ifla.org/what-is-an-ifla-standard/>
- Kustanti, Eni. 2013. Menyelaraskan Fungsi Perpustakaan Dalam Pengembangan Koleksi Dengan Peraturan Perundangan *Media Pustakawan*, 20(02), pp. 40-45
- Meinita, Hanna. 2018. UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa *Berita Perpustnas*. diunduh melalui <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=180921011745lbIGsYLMOS>
- Murniaty. 2012. Peran CONSAL Dalam Mengembangkan Profesionalisme Pustakawan di Asia Tenggara *Media Pustaka*, 19(01)Maret diunduh melalui <https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8213#:~:text=Di%20Indonesia%20organisasi%20kepustakawanan%20disebut,Asosiasi%20Pekerja%20Informasi%20Sekolah%20Indonesia.>
- Nurhayati, Anna. 2018. Perkembangan Perpustakaan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 9(01). doi <https://doi.org/10.20885/unilib.vol9.iss1.art3>
- Panitia Teknis 01-01. 2011. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Perpustakaan *Perpustakaan Nasional*.
- Perpustakaan Nasional. 2022. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Perpusnas. diunduh melalui

[//www.perpusnas.go.id/tugas_fungsi_wewenang.php?lang=id](http://www.perpusnas.go.id/tugas_fungsi_wewenang.php?lang=id)

Sudarsono, Blasius. Dkk. 2004. Kesepakatan Dunia Untuk Membangun Masyarakat Informasi *Jurnal BACA*, 28(02).

Sudarsono, Blasius. Dkk. 2006. Mencari Akar Kepustakawanan Indonesia *Visi Pustaka*, 08(01) Juni.

Sulastri. 2020. Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan *Journal of Education Research*. 01(03). DOI:[10.37985/jer.v1i3.30](https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.30)

BAB 3

PENGEMBANGAN KOLEKSI, *COMMUNITY STUDY* DAN PRESERVASI

Oleh Elva Rahmah, S.Sos, M.I.Kom.

3.1 Pendahuluan

Keandalan koleksi menjadi modal utama bagi perpustakaan untuk dapat menarik pemustaka mengakses berbagai koleksi. Mulai dari koleksi cetak, audio visual, multimedia sampai pada koleksi digital. Pengembangan koleksi secara berkala harus selalu dilakukan agar informasi yang tersedia selalu baru dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dari pengembangan koleksi, *community study*, dan preservasi. Untuk memudahkan pembaca memahami bab 3 ini, maka target tersebut diungkapkan secara konkret. Target utama yang dimaksud sebagai berikut. *Pertama*, pembaca dapat menjelaskan konsep pengembangan koleksi. *Kedua*, pembaca dapat memahami *community study*. *Ketiga*, pembaca dapat menjelaskan preservasi bahan pustaka.

3.2 Pengembangan Koleksi

Pengembangan koleksi adalah proses dinamis yang harus melibatkan profesional informasi dan komunitas layanan (Evans and Saponaro, 2005). Pengembangan koleksi dikonseptualisasikan oleh Ojebode (2009), yang terdiri dari sejumlah besar kegiatan perpustakaan termasuk pemilihan sumber daya, perolehan bahan-bahan yang dipilih, pengembangan rencana untuk berbagi sumber daya antar perpustakaan, dan pemeliharaan sumber daya yang diperoleh, penyiangan dan evaluasi (Nwosu and Udo-Anyanwu, 2015).

Proses mengidentifikasi, pemilihan dan pengadaan koleksi sebagai proses pengadaan atau pengembangan koleksi, dan mengacu pada pengolahan, organisasi, pemeliharaan, inventarisasi, dan pelestarian koleksi. Implementasi pengembangan koleksi mengacu pada pemilihan dan perolehan koleksi. Evaluasi koleksi melibatkan proses memastikan bahwa koleksi perpustakaan relevan dengan kebutuhan pemustaka.

3.2.1 Pengertian dan Tujuan Pengembangan Koleksi

Pengembangan koleksi adalah proses untuk memastikan bahwa perpustakaan melayani permintaan informasi dari populasi yang dilayaninya secara tepat waktu dan hemat biaya, menggunakan sumber informasi internal dan eksternal (Evans and Saponaro, 2005). Proses pengembangan koleksi perpustakaan dengan sistematis untuk memuaskan pelajar, pengajar, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan pemustaka lainnya dikenal sebagai pengembangan koleksi (Johnson, 2009).

Pengembangan koleksi sebagai proses perencanaan program perpustakaan untuk pengadaan dan penyediaan, dengan fokus pada pembangunan koleksi dalam konteks kebijakan manajemen koleksi institusi (Khan and Bhatti, 2016). Pengembangan koleksi hendaknya sesuai dengan kegiatan lembaga induk. Pengembangan koleksi bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas koleksi perpustakaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan, minat, dan selera pemustaka (Winoto, Sinaga and Rohanda, 2018).

3.2.2 Kebijakan Pengembangan Koleksi

Kebijakan pengembangan koleksi harus ditulis agar pengembangan koleksi menjadi objektif (Nwosu and Udo-Anyanwu, 2015). Kebijakan pengembangan koleksi dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyediakan koleksi yang berkualitas dan efisien bagi pemustaka sekaligus memungkinkan dana pengadaan digunakan secara efektif dan efisien (Ernaningsih and Dewi, 2016). Dalam kebijakan pengembangan koleksi memuat hal sebagai berikut.

- a. Membuat visi, misi, sasaran, masyarakat yang dilayani dan koleksi yang dimiliki perpustakaan
- b. Memuat yang bertanggungjawab mengelola dan berwenang menyeleksi koleksi
- c. Memuat metode, anggaran, dan komposisi masyarakat yang dilayani
- d. Memuat penjelasan khusus, seperti bahan pustaka, jumlah eksemplar, dan koleksi hilang
- e. Memuat penjelasan berkaitan dengan komposisi koleksi yang akan dikembangkan
- f. Memuat penjelasan mengenai koleksi perpustakaan berbahasa asing
- g. Memuat penjelasan berkaitan dengan penanganan hadiah
- h. Memuat penjelasan jaringan dan kerja sama pinjam antar perpustakaan
- i. Memuat kriteria dan cara penyiangan
- j. Memuat penjelasan berkaitan dengan sensor dan kebebasan intelektual

Asas kebijakan pengembangan koleksi didasarkan kepada kerelevanan, berorientasi kepada kebutuhan, kelengkapan, kemutakhiran dan kerjasama (Rahmah and Tesiani, 2015). Kebijakan pengembangan koleksi sangat penting untuk mewujudkan koleksi yang seimbang dan kuat. Ini menentukan ruang lingkup pengumpulan, kewenangan untuk seleksi, kriteria alokasi dana dan pemilihan berbagai jenis bahan, prioritas dalam seleksi dan kriteria untuk penyiangan.

3.2.3 Seleksi Koleksi

Selanjutnya melakukan seleksi, seleksi adalah tahapan mengidentifikasi rekaman informasi yang akan diadakan. Seleksi koleksi merupakan langkah pertama diperlukan proses pengadaan koleksi. Bahan pustaka dipilih berdasarkan kebutuhan pemustaka. Seleksi koleksi yang akan dilakukan dengan menelaah lebih jauh tentang pengertian dan falsafah seleksi, melihat proses seleksi, ketegasan tentang siapa yang memilih dan kriteria pemilihan bahan pustaka, pihak yang melakukan seleksi, prinsip umum seleksi, kriteria seleksi, dan

beberapa komponen dasar timbangan pustaka. Tujuan seleksi koleksi sebagai berikut.

1. Terciptanya koleksi perpustakaan tepat atau kuat dan berkualitas
2. Terwujudnya koleksi yang mendekati ketepatan untuk pembaca
3. Terbinanya koleksi sesuai dengan tuntutan pemustaka

Pustakawan bertanggungjawab melakukan seleksi harus:

1. Mengetahui berbagai jenis koleksi yang ada
2. Mengetahui tujuan dan fungsi lembaga induk
3. Mengenal kebutuhan pemustaka
4. Mengetahui prinsip seleksi
5. Mampu menggunakan alat-alat bantu seleksi
6. Memahami berbagai kendala yang ada

Jika dilihat dari alat bantu untuk pemilihan koleksi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Katalog penerbit dari dalam dan luar negeri
2. Bibliografi nasional dan internasional
3. Bibliografi subjek khusus
4. Tinjauan dan resensi buku
5. Iklan

3.2.4 Pengadaan Koleksi

Pengadaan koleksi adalah implementasi keputusan yang dibuat pada tahap pemilihan. Pemilihan koleksi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi keuangan lembaga. Pengadaan ini meliputi kegiatan memperoleh rekaman informasi dengan cara pembelian, hadiah atau sumbangan, tukar-menukar, dan titipan. Pengadaan koleksi melalui pembelian adalah cara terbaik. Cara pembelian dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung (langsung membeli ke toko buku) dan pembelian secara tidak langsung (pembelian melalui rekanan atau mengajukan pemesanan ke penerbit atau toko buku).

Pengadaan koleksi juga dapat dilaksanakan melalui hadiah. Hal ini, sangat penting untuk membangun koleksi perpustakaan disebabkan adanya keterbatasan dana. Sumber dari hadiah bisa dari instansi pemerintah, swasta maupun dari berbagai lembaga lainnya untuk mengembangkan koleksi yang dimiliki. Tukar menukar dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga informasi lain. Buku yang jumlah eksemplarnya berlebih di suatu perpustakaan dapat ditukarkan dengan perpustakaan lain.

Pengadaan koleksi berikutnya ini menerima titipan buku dari siapapun seperti lembaga atau instansi, tokoh masyarakat dan sebagainya. Buku yang dititipkan dapat menunjang pelaksanaan belajar-mengajar. Berikut ini gambar alur kerja pengadaan bahan pustaka.



Gambar 3.1 Alur Kerja Pengadaan Bahan Pustaka

Berikut ini beberapa komponen dasar timbangan koleksi yang akan dibeli.

1. Bahan pustaka yang dipesan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

2. Ruang lingkup materi yang meliputi keluasan cakupan materi, sistem penyajian, diurut secara logis dan sebagainya.
3. Ketepatan dan kemutakhiran informasi yang terdapat dalam koleksi.
4. Ketepatan subjek buku atau subjek buku berkaitan erat dengan pemustaka
5. Kemapanan atau kemantapan pengarang. Sejauh mana kedalaman ilmu yang dimiliki pengarang
6. Kecocokan bahasa dan harga koleksi
7. Keadaan dan kelengkapan isi koleksi
8. Kualitas fisik koleksi
9. Kemanfaatan secara teoritis dan praktis.

3.2.5 Evaluasi Pengembangan Koleksi

Evaluasi koleksi dilakukan untuk menentukan ruang lingkup, kedalaman, dan kegunaan koleksi, menguji efektivitas, kegunaan, dan penerapan praktis dari kebijakan pengembangan koleksi tertulis, menilai kecukupan koleksi dan menyoroti kekurangannya dan menyusun strategi untuk mengidentifikasi penyiangan (Nwosu and Udo-Anyanwu, 2015).

Evaluasi koleksi membantu membangun koleksi yang seimbang dan relevan sesuai dengan kebutuhan informasi komunitas penggunaanya (Khan and Bhatti, 2016). Menurut Henry et al., 2008 banyak peneliti menganggap bahwa evaluasi koleksi adalah salah satu misi inti perpustakaan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, dan bahwa mereka mendukung misi pendidikan lembaga induk (Khan and Bhatti, 2016).

Agee (2005) menyarankan tiga pendekatan utama untuk evaluasi koleksi: (1) evaluasi yang berpusat pada pengguna; (2) penilaian fisik bahan pustaka dan; (3) dukungan mata pelajaran tertentu (Khan and Bhatti, 2016). Pendekatan terpusat pada pemustaka dapat dilakukan melalui kajian sirkulasi, pendapat pemustaka, statistik peminjaman, kajian sitiran, kajian pemustaka di ruang baca dan memeriksa ketersediaan koleksi di rak.

3.3 Community Study

Perpustakaan harus belajar memahami dan mengenali masyarakat yang dilayani melalui kegiatan *community study*. Dalam melaksanakan *community study* ini faktor pemustaka adalah fokus perhatian. Mempelajari masyarakat yang dilayani dilaksanakan bisa secara formal dan non formal. Secara formal dilaksanakan perpustakaan melalui kegiatan penelitian kepada pemustaka dengan melihat berbagai faktor. Seperti faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, sosial ekonomi, dan minat baca (Ardyawin, 2020). Mempelajari masyarakat pengguna secara non formal dapat dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai sumber informasi atau terbitan berkaitan dengan kepentingan pemustaka. Tujuan dibuat *community study* ini untuk memperoleh data atau informasi akurat berkaitan dengan kebutuhan pemustaka. Untuk mengenal pemustaka bisa dilihat juga dari empat indikator yaitu usia kelompok pemustaka, pendidikan kelompok pemustaka, keterbatasan fisik kelompok pemustaka dan gender kelompok pemustaka.

3.4 Preservasi

Preservasi merupakan upaya menyelamatkan dan melestarikan hasil pikir manusia yang direkam dalam berbagai bentuk media dapat dimanfaatkan pemustaka. Dengan tujuan melestarikan kandungan informasi yang terekam dalam berbagai media dan melestarikan bentuk fisik asli koleksi sehingga dapat dimanfaatkan dalam bentuk aslinya. Kegiatan ini, meliputi reproduksi, penjilidan, laminasi atau penyampulan, pencegahan faktor-faktor merusak koleksi, dan penyiangan koleksi. Pustakawan harus berperan aktif dalam mengontrol kondisi bahan pustaka yang ada.

3.4.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Preservasi

Menurut Rachman (dalam Rifauddin and Pratama, 2020) segala upaya pelestarian konten intelektual, termasuk administrasi perpustakaan, metode, dan strategi perbaikan rekaman informasi, dan pengembangan sumber daya manusia

dalam menjaga dan melindungi koleksi dari berbagai sumber pemusnahan dan termasuk dalam pelestarian. Preservasi memiliki tujuan untuk mengusahakan koleksi tidak cepat mengalami kerusakan dan dapat dimanfaatkan lebih lama serta menjangkau lebih banyak pemustaka. Preservasi berfungsi sebagai berikut.

1. Fungsi melindungi
Berfungsi melindungi koleksi dari manusia, serangan-serangan, jamur, panas matahari, air dan bencana alam.
2. Fungsi pengawetan
Koleksi yang dirawat dengan baik-baik, dapat digunakan lebih lama, dan pada akhirnya banyak pemustaka dapat mempergunakannya.
3. Fungsi kesehatan
Dengan preservasi yang baik, koleksi bersih, sehingga pustakawan dan pemustaka menjadi sehat.
4. Fungsi pendidikan
Pustakawan dan pemustaka sendiri harus mengetahui cara menggunakan dan merawat koleksi.
5. Fungsi kesabaran
Dalam merawat koleksi perlu tingkat kesabaran yang tinggi.
6. Fungsi sosial
Pustakawan melibatkan pemustaka dalam merawat koleksi.
7. Fungsi ekonomi
Preservasi dapat menjadikan koleksi awet sehingga dapat dihemat keuangan.
8. Fungsi keindahan
Kegiatan preservasi dan penyusunan koleksi yang rapi dapat menambah daya tarik kepada pemustaka karena perpustakaan nampak semakin indah.

3.4.2 Kebijakan Preservasi Koleksi

Sumber daya perpustakaan yang menjadi koleksi perpustakaan merupakan sumber informasi bagi masyarakat atau pengguna, maka aturan pelestarian harus diberlakukan. Perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan serta sarana pelestarian budaya. Kebijakan

preservasi dilaksanakan melalui proses perencanaan yang dimulai dengan penelusuran, pengukuran keadaan, dan penetapan tindakan pelestarian yang akan digunakan.

Berikut ini adalah tujuan dari kebijakan preservasi koleksi.

- a. Melestarikan data ilmiah yang telah direkam dan dipindahkan ke media lain.
- b. Melestarikan sumber daya perpustakaan dalam bentuk fisik aslinya agar dapat dimanfaatkan secara utuh.

Prioritas kebijakan preservasi koleksi tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Nilai koleksi
- b. Jenis koleksi
- c. Pengguna koleksi
- d. Dana yang dianggarkan untuk preservasi

3.4.3 Penyebab Kerusakan Koleksi

Faktor penyebab kerusakan koleksi dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kualitas kertas, tinta, dan penjilidan. Kandungan asam dalam kertas dapat mempercepat kerusakan koleksi.

- b. Faktor Eksternal

(a) Manusia

Disebabkan oleh penanganan dan penggunaan koleksi, cara atau proses penjilidan, teknik penyusunan di rak, prosedur pengolahan, cara pustakawan dan pemustaka memegang koleksi, vandalisme atau merobek bagian tertentu dari koleksi dan melipat, mengambil dan penempatan koleksi di rak.

(b) Bukan manusia

1. Faktor biologi

Serangga (rayap, kecoak, kutu buku), hewan pengerat, dan jamur merupakan faktor biologi. Jamur tumbuh subur di lingkungan yang basah, gelap, dan

berventilasi buruk. Serangga memakan zat organik yang ditemukan di kertas, lem, dan bahan lainnya.

2. Faktor fisika

Cahaya, udara (debu), suhu, dan kelembaban adalah semua faktor fisika. Cahaya adalah katalis untuk reaksi kimia yang berpotensi merusak koleksi. Keasaman menyebabkan kertas menyerap gas berbahaya dengan cepat, mengakibatkan polusi udara.

3. Faktor kimia

Zat-zat kimia, keasaman dan oksidasi merupakan faktor kimia penyebab kerusakan koleksi.

4. Faktor lain

Faktor yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain.

3.4.4 Penanggulangan Kerusakan Koleksi

Cara penanggulangan terhadap kerusakan koleksi sebagai berikut.

1. Memperbaiki lingkungan tempat penyimpanan koleksi

Koleksi disimpan di tempat yang standar preservasi, ruangan penyimpanan bersih dan kering, menjaga kebersihan koleksi dan mengadakan fumigasi.

2. Melakukan hal-hal yang tepat dalam menangani koleksi

Mulai dari menyimpan koleksi pada rak yang baik dan benar jangan menyusun koleksi di rak terlalu padat sisakan 20% dan hindari mengambil buku yang banyak. Mengambil koleksi dengan hati-hati, dan menggunakan koleksi dengan benar.

3. Mengadakan pendidikan preservasi untuk pustakawan.

4. Mengadakan pendidikan preservasi untuk pemustaka.

Pendidikan ini bertujuan untuk (a) membangkitkan kesadaran pemustaka akan pentingnya bahan pustaka, (b) membangkitkan kesadaran pemustaka dalam usaha melestarikan bahan pustaka, (c) merealisasikan kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki pemustaka mengenai preservasi, (d) mengantisipasi dan mengatasi masalah

- preservasi bahan pustaka yang disebabkan oleh pemustaka.
5. Berkerjasama dengan berbagai pihak-pihak terkait dalam usaha preservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyawin, I. (2020) 'Urgensi Pengembangan Koleksi Sebagai Upaya Menyediakan Koleksi yang Berkualitas di Perpustakaan', *Jurnal Adabiya*, 20(1), p. 86. doi: 10.22373/adabiya.v20i1.6779.
- Ernaningsih, D. N. and Dewi, A. N. (2016) 'Urgensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan pascasarjana universitas negeri malang', *Pustakaloka*, volume 8. Available at: <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/682/531>.
- Evans, G. E. and Saponaro, M. Z. (2005) *Developing Library and Information Center Collections Recent Titles in Library and Information Science Text Series The Social Sciences: A Cross-Disciplinary Guid*. Available at: <https://archive.org/details/developinglibrary00edwa>.
- Johnson, P. (2009) *Fundamentals of Collection Development and Management*, American Library Association. doi: 10.1080/14649055.2004.10766022.
- Khan, G. and Bhatti, R. (2016) 'An analysis of collection development in the university libraries of Pakistan', *Collection Building*, 35(1), pp. 22–34. doi: 10.1108/CB-07-2015-0012.
- Nwosu, C. C. and Udo-Anyanwu, A. J. (2015) 'Collection Development in Academic Libraries in Imo State Nigeria: Status Analysis and Way Forward', *International Journal of Advanced Library and Information Science*, 3(1), pp. 126–135. doi: 10.23953/cloud.ijalis.241.
- Rahmah, E. and Tesiani, M. (2015) *Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan: Teori dan Aplikasi, Graha Ilmu*.
- Rifauddin, M. and Pratama, B. A. (2020) 'Strategi Preservasi Dan Konservasi Bahan Pustaka Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek', *Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper)*, 2(1), pp. 17–23. doi: 10.31764/jiper.v2i1.2218.
- Winoto, Y., Sinaga, D. and Rohanda (2018) *Dasar-Dasar*

Pengembangan Koleksi. Available at:
https://www.researchgate.net/profile/Yunus_Winoto/publication/333260393_Dasar-Dasar_Pengembangan_Koleksi/links/5ce4d125299bf14d95af5a89/Dasar-Dasar-Pengembangan-Koleksi.pdf.

BAB 4

KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI DALAM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN

Oleh Anita Tri Widiyawati, S.S., M.A.

4.1 Pendahuluan

Organisasi perpustakaan merupakan organisasi publik yang produknya berupa jasa atau pelayanan publik. Sehingga tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi pemustaka dengan cara menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi atau sumber kehidupan dari perpustakaan terletak pada koleksinya (Widiyawati dan Adiono, 2020:3). Tolok ukur keberhasilan dari organisasi perpustakaan yaitu seberapa besar koleksi yang dilayankan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan/memberikan kebermanfaatan bagi pemustaka. Salah satunya bisa dilihat dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perpustakaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka organisasi perpustakaan membutuhkan alat atau sarana berupa administrasi dan manajemen perpustakaan. Di dalam menjalankan administrasi dan manajemen membutuhkan sumber daya manusia yakni pemimpin dan bawahan.

Seorang pemimpin (kepala perpustakaan) mempunyai sifat harus mampu dalam melakukan supervisi agar bawahan dapat mengikuti komando dari pemimpin tersebut. Dalam menjalankan supervisi, seorang pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap keputusan atau kebijakan yang telah diambil. Hal ini dikarenakan sangat berpengaruh pada motivasi kerja bawahan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada motivasi kerja bawahan, dan kemudian menentukan pada produktivitas organisasi. Organisasi perpustakaan dapat

berkembang dengan pesat jika produktivitas organisasinya tinggi.

4.2 Organisasi Perpustakaan

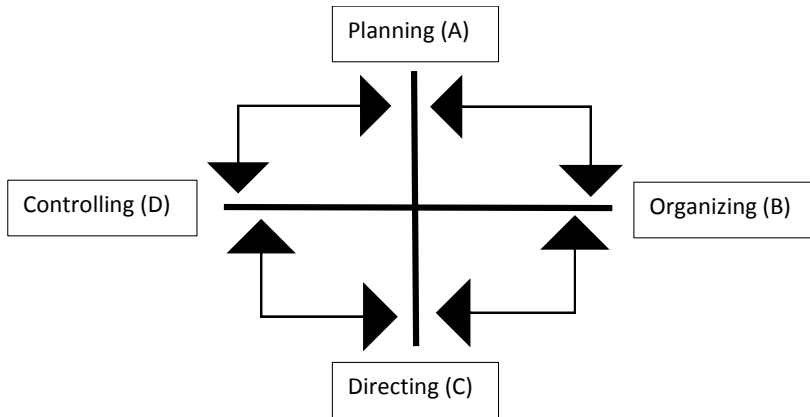
Organisasi mempunyai tiga karakteristik utama yang biasa disebut dengan 3-P, yakni: 1) *Purposes* yang berarti ‘tujuan’; 2) *People* yang berarti ‘anggota’; dan 3) *Plan* yang berarti ‘rencana’ (Gerloff dalam Kusdi, 2017:4). Di pihak lain disebutkan bahwa perpustakaan adalah suatu ruang yang didapati atau ditemukan aktivitas pengumpulan atau penghimpunan, pengolahan, dan desiminasi atau penyebarluasan berbagai informasi, baik berbentuk *printed* ataupun digital dalam bermacam-macam sarana atau media melalui pelayanan yang diberikan (Yusuf dan Suhendar, 2007:1). Jika mengacu pada pengertian tersebut menunjukkan bahwa organisasi perpustakaan mempunyai tujuan desiminasi informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka berupa pemberian pelayanan publik. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang condong pada peraihan tujuan melalui perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat. Perencanaan tersebut memuat rancangan strategis dan program kerja baik tahunan, tiga bulanan, maupun satu bulanan yang termanifestasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ini dievaluasi secara formal sesuai dengan jangka waktu program kerjanya dan dievaluasi secara informal setiap saat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menjadi bahan dalam melakukan perbaikan dalam menyusun program kerja berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi perpustakaan mempunyai pengertian “tempat adanya kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan desiminasi informasi dalam berbagai sarana baik versi digital maupun versi *printed* yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka untuk dilayankan melalui pemenuhan tujuan, sumber daya manusia, dan perencanaan.

4.3 Administrasi dan Manajemen Perpustakaan

Organisasi perpustakaan membutuhkan administrasi dan manajemen perpustakaan dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan administrasi merupakan cara atau sarana agar organisasi menjadi bergerak atau berjalan (Kusdi, 2017:7). Begitu pula dengan manajemen yang merupakan sarana untuk organisasi agar dapat berhasil guna atau mangkus dan berdaya/bertepatan guna atau sangkil dalam bekerja supaya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, khususnya di sini organisasi perpustakaan dapat tercapai.

Administrasi dan manajemen mempunyai tugas yang berbeda. Administrasi lebih berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan formulasi atau perumusan tujuan (penetapan arah organisasi), sedangkan manajemen lebih berfokus pada bagaimana mencapai arah yang telah ditetapkan tersebut (Kusdi, 2017:7-8). Hal ini menunjukkan bahwa administrasi sebagai seni, sementara manajemen lebih bersifat teknis. Akan tetapi pada praktiknya, setiap anggota organisasi yang ada pada organisasi perpustakaan, termasuk di sini pustakawan, ahli teknologi informasi, dan anggota organisasi yang lain (sumber daya manusia organisasi) dalam posisi apapun bertanggung jawab penuh terhadap aspek administratif dan aspek manajerial.

Pengelolaan organisasi perpustakaan merupakan kombinasi antara aspek administratif dan aspek manajerial. Pada umumnya untuk mencapai tujuan melibatkan empat tahapan proses yang biasa disebut sebagai PODC, yakni: 1) *Planning* yang berarti 'perencanaan'; 2) *Organizing* yang berarti 'pengorganisasian/penyatuan langkah'; 3) *Directing* yang berarti 'pengarahan'; dan 4) *Controlling* yang berarti 'pengendalian/pengawasan'. Berikut gambar proses dari empat tahapan tersebut.



Gambar 4.1 Tahapan Proses Pencapaian Tujuan Organisasi
(Sumber: Kusdi, 2017:8)

Administrasi perpustakaan dan manajemen perpustakaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang berbalas-balasan untuk mengisi atau melengkapi, sehingga ke-4 tahapan di atas menyangkut-pautkan ke-2 hal tersebut. Organisasi menjadi agen atau sasaran dari rangkaian tindakan administrasi, kemudian manajemen sebagai tempat atau wadah terjadinya rangkaian tindakan tersebut. Ensiklopedia Nasional Indonesia Vol. 16 (dalam Lasa Hs., 2005:1), manajemen adalah rangkaian tindakan: (1) *planning* yang berarti ‘perencanaan’; (2) *organizing* yang berarti ‘pengorganisasian’; serta *controlling* yang berarti ‘pengawasan’ *human resources* yang berarti ‘sumber daya manusia (SDM)/anggota organisasi dan *resource* atau sumber daya lain untuk meraih arah/haluan ataupun sasaran secara berhasil guna/mangkus dan berdaya guna/sangkil. Sumber daya tersebut dikelola melalui serangkaian tindakan manajemen perpustakaan, meliputi: (1) *Planning* yang biasa disebut dengan perencanaan; (2) *Organizing* yang biasa disebut dengan pengorganisasian; (3) *Leadership* yang biasa disebut dengan kepemimpinan; dan (3) *Controlling* yang biasa disebut dengan pengendalian atau pengawasan agar bisa menghasilkan produk barang dan layanan (Lasa, Hs., 2005:3). Sehingga bisa diambil suatu kesimpulan, administrasi perpustakaan dan manajemen

perpustakaan merupakan suatu alat atau sarana yang tidak dapat dilepaskan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Dua hal ini harus berjalan beriringan dan harus saling mendukung sesuai dengan porsi masing-masing dalam rangka perairan arah yang sudah ditentukan oleh organisasi perpustakaan. Porsi administrasi perpustakaan adalah lebih pada perumusan atau formulasi keputusan (kebijakan), sedangkan porsi dari manajemen perpustakaan adalah kegiatan teknis untuk meraih arah yang sudah ditentukan dengan mengacu pada kebijakan yang telah diambil.

4.4 *Leadership* (Kepemimpinan) dalam Manajemen Perpustakaan

Leadership Style atau biasa disebut dengan 'gaya kepemimpinan' yang menitikberatkan pandangan pada hubungan merupakan suatu tingkat melihat seorang *leader* atau pemimpin melakukan tindakan dengan baik hati dan memberikan dukungan penuh dengan cara memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan atau pengikutnya. *Consideration* atau yang biasa disebut dengan konsiderasi merupakan tingkat di mana seorang *leader* melakukan tindakan dengan cara yang baik dan suportif serta memperlihatkan perhatian kepada pengikutnya (Saleh, 2018:22). Di pihak lain Davis dan Newstrom (dalam Saleh, 2018:22-23) berpendapat bahwa seorang *leader* yang sangat menitikberatkan pandangan pada orientasi hubungan atau biasa disebut juga dengan konsiderasi akan meraih tingkat kepuasan dalam melakukan pekerjaannya dan kemampuan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan seorang *leader* sangat memperhatikan kebutuhan bawahan atau pengikutnya, sehingga seorang *leader* selalu berusaha untuk bisa bekerjasama dengan tim dan membantu bawahan atau pengikutnya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Leadership atau biasa disebut dengan kepemimpinan dalam manajemen perpustakaan menyangkut sumber daya manusia atau anggota organisasi perpustakaan yang berkaitan

dengan atasan (pemimpin) dan bawahan (pengikut) dengan penyatuan langkah dalam rangka pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi dan pengendalian atau pengawasan menjadi bagian penting dalam melaksanakan proses ini.

Sifat pemimpin Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (dalam Saleh, 2018:16-17), antara lain: (1) *intelligence* yang berarti 'kecerdasan'; (2) *personality* yang berarti 'kepribadian'; (3) *physical characteristic* yang berarti 'karakteristik fisik'; (4) *supervision ability* yang berarti 'kemampuan penyeliaan'. Kemampuan penyeliaan merupakan pendayagunaan pelaksanaan pekerjaan penyeliaan secara berhasil guna (mangkus) dengan diperlihatkan pada hal-hal yang menjadi syarat keadaan tertentu. *Leadership* merupakan gabungan dalam beberapa hal sebagai usaha untuk mempengaruhi bawahan. Aksi ini dapat mempengaruhi hubungan seorang *leader* dengan bawahan.

4.5 Pengambilan Keputusan pada Organisasi Perpustakaan

Organisasi mempunyai tiga tingkatan struktur dalam tatanannya, yaitu: (1) *main leader* yang berarti 'pimpinan utama'; (2) *medium* yang berarti 'menengah'; dan (3) *lowest* yang berarti 'terendah/staf'. Hal ini termanifestasi dalam pekerjaan yang menjadi porsinya. Seorang *main leader* atau manager mempunyai porsi pada pekerjaan yang berhubungan dengan keputusan/kebijakan. kebijakan yang diputuskan dirinci menjadi pekerjaan taktis atau teknis pada tingkatan *lowest/staff* organisasi (Chaniago, 2017:1).

Pengertian pengambilan keputusan meliputi. (1) *Choice making* yang berarti 'pembuatan pemilihan', seorang pengambil kebijakan atau keputusan sebelum melakukan pengambilan kebijakan atau keputusan terlebih dahulu melakukan pencatatan pilihan beberapa kemungkinan yang akan menjadi pilihan kebijakan. Dalam hal ini disiplin ilmu menjadi persyaratan wajib sebagai landasan pertimbangan. (2) *Problem solving* yang berarti 'pemecahan masalah' merupakan suatu tindakan pengambilan kebijakan untuk memformulasikan

permasalahan. Dalam hal ini sisi positif dan negatif menjadi persyaratan wajib sebagai bahan pertimbangan landasan pengambilan kebijakan yang terbaik, sehingga kelebihan dan kekurangan perlu diidentifikasi dalam proses perumusan masalah. (Chaniago, 2017:3).

Komponen Pengambilan kebijakan atau keputusan (Chaniago, 2017:4-6):



Gambar 4.2 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan

(Sumber: Olahan Penulis Mengacu pada Teori Chaniago, 2017)

- 1) *Goal setting* atau biasa disebut dengan ‘penetapan tujuan’. Pembuatan keputusan berdasar pada tujuan untuk apa keputusan dibuat dan apakah organisasi perpustakaan memiliki kemampuan dalam menjalankan akibat terhadap kebijakan atau keputusan yang dibuat.
- 2) *Alternative Identification* atau biasa disebut dengan ‘identifikasi alternatif’. Jika tujuan telah ditetapkan maka bisa dilanjutkan dengan menentukan berbagai pilihan-pilihan solusi yang menjadi dasar dalam meraih arah yang telah ditetapkan tersebut dengan mempertimbangkan segala akibat dari pilihan-pilihan jawaban atau solusi yang diambil.
- 3) *Uncontrolable Events* atau biasa disebut dengan ‘peristiwa tak terkendali’. Pilihan-pilihan solusi atau jawaban yang telah diambil harus mampu meramalkan situasi masa depan dengan tetap mengacu pada situasi saat ini. Jika kebijakan atau keputusan yang diambil dihadapkan pada hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya dan di luar kemampuan organisasi perpustakaan untuk menganalisisnya, maka organisasi harus tetap mencari pilihan solusi

atas situasi yang dihadapi.

- 4) *Means of Measuring Results* atau biasa disebut dengan 'sarana mengukur hasil'. Alat atau sarana yang menjadi perantara antara kebijakan atau keputusan terhadap pelaksanaan menjadi syarat wajib dalam mempertimbangkan *Means of Measuring Results*. Kebijakan atau keputusan dianggap tidak benar jika tidak sesuai dengan pelaksanaan, sebaliknya kebijakan atau keputusan dianggap berhasil jika sesuai dengan pelaksanaan. Sehingga *Means of Measuring Results* merupakan pembanding.

Pengambilan kebijakan atau keputusan yang berhasil guna (mangkus) dapat diukur seberapa besar kebijakan tersebut memberikan keberhasilan dari yang diinginkan sesuai arah yang telah ditentukan. Menurut Manullang (dalam Chaniago, 2017:6) menyatakan pengambilan kebijakan atau keputusan yang berhasil guna (mangkus) mencakup 5 (lima) tahapan peringkat, antara lain:

- (1) Tahapan *accept the challenge* (menerima tantangan);
- (2) Tahapan *looking for alternatives* (mencari Alternatif);
- (4) Tahapan *alternative assessment* (penilaian alternatif)
- (5) Tahapan *make choices and become attached* (menentukan pilihan dan menjadi terikat); dan
- (6) Tahapan *stick to the decision* (berpegang pada keputusan).

4.6 Motivasi dalam Manajemen Perpustakaan

Robbins (dalam Wibowo, 2012:378), mengungkapkan motivasi sebagai rangkaian tindakan yang menimbulkan *intensity* yang biasa disebut 'intensitas', *direction* yang biasa disebut 'arah', serta *presistence* atau biasa disebut 'usaha terus-menerus' seseorang menuju perairan arah. *Intensity* memperlihatkan seberapa gigih seorang individu berusaha. Akan tetapi *high intensity* (intensitas tinggi) bukanlah suatu jaminan pada hasil kinerja yang baik, kecuali untuk meraih tujuan organisasi perpustakaan di mana seorang individu bernaung. Motivasi adalah rangkaian tindakan yang mempengaruhi atau mendesak seorang individu atau kelompok

kerja supaya bersedia menjalankan tugas yang telah ditentukan. Di pihak lain, Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2012:379), mengungkapkan motivasi adalah serangkaian tindakan *arouse* yang berarti 'membangkitkan', *direct* yang berarti 'mengarahkan', dan *maintain* yang berarti 'menjaga' tanggapan atau reaksi manusia menuju pada perairan arah. Sementara itu Wursanto (2003:137-138) menyatakan motivasi kerja merupakan desakan yang memberikan kekuatan untuk bekerja bagi pegawai (pustakawan dan non-pustakawan) untuk berperilaku dalam upaya meraih tujuan atau arah yang telah ditentukan oleh organisasi perpustakaan. Hal ini memperlihatkan motivasi adalah manifestasi dari ruh yang dimiliki anggota organisasi untuk melaksanakan *job description* masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh semangat yang didorong oleh *reward* atau penghargaan yang diberikan oleh seorang pemimpin melalui keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Bentuk dasar motivasi menurut Fahmi (2012:143), adalah: (a) *extrinsic motivation* atau biasa disebut dengan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang), motivasi ini kemudian mendesak seseorang untuk membangkitkan gairah motivasi pada diri orang itu untuk mengubah perilaku yang telah dilakukan saat ini menjadi lebih baik; (b) *Intrinsic motivation* atau biasa disebut dengan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, motivasi ini selanjutnya mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang berguna atau bermanfaat.

Kebutuhan manusia menurut Maslow (dalam Fahmi, 2012:145-146) mengacu pada suatu urutan tingkatan kebutuhan dengan mengkatagorikan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Model ini disebut dengan model hierarki kebutuhan. Pada model tersebut mengacu pada hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga kebutuhan ini sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia termasuk pula dalam bekerja. Kebutuhan manusia tersebut harus dipenuhi agar manusia mempunyai motivasi tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terdapat 5 (lima)

tingkatan piramida hierarki, antara lain:



Gambar 4.3 Tingkatan Piramida Hierarki (*hierarchy pyramid*)

(Sumber: Olahan Penulis Mengacu pada Teori Maslow
(dalam Fahmi, 2012))

- 1) *Physiological Needs* atau yang biasa disebut dengan ‘kebutuhan fisiologikal’ merupakan *primary needs* (kebutuhan primer/dasar), yakni: pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kunci yang harus terpenuhi agar manusia mampu untuk bisa mempertahankan hidupnya.
- 2) *Security Needs* atau yang biasa disebut dengan ‘kebutuhan sosial. Jika *Physiological Needs* (tingkatan kebutuhan terendah ke-1) telah dipenuhi, maka tingkatan kebutuhan terendah ke-2 selanjutnya yakni *Security Needs* juga menjadi perhatian penting untuk bisa terpenuhi. *Security Needs* ini berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman dari kejahatan atau perlindungan terhadap bahaya yang mengancam jiwa.
- 3) *Social Needs* atau yang biasa disebut dengan ‘kebutuhan sosial’. Apabila kebutuhan *Physiological Needs* dan *Security Needs* telah dipenuhi, maka *Social Needs* yang merupakan tingkatan terendah ke-3 menjadi pendorong reaksi manusia

selanjutnya. *Social Needs* meliputi menerima dan memberi cinta kasih dan rasa memiliki melalui hubungan antarindividu, misalnya: persahabatan, pernikahan, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan saudara kandung dalam keluarga, termasuk pula hubungan keluarga besar.

- 4) *Esteem Needs* yang biasa disebut dengan 'kebutuhan harga diri' bisa diketahui dari hasrat atau harapan untuk dianggap istimewa atau luar biasa dan adanya pengakuan atas hasil yang dicapai dalam menjalankan pekerjaannya.
- 5) *Self-actualization Needs* yang biasa disebut dengan 'kebutuhan aktualisasi diri' merupakan tingkatan tertinggi piramida hierarki. *Self-actualization Needs* dapat diperoleh melalui kesempatan berprestasi dengan cara meningkatkan keterampilan serta keahlian yang dipunyai.

Apabila seorang pegawai (pustakawan dan non pustakawan) yang bekerja pada organisasi perpustakaan bisa mencukupi ke-5 hierarki kebutuhannya dalam waktu berbarengan serta balasan kerja yang didapatkan dari organisasi perpustakaan tempat pegawai tersebut bekerja tentu akan mendorong atau memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih gigih dengan penuh kesadaran dan keikhlasan diri. Sehingga organisasi perpustakaan dengan tatakelolanya harus mampu memenuhi kelima kebutuhan pegawainya agar produktivitas pegawai menjadi meningkat. Hal ini dikarenakan pegawai menjadi bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik bahkan cenderung melakukan inovasi-inovasi untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi terdapat kelemahan atau kekurangan dari teori piramida hierarki ini, yakni pada dasarnya kebutuhan manusia tidak berjenjang atau bertingkat-tingkat. Sehingga kebutuhan tersebut butuh dicukupi secara serentak atau dalam waktu yang berbarengan pada keadaan tingkatan tertentu, dengan memutuskan apa yang harus dicukupi terlebih dahulu.

Motivasi atau dorongan dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu merupakan suatu bagian yang saling

terhubung antara satu dengan yang lain. Peningkatan motivasi atau dorongan akan mempengaruhi peningkatan daya produksi (Fahmi, 2012:154). Apabila pegawai (pustakawan termasuk pula non-pustakawan) yang bekerja pada organisasi perpustakaan menginginkan daya produksinya meningkat maka pegawai harus mencintai pekerjaannya terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. Hal ini mendorong terlaksananya kerjasama yang baik, rasa tanggung jawab, serta adanya lingkungan yang menunjang.

4.7 Contoh Kasus dan Analisis

A. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadlliah (2018) tentang gaya kepemimpinan pada organisasi perpustakaan.

Pemimpin merupakan orang yang sangat berpengaruh di lembaga organisasi. Perpustakaan juga termasuk organisasi yang membutuhkan pemimpin yang mengatur alur kerja perpustakaan. Perpustakaan Grahata Pustaka Yogyakarta merupakan salah satu perpustakaan umum kota yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan. Penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan Perpustakaan Grahata Pustaka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan Perpustakaan Grahata Pustaka termasuk ke dalam pemimpin yang suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi.

B. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Utomo, (2013) tentang motivasi pustakawan pada organisasi perpustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi pustakawan dalam menulis pada terbitan berkala di Badan Arsip dan Perpustakaan, mengetahui peran terbitan berkala bagi pustakawan dan mengetahui kendala-kendala yang dialami pustakawan dalam menulis karya ilmiah pada terbitan berkala di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi

Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini yaitu pustakawan di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki motivasi yang timbul dari dalam diri mereka sendiri, namun hanya tingkatannya saja yang berbeda-beda. Yang memotivasi pustakawan untuk menulis adalah rasa puas yang timbul ketika tulisan yang mereka buat dapat dibaca oleh orang lain. Peran terbitan berkala Media Pustaka dan Buletin Pustakawan sangat bagus selain sebagai media komunikasi antarpustakawan juga bisa sebagai sarana promosi bagi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang dialami pustakawan dalam menulis pada terbitan berkala tersebut adalah kesulitan dalam mengembangkan kalimat serta menuangkan ide atau gagasan yang mereka miliki ke dalam sebuah tulisan, selain itu juga karena masalah waktu yang dimiliki untuk berlatih menulis sedikit, hal ini disebabkan karena pekerjaan rutin pustakawan yang sudah memakan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Aspizain. 2017. Teknik Pengambilan Keputusan: Pendekatan Teori dan Studi Kasus. Lentera Ilmu Cendikia: Jakarta Pusat, pp. 1-6.
- Wursanto, IG. 2003. Manajemen Kepegawaian. Yogyakarta: Kanisius, pp. 137-138.
- Fahmi, Irham. 2012. Manajemen Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta, pp. 143-154.
- Kusdi. 2017. Teori Organisasi dan Administrasi. Salemba Humanika: Jakarta Selatan, pp. 4-8.
- Lasa HS. 2005. Manajemen Perpustakaan. Yogyakarta: Gama Media, pp. 1-3.
- Nurfadlliah. 2018. Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta). *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 9(1), pp. 45-50. Available at:
<https://journal.uui.ac.id/unilib/article/download/12628/9118>
- Yusuf, Pawit M. & Suhendar, Yaya. 2007. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Kencana, p. 1.
- Saleh, Mahadin. 2018. Kepemimpinan dan Organisasi. IAIN Palopo: Palopo, pp. 16-23.
- Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali, pp. 378-379.
- Widiyawati, Anita Tri dan Adiono, Romula. 2020. Manajemen Koleksi (Collection Management). UB Press: Malang, p. 3.
- Wulandari, T., and Utomo, A.S. 2013. Motivasi Pustakawan dalam Menulis Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala di Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, [Online] Volume 2(4), pp. 68-81. Available at:
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/4659>

BAB 5

STRATEGI LAYANAN

PERPUSTAKAAN DALAM

MENGEMBANGKAN BUDAYA BACA

Oleh Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A

5.1 Pendahuluan

Masalah membaca di kalangan masyarakat merupakan salah satu masalah mendesak. Saat ini pembacaan pelajar dalam keadaan transformasi yang ambigu (Novik & Podgórecki, 2015). Studi terbaru menunjukkan bahwa masyarakat era sekarang cara membacanya tidak sistematis karena pengaruh *hyperlink* membuat masyarakat sepotong-potong dalam memahami informasi. Dalam hal ini perpustakaan merupakan lembaga yang paling kompeten untuk mendukung kegiatan membaca dan menyiapkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi. Perpustakaan merupakan agen perubahan yang dapat merubah kehidupan masyarakat dengan bacaan (Itedjere & Achugbue, 2012).

Perpustakaan merupakan sumber penyedia informasi baik informasi cetak maupun elektronik, untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran (Itsekor & Nwokeoma, 2017). Perpustakaan di masa pandemi seperti saat ini harus bisa menyediakan akomodasi membaca untuk pengguna perpustakaan. Fakta bahwa perpustakaan menawarkan suasana yang lebih kondusif diperlukan untuk mengembangkan kebiasaan membaca, itu memberikan informasi yang mudah ditemukan dengan sangat cepat karena metode sistematis pengelompokan dan organisasi informasi. Dan perpustakaan sudah seharusnya memberikan layanan yang profesional untuk memnuhi kebutuhan informasi masyarakat di era pandemi (Dominic, 2015). Solusi teknologi untuk pengembangan

membaca dan menulis tidak perlu mahal, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta bidang masing-masing (Whittingham, 2013).

Generasi masyarakat di era pandemi memiliki kebutuhan beragam, dan harapan mereka bahwa perpustakaan dapat melayani kebutuhan masyarakat. Meskipun ini mungkin tampak sulit, perpustakaan harus tetap relevan untuk setiap generasi dan kebutuhan pengetahuan (Sweeney, 2005). Disinilah keberadaan perpustakaan sangat diharapkan. Bahkan lebih jauh lagi, perpustakaan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di era pandemi dengan menyediakan informasi-informasi terbaru dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial masyarakat di era pandemi akan terbentuk seiring dengan adanya masyarakat yang terus membaca dan berfikir untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Selanjutnya, dari proses berfikir tersebut akan tercipta ide-ide dan penemuan baru. Perpustakaan sebagai institusi penyimpan ilmu pengetahuan harus dapat menghimpun dan menyebarkan hasil kreasi tersebut kepada seluruh masyarakat pengguna sebagai proses pembelajaran di era pandemi. Dalam hal ini perpustakaan dan pustakawan dituntut untuk mampu melanjutkan ide-ide tersebut secara kontinyu, mampu mengiringi perkembangan kebutuhan informasi masyarakat serta dituntut untuk jeli dalam melihat perkembangan informasi di era pandemi Covid-19 seperti saat ini.

5.2 Peran Perpustakaan

Perpustakaan sangat penting bagi kehidupan kultural dan kecerdasan bangsa, karena perpustakaan merupakan satu-satunya pranata kepastakawanan yang dapat diraih umum. Demikian pentingnya peranan perpustakaan bagi kecerdasan bangsa sehingga UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) mengeluarkan manifesto perpustakaan pada 1972. Adapun *Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO* menyatakan bahwa perpustakaan umum mempunyai empat tujuan utama, yaitu.

- 1) Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik.
- 2) Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka dan yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat.
- 3) Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi pendidikan perpustakaan umum, lebih tepat disebut sebagai pendidikan berkesinambungan ataupun pendidikan seumur hidup. Pendidikan ini hanya dapat dilakukan oleh perpustakaan umum karena perpustakaan umum merupakan satu-satunya pranata kepastakawanan yang terbuka untuk umum.
- 4) Bertindak selaku agen kultural artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya masyarakat sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya dengan cara penyelenggaraan pameran budaya, ceramah, pemutaran film, dan penyediaan informasi yang dapat meningkatkan keikutsertaan, kegemaran, dan apresiasi masyarakat terhadap segala bentuk seni budaya.

Manifesto tersebut menekankan pentingnya perpustakaan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah meninggalkan bangku sekolah, sehingga UNESCO menyarankan bahwa bila sebuah tempat berpenduduk 50.000 jiwa atau lebih maka di tempat tersebut harus dibangun sebuah perpustakaan (Basuki, 1991).

Untuk mencapai tujuannya, perpustakaan biasanya mengelompokkan objeknya menjadi empat, yaitu.

- 1) Pendidikan

Perpustakaan bertugas memelihara dan menyediakan

sarana untuk pengembangan perorangan/kelompok pada semua tingkat kemampuan pendidikan.

2) Informasi

Perpustakaan menyediakan kemudahan bagi pemakai berupa akses yang cepat terhadap informasi yang tepat mengenai seluruh julatan pengetahuan manusia.

3) Kebudayaan

Perpustakaan merupakan pusat kehidupan kebudayaan dan secara aktif mempromosikan partisipasi dan apresiasi semua bentuk seni.

4) Rekreasi

Perpustakaan memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan secara aktif rekreasi dan waktu senggang dengan penyediaan bahan bacaan.

Secara garis besar tujuan dari didirikannya perpustakaan adalah membantu masyarakat dalam memberikan layanan informasi dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhannya (Basuki, 1991). Peranan sebuah perpustakaan adalah bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan di dalam perpustakaan (Sutarno, 2003). Oleh karena itu, peranan yang harus dijalankan tersebut ikut menentukan dan mempengaruhi tercapainya misi dan tujuan perpustakaan. Peranan tersebut berhubungan dengan keberadaan, tugas, dan fungsi perpustakaan, adapun peranan perpustakaan antara lain sebagai berikut.

- a) Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya
- b) Perpustakaan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani
- c) Perpustakaan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya baca, melalui penyediaan berbagai bahan

bacaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat

- d) Perpustakaan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya
- e) Perpustakaan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan umat manusia
- f) Perpustakaan sebagai lembaga nonformal bagi anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan
- g) Perpustakaan sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan pemakai (*user education*)
- h) Perpustakaan berperan dalam menghimpun dan melestarikan koleksi bahan pustaka agar tetap dalam keadaan baik bagi semua hasil karya umat manusia yang tak ternilai harganya
- i) Perpustakaan sebagai barometer atas kemajuan masyarakat dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan dan secara tidak langsung, perpustakaan yang berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik, dapat ikut berperan dalam mengurangi dan mencegah kenakalan remaja, seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan tindak indisipliner.

Dari konsep di atas memberikan makna bahwa peranan perpustakaan dalam masyarakat adalah sebagai tempat untuk memberikan informasi, membina, mengembangkan, menyalurkan hobi atau kegemaran, minat, serta bakat yang dimiliki masyarakat melalui berbagai macam bentuk kegiatan yang diadakan atau diselenggarakan oleh perpustakaan. Di samping itu, perpustakaan ikut berperan serta dalam pembangunan nasional, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya peran utama perpustakaan adalah memberikan dan menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat pengguna tanpa terkecuali. Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian

bahwa suatu perpustakaan dikatakan berperan atau tidak, diukur dari pandangan masyarakat yang dilandasi oleh penilaian terhadap aktivitas perpustakaan dalam masyarakat. Peranan yang dimainkan perpustakaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, dan mendorong agar masyarakat dapat berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan sehingga menjadikan masyarakat mandiri yang memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dalam berpikir dan bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.

5.3 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenman No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinambela, 2008). Terdapat 12 prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU RI No. 25/2009 pasal 17 tentang Pelayanan Publik). Dan 12 prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b) Kejelasan
Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan public, unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public, dan rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.
- c) Kepastian dan tepat waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan.

- d) Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e) Tidak diskriminatif
Tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f) Bertanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h) Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- i) Kejujuran
- j) Kecermatan, hati-hati, teliti, dan telaten.
- k) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
Aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
- l) Keamanan dan kenyamanan
Proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2008). Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari kriteria berikut.

- a) Transparansi

- b) Akuntabilitas
- c) Kondisional
- d) Partisipatif
- e) Kesamaan hak
- f) Keseimbangan hak dan kewajiban.

5.4 Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dalam melayani peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang telah dikerjakan dalam mengolah/memproses buku dan penyimpanannya di rak, serta penyimpanan kartu-kartu katalognya di almari katalog (Qalyubi, 2007). Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan setelah buku sudah siap untuk dipinjamkan kepada para peminat/pengunjung perpustakaan.

Kegiatan pelayanan merupakan cara mempertemukan pemakai dengan informasi (koleksi) yang dicari. Sehingga pada prinsipnya layanan perpustakaan itu sama, yaitu memberikan bantuan kepada pembaca untuk memperoleh bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat dua jenis pelayanan dalam perpustakaan, yaitu: pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

5.5 Konsep Strategi

Terdapat beberapa konsep strategi menurut beberapa ahli, antara lain konsep strategi menurut Allison & Kaye (2005) yang mengatakan strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Kemudian konsep strategi menurut Nawawi (2003) yang berpendapat dalam membahas perkataan strategik sulit untuk dibantah bahwa penggunaannya diawali atau bersumber dari dan populer di lingkungan militer. Di lingkungan tersebut penggunaannya lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab mengatur cara

atau taktik untuk memenangkan peperangan. Tugas itu sangat penting yang dalam arti sangat strategis bagi pencapaian kemenangan sebagai tujuan peperangan. Oleh karena itu, jika keliru dalam memilih dan mengatur cara dan taktik sebagai strategi peperangan, maka nyawa prajurit akan menjadi taruhannya. Dengan demikian yang dimaksud strategi dalam peperangan adalah pengaturan cara untuk memenangkan peperangan. Di samping itu secara lebih bebas perkataan strategi sebagai teknik dan taktik dapat diartikan juga sebagai kiat seorang komandan untuk memenangkan peperangan yang menjadi tujuan utamanya. Kondisi itu menunjukkan bahwa selain strategi, ternyata terdapat unsur tujuan memenangkan perang yang sangat penting pengaruh dan peranannya dalam memilih dan mengarahkan strategi peperangan, sehingga disebut sebagai tujuan strategik.

Selanjutnya pendapat Chandler et al., (1999) bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dan pendapat Porter & Magretta (2014) mengatakan “Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing”. Konsep strategi menurut para ahli tersebut juga termaktub pada konsep strategi menurut Rangkuti (2011), yakni strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Berikut dijelaskan perkembangan dari konsep strategi tersebut.

5.6 Manajemen Strategis

Banyak definisi yang diberikan oleh para pakar terhadap manajemen strategi. Namun sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu tentang definisi strategi itu sendiri. Seperti ditawarkan Hax (2010) rumusan tentang strategi sebagai berikut.

- a) Sebagai pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral

- b) Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya
- c) Menyeleksi bidang yang digeluti atau akan digeluti organisasi
- d) Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya
- e) Melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi.

Dengan kata lain strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Tjiptono, 2000). Fokus dari perencanaan strategis adalah bagaimana mengorganisasikan pemikiran dan tindakan bersama dalam jaringan antar organisasi dan stakeholder di mana tidak seorangpun atau tidak satu lembagapun berkuasa, tetapi di dalamnya banyak orang terlibat. Artinya perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu keputusan secara tertib serta dalam keberhasilan implementasi keputusan (Sutoyo, 2001).

Bahkan strategi dapat dipikirkan sebagai suatu pola dari tujuan, kebijaksanaan, program, tindakan, keputusan, atau sumber daya yang menerangkan tentang organisasi itu, apa yang buatnya, dan mengapa ia berbuat begitu (Salusu, 2004). Dari definisi-definisi strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberikan respon yang tepat terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Sedangkan manajemen strategi seperti didefinisikan oleh Certo & Peter (1990) strategik management didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan yang berusaha agar organisasi secara keseluruhan tetap terpadu dengan

lingkungannya. Lebih jelasnya *management strategik* meliputi usaha mengadaptasikan organisasi itu sendiri dengan lingkungan eksternalnya. Definisi lain yang dikemukakan oleh Kusnadi et al., (2008) manajemen strategi adalah suatu seni, tehnik dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah sehingga memberikan kemampuan kepada organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan". Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses berkelanjutan yang meliputi usaha untuk memadukan organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian tujuan akhir dari manajemen strategis tersebut pada dasarnya membuat perencanaan yang strategis dari suatu organisasi, yang dapat memprediksi apa rencana strategis organisasi dalam jangka panjang atau yang akan datang.

Perencanaan strategis berkaitan dengan formulasi perencanaan mendasar yang strategis, sedangkan manajemen strategis bukan hanya berkaitan dengan formulasi perencanaan umum, melainkan juga berkaitan dengan implementasi dan evaluasi. Tahap perencanaan strategis berakhir dengan perumusan rencana atau strategi, sedangkan tahap manajemen strategis meliputi seluruh kegiatan manajemen mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi. Adapun manfaat dari perencanaan strategis bagi organisasi sosial atau organisasi non profit yang dirangkum dalam Bryson (2017), antara lain.

- 1) Perencanaan strategis akan membantu organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk diperjuangkan, agar organisasi termasuk organisasi birokrasi tidak hanya terjebak dalam pekerjaan yang bersifat rutin dan hanya sekedar reaktif bila terjadi permasalahan, dengan kata lain perencanaan strategis bisa memperbaiki kinerja organisasi
- 2) Perencanaan strategis bermanfaat menyadarkan seluruh anggota organisasi beserta stakeholdersnya mengenai

visi, misi dan mandat serta nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Kesadaran tersebut diperlukan seluruh komponen organisasi memahami visi dan misi organisasi dan terlibat dalam menetapkan

- 3) Perencanaan strategis akan membantu organisasi dan komunitasnya membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang yang penting, di sisi lain mereka juga dapat meminimalkan kelemahan dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi
- 4) Perencanaan strategis akan membantu organisasi birokrasi tetap relevan dengan perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial, bahkan akan mampu mempengaruhi, mengarahkan dan membentuk sistem politik, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan visi organisasi
- 5) Perencanaan strategis sangat bermanfaat untuk memungkinkan konsolidasi organisasi secara berkala, yang akan membawa pada suasana meningkatnya partisipasi keseluruhan anggota dan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan, serta menghindarkan terjadinya proses aliansi bagi elit organisasi terhadap masa anggotanya.

Fokus dari perencanaan strategis adalah bagaimana mengorganisasikan pemikiran dan tindakan bersama dalam jaringan antar organisasi dan stakeholder di mana tidak seorangpun atau tidak satu lembaga pun berkuasa, tetapi di dalamnya banyak orang terlibat. Artinya perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu keputusan secara tertib serta dalam keberhasilan implementasi keputusan (Bryson, 2017).

5.7 Lingkungan Strategis

Lingkungan sebagaimana umum diartikan meliputi kondisi, situasi keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan

organisasi (Salusu, 2004). Jadi setiap organisasi senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Organisasi kadang-kadang dapat mempengaruhi lingkungan, tetapi yang paling umum adalah organisasi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan organisasi dalam garis besarnya terdiri atas dua struktur yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal menginformasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Kekuatan adalah sesuatu yang paling baik dilakukan oleh organisasi atau suatu karakteristik yang memberinya kemampuan yang sangat besar. Atau kondisi suatu organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugasnya secara baik karena memiliki sumber daya, ketrampilan dan keunggulan lain terhadap pesaing.

Di lain pihak, kelemahan adalah sesuatu yang membuat organisasi sangat lemah, miskin, berpenampilan buruk, atau suatu kondisi yang menempatkan pada posisi ketidak beruntungan dan tidak kompetitif. Atau kondisi dimana organisasi kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Yang termasuk komponen lingkungan internal adalah tingkatan lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi dan secara normal memiliki implikasi langsung dan spesifik terhadap manajemen organisasi. Berkaitan dengan perpustakaan, maka hal-hal yang memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan merupakan komponen lingkungan internal untuk perpustakaan adalah.

- a) Sumber daya manusia
- b) Kualitas pelayanan
- c) Sarana prasarana
- d) Anggaran untuk kantor perpustakaan
- e) Letak kantor perpustakaan.

Sedangkan lingkungan eksternal menawarkan peluang sekaligus juga tantangan. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Perubahan pada situasi atau peraturan,

perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan organisasi. Yang termasuk komponen lingkungan eksternal adalah komponen ekonomi, sosial, politik hukum, teknologi, pelanggan, kompetisi, tenaga kerja, penyalur, dan komponen internasional.

Manfaat yang diharapkan dari analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal antara lain, menghasilkan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemakmuran organisasi, yakni informasi mengenai kekuatan dan kelemahan terkait dengan peluang dan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian organisasi dapat terhindar menjadi korban lingkungannya. Bahkan organisasi dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan.

5.8 Budaya Gemar Membaca

Budaya adalah pikiran atau akal budi yang tercermin di dalam pola sikap, ucapan, dan tindakan seseorang di dalam hidupnya (Wiranata, 2011). Budaya diawali dari suatu kebiasaan atau budaya. Budaya baca seseorang adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Seseorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang tersebut telah terbiasa dalam waktu yang lama di dalam hidupnya sebagian waktunya untuk membaca (Prianto, 2020). Pendorong bagi berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan kebiasaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, memadai, baik jenis, jumlah, maupun mutunya (Sutarno, 2003). Inilah formula secara ringkas untuk mewujudkan budaya gemar membaca.

Pada dasarnya budaya baca dimulai dari adanya minat baca. Minat baca seseorang diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu. Ada beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat baca masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan, dan informasi
- b) Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam
- c) Keadaan lingkungan sosial yang kondusif, maksudnya adalah adanya iklim yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca
- d) Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual; dan
- e) Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani.

Faktor-faktor tersebut dapat dipelihara melalui sikap-sikap, bahwa dalam diri tertanam komitmen membaca memperoleh keuntungan ilmu pengetahuan, wawasan dan kearifan, sehingga dari sini terbentuk budaya gemar membaca di masyarakat.

5.9 Pengembangan Budaya Baca

Untuk memperoleh pengetahuan, selain didapatkan melalui membaca, dapat juga dengan jalan menyimak (mendengar atau menonton televisi). Akan tetapi banyak ahli menyatakan, kegiatan membaca memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kegiatan lain dalam proses pencarian pengetahuan. Melalui membaca seseorang telah melakukan banyak aspek meliputi berpikir (*to think*), merasakan (*to feel*), dan bertindak melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat sebagaimana yang dianjurkan oleh bahan bacaan (*to act*) (Itsekor & Nwokeoma, 2017).

Makna sejati dari membaca adalah cara yang paling

efektif untuk menjawab segala rasa ingin tahu. Dalam lingkungan hidup yang berkembang secara tidak terbatas seperti saat ini, tidak mungkin kita bisa mencari tahu sendiri segala sesuatu. Akan tetapi membaca belum menjadi budaya di negara kita, karena menonton televisi justru lebih digemari. Itulah yang menyebabkan kegiatan membaca tidak menjadi aktivitas atau kebiasaan di masyarakat kita. Padahal membaca merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan pengetahuan dan mencerdaskan kita (Purwono, 2020).

Pemicu bagi bangkitnya minat baca adalah kemampuan membaca, dan pemacu berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca. Sedangkan kebiasaan membaca terpelihara oleh tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik dan bermutu. Minat baca memang harus dibangkitkan pada anak usia dini yang selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya baca (Dominic, 2015). Kemajuan teknologi informasi telah banyak menghasilkan berbagai cara untuk lebih mempermudah perolehan informasi. Kenyataan ini bisa menjadi saingan berat bagi usaha pengembangan budaya baca kalau sejak dini anak sudah lebih terbiasa me-nonton ketimbang membaca. Namun bila sejak dini anak sudah dibiasakan membaca sehingga membaca dirasa sebagai kebutuhan, maka budaya baca tetap diharapkan berkembang (Doiron & Asselin, 2010).

Maka sejak usia dini pula harus sudah tersedia bahan bacaan yang menarik baik untuk dibacakan kepada anak atau dibaca sendiri olehnya, untuk pertamata membangun minat baca. Bangkitnya minat baca juga terdorong oleh sejauh mana pengenalan anak dengan bacaan berupa buku. Oleh karenanya perlu diberdayakan potensi penulis buku cerita anak untuk berbagai tahap perkembangan anak. Pengembangan budaya baca dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan sikap masyarakat terhadap bahan-bahan bacaan, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan-bahan bacaan (Fabunmi & Folorunso, 2010). Ketersediaan bahan-bahan bacaan berarti tersedianya bahan-bahan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan kemudahan akses adalah tersedianya sarana dan prasarana dimana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan bacaan dan informasi tentang bahan bacaan. Pengembangan budaya baca dapat dilihat dari kebiasaan membaca (*reading habits*), karena hal ini merupakan perwujudan dari budaya baca.

Masyarakat yang mempunyai kebiasaan membaca tinggi seperti di Jepang dan Singapura mempunyai kebiasaan membaca tinggi, sehingga dapat dikatakan budaya bacanya tinggi (Joubert et al., 2014). Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dalam pengembangan budaya baca sangat dipengaruhi oleh beberapa factor berikut ini.

- a) Ketersediaan bahan bacaan
- b) Pengenalan dengan bahan bacaan
- c) Kemajuan teknologi
- d) Keinginan dan sikap masyarakat
- e) Ketersediaan akses sarana dan prasarana dan lain-lain.

Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan budaya baca. Strategi dalam pengembangan budaya baca suatu daerah dengan daerah lain tentu saja berbeda-beda karena suatu daerah memiliki kespesifikan tersendiri, sehingga memerlukan strategi tersendiri (Igwe, 2011). Dari hasil identifikasi isu-isu strategis, ada beberapa strategi untuk pengembangan budaya baca.

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola perpustakaan desa, instansi, sekolah dan komunitas.

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola perpustakaan desa, instansi, sekolah dan perpustakaan komunitas, sehingga mereka mampu melayani peminjaman sendiri dengan benar sesuai kaidah-kaidah perpustakaan. Dengan demikian, kepuasan pengguna perpustakaan dapat tercapai. Dalam melaksanakan strategi ini memerlukan biaya yang sangat banyak dan waktu yang cukup lama, karena banyaknya perpustakaan-perpustakaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan

kaidah perpustakaan kecuali beberapa perpustakaan sekolah. Untuk itu dinas Perpustakaan harus melakukannya secara bertahap. Setiap tahun secara terus menerus harus menganggarkan untuk kegiatan ini sampai seluruh pengelola perpustakaan memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang pengelolaan perpustakaan dengan baik dan benar. Dampak yang akan di rasakan jika tujuan dari strategi ini tercapai adalah meluasnya pelayanan perpustakaan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian dinas perpustakaan tinggal memantau jalannya pelayanan ini dan tidak lagi harus melakukan pelayanan sendiri sampai ke desa-desa. Keuntungan yang didapat adalah efisiensi anggaran, efisiensi jumlah pegawai dan meluasnya pelayanan perpustakaan yang ada, sehingga pengembangan budaya baca dapat tercapai. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan strategi ini adalah:

- a) Melakukan identifikasi perpustakaan yang ada.
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- c) Menentukan prioritas perpustakaan yang akan mengikuti kegiatan.
- d) Menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- e) Menyiapkan schedul pelaksanaan kegiatan.
- f) Melaksanakan kegiatan.
- g) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti penting perpustakaan. Selama ini masyarakat umum menganggap perpustakaan hanya milik pelajar dan mahasiswa, dan membaca hanya menjadi tugas dan kewajiban pelajar dan mahasiswa pula. Masyarakat menganggap membaca hanya membuang waktu

saja. Pandangan seperti inilah yang menghambat pengembangan budaya baca. Untuk itu menjadi tugas perpustakaan untuk merubah pandangan atau paradigm ini. Strategi ini merupakan kebijakan yang sulit diimplementasikan karena mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku, mempunyai tujuan jangka panjang, dan manfaat yang diberikan tidak dapat diukur secara aktual. Meskipun demikian, strategi ini harus tetap dijalankan, karena tujuan jangka panjang perpustakaan untuk dapat mengembangkan budaya baca, harus didahului dengan perubahan persepsi masyarakat. Secara terus-menerus perpustakaan harus memberikan pemahaman ini kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok terkecil yang ada di masyarakat, sehingga lebih efektif. Waktu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi ini cukup banyak, untuk itu harus dilakukan secara bertahap. Dinas perpustakaan tidak perlu menentukan waktu dan lokasi tersendiri dalam memberikan sosialisasi, karena tidak efektif dari segi biaya maupun kuantitas kehadiran masyarakat. Tetapi Perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan waktu maupun tempat berkumpulnya masyarakat. Antara lain sosialisasi dilakukan pada saat pertemuan kelompok tani, PKK, arisan dan sebagainya. Dengan demikian tingkat kehadiran masyarakat akan lebih tinggi dengan tidak memerlukan waktu khusus. Outcomes dari strategi ini dapat dilihat dari indikator hasil kebijakan menurut Grindle (1997) yaitu:

- 1) Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok.
- 2) Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat.

Dampak yang akan muncul jika tujuan dari strategi ini tercapai adalah kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membaca, yang akan berakibat pula pada meningkatnya kebiasaan membaca. Dengan meningkatnya kebiasaan membaca akan meningkat pengetahuan masyarakat, dan meningkat pula kemampuan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan

yang dilakukan untuk melaksanakan strategi ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi sumber daya manusia yang ada.
- 2) Menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- 3) Menentukan prioritas lokasi.
- 4) Melakukan pembagian tugas kepada pustakawan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi lain.
- 6) Membentuk kelompok pembaca.
- 7) Membentuk rumah belajar.
- 8) Pelaksanaan sosialisasi.
- 9) Melakukan evaluasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, M., & Kaye, J. (2005). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Basuki, Sulistyono. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bryson, J. (2017). *Effective library and information centre management*. Routledge.
- Certo, S. C., & Peter, J. P. (1990). *Case Enrichment Portfolio for Selected Cases in Strategic Management*. McGraw-Hill Publishing Company.
- Chandler, A. D., Hagström, P., & Sölvell, Ö. (Eds.). (1999). *The dynamic firm: the role of technology, strategy, organization and regions*. OUP Oxford.
- Doiron, R., & Asselin, M. (2010, August). Building a culture for reading in a multicultural, multilingual world. In *World Library and Information Congress: 76th Ifla General Conference and Assembly held on August* (pp. 10-15).
- Dominic, N. P. (2015). Reading culture: a panacea for educational development.
- Fabunmi, F. A., & Folorunso, O. (2010). Poor reading culture: A barrier to students' patronage of libraries selected secondary school in ado local government area of Ekiti-State, Nigeria. *African Research Review*, 4(2).
- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World development*, 25(4), 481-495.
- Hax, A. C. (2010). *The delta model: reinventing your business strategy*. New York: Springer.
- Igwe, K. N. (2011). Reading culture and Nigeria's quest for sustainable development. *Library philosophy and Practice*, 1-10.
- Itedjere, A. O., & Achugbue, E. I. Sokari Uwuma (2012). The Significance of the Library in Technology Education Institutions in Sustainable Youth Empowerment: A Overview. *International Journal of Library Science*, 1(2), 19-22.

- Itsekor, V. O., & Nwokeoma, N. M. (2017). The Importance of the Use of Libraries and the Need for a Reading Culture. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum*, 1, 24.
- Joubert, I., Ebersöhn, L., Ferreira, R., Du Plessis, L., & Moen, M. (2014). Establishing a reading culture in a rural secondary school: A literacy intervention with teachers. *Journal of Asian and African studies*, 49(4), 399-412.
- Kusnadi, A., Sastradihardja, R., Findriani, F., & Wanadjaja, T. L. (2008). Pengembangan Strategi Pemasaran Baru Pada PT. Simex Pharmaceutical Untuk Meningkatkan Brand Awareness Produk Vipro-G. *Journal of Business Strategy and Execution*, 1(1), 135-157.
- Nawawi, H. H. (2003). Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan.
- Nicholas, A. (2008). Preferred learning methods of the millennial generation [Faculty and Staff-Articles & Papers. Paper 18].
- Novik, N. N., & Podgórecki, J. (2015). A Model of Developing Communication Skills among Adolescents with Behavioral Problems. *International Journal of Environmental and Science Education*, 10(4), 579-587
- Porter, M., & Magretta, J. (2014). *Strategy and Competition: The Porter Collection (3 Items)*. Harvard Business Review Press.
- Prianto, J. S. (2020). Budaya Baca untuk Kemajuan suatu Bangsa. *Buletin Perpustakaan*, 1 20.
- Purwono, P. (2020). Kepustakawanan: Kemarin Dan Esok Adalah Hari Ini. *Media Pustakawan*, 19(2), 30-37.
- Qalyubi, S. (2007). Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi. *Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga*.
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2011). *Dongkrak Penjualan Melalui Strategy & Competitive Positioning*. Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Grasindo.
- Sinambela, L. P. (2008). Reformasi pelayanan publik.

- Sutarno, N. S. (2003). *Perpustakaan dan masyarakat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sutarno, N. S. (2006). *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik/Sutarno*.
- Sutoyo, A. (2001). *Strategi dan pemikiran perpustakaan: visi Hernandono*. Sagung Seto.
- Sweeney, R. (2006). Millennial behaviors and demographics. *Newark: New Jersey Institute of Technology*, 12(3), 10.
- Sweeney, R. T. (2005). Reinventing library buildings and services for the millennial generation. *Library administration and management*, 19(4), 165-176.
- Tjiptono, F. (2000). *Strategi pemasaran modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Whittingham, J. (2013). *Technological tools for the literacy classroom*. S. Huffman, W. Rickman, & C. Wiedmaier (Eds.). Information Science Reference.
- Wiranata, I. G. A., & SH, M. (2011). *Antropologi budaya*. Citra Aditya Bakti.

BAB 6

KEPEMIMPINAN PERPUSTAKAAN UNTUK MENDUKUNG AGILITAS PERPUSTAKAAN MASA DEPAN

Oleh Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.

Berbagai fenomena perubahan, pergeseran, dan pergantian fundamental-radikal (baca: mendasar dan menjangkau dasar) di berbagai lapangan kehidupan sejak dasawarsa kedua Abad XXI, baik dalam skala global, regional, nasional maupun lokal, baik dalam dimensi empiris maupun normatif, yang menimbulkan tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru di bidang perpustakaan pada Abad XXI sekarang. Tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru di bidang perpustakaan tersebut harus direspons secara setimpal agar usaha menemukan “jawaban-jawaban baru” yang cocok dan sepadan dengan tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru perpustakaan pada Abad XXI yang penuh perubahan disruptif dan turbulens. Enam fenomena perubahan, pergeseran, dan atau pergantian yang mengubah lanskap percaturan skala global, regional, nasional, dan lokal yang sangat menonjol dan menentukan bentuk dan ragam tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru di bidang perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi diuraikan berikut ini.

*Pertama, **revolusi digital***, revolusi industri keempat atau nama lain yang senapas yang berlangsung makin luar biasa dan bertubi-tubi, yang disokong oleh pertumbuhan-kembangan menakjubkan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet merupakan fenomena sangat penting Abad XXI, yang berbeda secara signifikan dengan Abad XX. Secara mendasar revolusi digital ini telah mengubah wajah kehidupan, pelbagai lapangan kehidupan, cara pandang dan cara hidup manusia, dan bahkan karakteristik kehidupan manusia. Dapat dikatakan

bahwa sekarang dunia dan kehidupan manusia sudah terdigitalisasi. Tidak mengherankan, banyak kalangan memaklumkan bahwa sekarang dunia dan kehidupan manusia berada dalam abad digital. Dalam abad digital lahirlah generasi digital yang asli (*native digital*) yang sangat berbeda profil dan karakteristiknya dibandingkan dengan generasi sebelumnya; tumbuh dan berkembang kehidupan berjejaring yang selalu terhubung secara digital (*always communication online*); kaburnya batas-batas teritorial, politik, sosial, dan budaya yang menimbulkan dinamika geopolitik, teknopolitik, sosiokultural, dan regiokultural; tumbuh aneka ragam pekerjaan terdigitalisasi; pendidikan atau pembelajaran terdigitalisasi secara luar biasa (*massive open online course*); dan sebagainya. Revolusi digital yang telah mengubah rupa dunia dan kehidupan manusia tersebut membuahkan tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru bagi dunia perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi sehingga harus direspons dan diantisipasi secara memadai.

Kedua, dunia yang semakin terintegrasi berkat semakin intensifnya internasionalisasi, globalisasi, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi dan informasi juga merupakan fenomena amat penting sejak awal Abad XXI. Dunia yang makin terintegrasi ini mengakibatkan mobilitas fisik (baca: manusia, barang, dan sejenisnya) dan non-fisik (baca: keuangan, seni, nilai, dan sejenisnya) dapat terjadi dan berlangsung secara leluasa, bebas, terbuka, intensif, berskala luas, dan cepat. Demikian juga dinamika keruangan dan jarak (spasial) berlangsung secara planetar atau berskala dunia atau regional, tidak terpadu pada ruang-ruang tradisional yang tetap dan beku. Lebih lanjut, hal tersebut membuahkan perlintasan, perjumpaan, dan persilangan berbagai manusia dan kebudayaan secara kompleks baik yang lokal maupun yang global atau regional; tradisi dan kearifan lokal berbaur dengan tradisi dan nilai global. Hal ini membuahkan tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru bagi dunia perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi.

Ketiga, dunia berlari tunggang langgang atau berubah sangat cepat akibat revolusi digital yang menerpa semua belahan bumi dan integrasi dunia yang secara nyata menjangkau semua belahan bumi merupakan fenomena amat penting ketiga Abad XXI. Dalam dunia tunggang langgang biasa terjadi perubahan tak terduga, turbulens, dan tidak jelas arahnya di samping luar biasa cepat. Bentuk dan jenis pekerjaan, profesi, dan pasar saham berubah sedemikian cepatnya, sering tidak terduga dan turbulens. Dalam dunia tunggang langgang, kecepatan dan kecekatan (agilitas) dipandang positif dan baik sehingga kecepatan, keringkasan, dan kependekan serta kepraktisan menjadi ukuran atau tolok ukur baik tidaknya sesuatu di pelbagai lapangan kehidupan manusia. Kelambatan, kerumitan, “kenjelimetan”, dan kekakuan dipandang negatif dan tidak baik, misalnya kekakuan, kerumitan, dan “kenjelimetan” tatacara administrasi dan birokrasi dipandang negatif dan tidak baik. Keterbukaan, keleluasan, kelenturan, dan keterpaduan secara serentak dipandang secara positif. Hal ini jelas menjadi tantangan dan tuntutan baru dalam dunia perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi, misalnya layanan perpustakaan harus lebih cepat, gesit, lentur, dan leluasa serta sederhana.

Berbagai fenomena tersebut menuntut atau mengharuskan perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi ditransformasikan sedemikian rupa agar keberadaan dan kegunaan perpustakaan perguruan tinggi tetap sentral sebagai jantung pendidikan sekaligus makin signifikan sebagai ruang publik akademik-intelektual. Dengan transformasi perpustakaan perguruan tinggi diharapkan dapat dikembangkan profil perpustakaan perguruan tinggi yang sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi pada satu sisi dan pada sisi lain sejalan dengan tujuan perguruan tinggi tempat perpustakaan berada. Di samping itu, transformasi perpustakaan perguruan tinggi diharapkan agar menjadikan masa depan perpustakaan perguruan tinggi semakin terang benderang pada satu pihak dan pada pihak lain terbentuk profil perpustakaan perguruan tinggi masa depan. Untuk

menggerakkan proses transformasi perpustakaan dimaksud sudah tentu diperlukan corak kepemimpinan perpustakaan tertentu. Kepemimpinan perpustakaan itu diharapkan akan dapat menggerakkan transformasi perpustakaan perguruan tinggi menjadi perpustakaan masa depan yang diidamkan sekaligus membuka masa depan perpustakaan yang cerah. Dengan kata lain, terwujud profil perpustakaan perguruan tinggi masa depan. Pertanyaannya adalah: kepemimpinan perpustakaan seperti apakah yang diperlukan untuk menggerakkan transformasi perpustakaan perguruan tinggi menuju masa depan perpustakaan yang cerah sekaligus perpustakaan masa depan yang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan tantangan yang ada?

Untuk melakukan transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi dalam rangka membentuk profil perpustakaan masa depan tersebut, sudah tentu keberadaan, keterlibatan, peran dan fungsi, dan kinerja kepemimpinan perpustakaan masa depan demikian sentral dan strategis mengingat kepemimpinan merupakan jantung organisasi dan manajemen. Berbagai pakar dan kajian kepemimpinan pada umumnya menegaskan hal tersebut. Milner dan Joyce (2005) mengemukakan bahwa kepemimpinan pelayanan publik dapat membantu organisasi (baca: perpustakaan perguruan tinggi) untuk belajar dan beradaptasi pada Abad 21 yang penuh turbulensi, disrupsi, dan paradoks. Kajian Pendleton dan Furnham (2012) telah menemukan bahwa kepemimpinan yang baik memberi dampak sangat signifikan pada kinerja organisasi birokrasi termasuk organisasi perpustakaan perguruan tinggi. Hal tersebut menegaskan bahwa model, budaya, dan kinerja kepemimpinan perpustakaan masa depan menjadi salah satu prasyarat yang harus ada [*conditio sine qua non*] yang menentukan berjalan atau tidaknya dan berhasil atau tidaknya proses transformasi perpustakaan. Tanpa keberadaan, keterlibatan, dan peran dan fungsi kepemimpinan perpustakaan masa depan secara signifikan dan intensif atau total, perubahan transformatif perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi dan daerah mustahil dapat

membentuk profil perpustakaan masa depan yang diidam-idamkan. Jadi, kepemimpinan perpustakaan masa depan menjadi aktor atau arsitek utama transformasi perpustakaan perguruan tinggi di tengah-tengah pergeseran mendasar Abad XXI yang sarat turbulensi, disrupsi, paradoks, dan tikungan tajam (*linguistic turn*).

Sebagai aktor atau arsitek utama transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi kepemimpinan perpustakaan masa depan harus memiliki kompatibilitas [*compatibility*, kecocokan], sinkronisitas [*synchronicity*, kesesuaian], keefektifan, dan kekonstruktifan dengan kebutuhan, tuntutan, dan tantangan transformasi perpustakaan masa depan Abad XXI. Berkenaan dengan hal ini, dapat diajukan pertanyaan: Apakah karakteristik kepemimpinan perpustakaan masa depan Indonesia sudah cocok dan serasi untuk menjalankan dan menggerakkan proses transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi Indonesia pada satu sisi dan pada sisi lain apakah sudah efektif dan konstruktif menggerakkan dan memberdayakan perpustakaan perguruan tinggi untuk menyiapkan, melaksanakan, dan mewujudkan pelayanan perpustakaan sebagai wujud pelayanan publik yang diidam-idamkan? Berkenaan dengan pertanyaan itu, beberapa pihak mengemukakan sinyalemen dan temuan kajian kepemimpinan pada umumnya. Kajian Prasodjo dan Kurniawan (2008) memperlihatkan bahwa kepemimpinan lokal di berbagai daerah di Indonesia telah menggerakkan transformasi perpustakaan yang bermuara pada meningkatnya mutu pelayanan publik, namun pada umumnya sinyalemen dan temuan kajian lain malah menyatakan sebaliknya. Basuki (2008) menyatakan bahwa “peran tradisional pemimpin yang mencakup pengendali, pemberi perintah, bertindak sebagai hakim, dan penjaga sudah tak sesuai lagi dengan tuntutan lingkungan internal maupun eksternal organisasi sekarang”. Pendek kata, harus kita akui, karakteristik kepemimpinan perpustakaan masa depan sekarang masih menjadi “batu sandungan” jalan dan gerak transformasi birokrasi. Oleh karena

itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa hingga sekarang kepemimpinan perpustakaan masa depan masih menggunakan paradigma lama [Abad XX] dengan karakteristik konvensional sehingga masih belum secara efektif, konstruktif, dan produktif menjalankan dan menggerakkan transformasi perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi dan daerah pada satu sisi dan pada sisi lain memberdayakan perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi dan daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

Hal tersebut mengamanatkan perlunya paradigma baru dan karakteristik baru [Abad XXI] kepemimpinan perpustakaan masa depan untuk menjalankan dan menggerakkan transformasi perpustakaan khususnya perguruan tinggi pada satu sisi dan pada sisi lain memberdayakan perpustakaan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Dikatakan demikian karena paradigma baru kepemimpinan yang akan mampu memimpin dan memberdayakan organisasi perpustakaan pada Abad 21 – termasuk perpustakaan perguruan tinggi Indonesia. Secara akademis, Richard (2006) menyatakan bahwa paradigma baru kebijakan publik untuk meningkatkan pelayanan publik memerlukan paradigma baru kepemimpinan. Kemudian Rost (1993) menyatakan bahwa kepemimpinan yang diperlukan pada Abad XXI adalah kepemimpinan yang harus mampu mentransformasikan para pengikut menjadi pemimpin dalam bidang tugas masing-masing. Demikian juga Lojeski (2010) menyatakan bahwa hanyalah pemimpin-pemimpin besar yang sanggup mentransformasikan organisasi pada Abad XXI agar organisasi itu mampu memasuki Abad XXI. Tak heran, Labkin (2010) menandakan betapa pentingnya kepemimpinan dipikirkan kembali [*rethinking leadership*]. Semua itu menunjukkan betapa mendesaknya transformasi kepemimpinan perpustakaan masa depan secara fundamental, komprehensif, dan paradigmatis guna membentuk karakteristik baru kepemimpinan perpustakaan masa depan yang kompatibel dan sinkron dengan kebutuhan, tuntutan, dan atau tantangan transformasi perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi dan daerah pada satu sisi dan pada sisi lain kebutuhan,

tuntutan, dan atau tantangan organisasional pada Abad XXI yang sangat berbeda dengan Abad XX.

Guna mewujudkan hal tersebut, tampak diperlukan perubahan atau pergeseran definisi, orientasi, posisi, fungsi dan peran, model atau teori, bahkan budaya kepemimpinan perpustakaan masa depan dalam proses transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi pada satu sisi dan pada sisi lain dalam memberdayakan organisasi perpustakaan perguruan tinggi. Dikatakan demikian karena sebagai sebuah fenomena yang kompleks dalam sejarah kehidupan manusia, kepemimpinan – termasuk kepemimpinan perpustakaan masa depan – telah banyak didefinisikan, diorientasikan, diposisikan, diperankan, difungsikan, dimodelkan atau diteorikan, dan dikembangkan budayanya oleh banyak pihak berdasarkan berbagai perspektif keilmuan dan pendekatan teoretis. Tak heran, sampai sekarang dapat ditemukan bermacam-macam definisi, orientasi, posisi, peran dan fungsi, model atau teori, budaya, dan bahkan karakteristik kepemimpinan organisasi baik organisasi publik, organisasi privat maupun organisasi sosial. Akan tetapi, tidak semua hal tersebut kompatibel dan sinkron dengan kebutuhan, tuntutan, dan tantangan transformasi perpustakaan khususnya perguruan tinggi pada satu sisi dan pada sisi lain pemberdayaan perpustakaan pada Abad XXI sekarang atau era revolusi digital, revolusi industri keempat, dan interkoneksi global. Sebab itu, sekarang sangat mendesak dilakukan pergeseran definisi, orientasi, model atau teori, dan budaya kepemimpinan perpustakaan perguruan tinggi. Hanya dengan demikianlah bakal dapat diperoleh karakteristik kepemimpinan perpustakaan masa depan dengan paradigma baru yang mendukung, menjalankan, dan menggerakkan transformasi perpustakaan pada satu sisi dan pada sisi lain memberdayakan perpustakaan khususnya perguruan guna meningkatkan mutu pelayanan publik yang semakin kompleks dan pluralistic, dalam hal ini pelayanan perpustakaan kepada pemustaka.

Sejalan dengan itu, *pertama-tama*, dalam pergeseran definisi [redefinisi] kepemimpinan perpustakaan masa depan

perlu dirumuskan kembali substansi dan spektrum makna keberadaan kepemimpinan sekalipun hingga sekarang sudah ada ratusan definisi kepemimpinan. Dalam hal ini perlu ditegaskan substansi dan spektrum makna keberadaan kepemimpinan perpustakaan sebagai perkara menemukan jalan terang organisasi guna mencapai tujuan organisasi perpustakaan. Dikatakan demikian karena kata *kepemimpinan* berasal dari kata *pemimpin* yang merupakan terjemahan istilah *leader* yang terdiri atas akar kata “*lea*” yang berarti jalan dan “*der*” berarti penemu; berarti pemimpin hadir atau ada sebagai pembaca dan penemu [*pathfinder*] tanda-tanda dan penunjuk jalan untuk mencapai tujuan utama dan sasaran luhur bersama (Hall & Yarhi-Milo, 2012). Jika demikian, maka pada dasarnya kepemimpinan perpustakaan merupakan perkara pembacaan dan penemuan jalan bersama yang [dipandang] terbaik untuk mencapai tujuan utama dan sasaran luhur bersama di bidang perpustakaan. Berkenaan dengan hal ini, Fernandez-Armesto (2009), Goethals (2009), Goethals dan Wren (200), Griffin (2009), Thorp dan Verschuur (2009) menegaskan bahwa kepemimpinan senantiasa berurusan dengan penemuan baru sehingga kepemimpinan dan penemuan merupakan “pinang dibelah dua” yang tak boleh dipisahkan dalam organisasi perpustakaan. Untuk itu, kepemimpinan perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi memprasyaratkan kemampuan, kecakapan, ketepatan, ketajaman, kepekaan, kedalaman, dan keliwaian membaca tanda-tanda dan petunjuk dalam usaha menemukan jalan bersama yang terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran luhur bersama yang dicitakan di bidang perpustakaan. Dari sini jelas bahwa *substansi keberadaan kepemimpinan perpustakaan pertama-tama bukanlah persoalan kemampuan mengendalikan, memberi pengaruh, memberi perintah, memberikan petunjuk, dan sejenisnya yang secara konvensional dilekatkan pada teori-teori kepemimpinan modern Abad XX, melainkan kecerdasan dan kemampuan menemukan jalan bersama yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama perpustakaan*. Oleh karena itu, pada dasarnya kepemimpinan perpustakaan masa depan berkenaan

dengan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, karakter, integritas, dan *soft skills* perpustakaan masa depan dalam membaca dan memahami hak-hak dasar publik, kebutuhan dasar dan strategis publik, ketentuan dan peraturan pelayanan dan administrasi publik, konteks pelayanan publik, dan harapan publik dalam rangka menemukan arah, pendekatan, metode, teknik atau strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi.

Hal tersebut digerakkan dan diarahkan oleh visi dan nilai-nilai bersama di bidang perpustakaan sehingga visi dan nilai-nilai bersama perpustakaan merupakan substansi yang melekat dalam kepemimpinan perpustakaan masa depan. Dengan mengutip hasil sebuah survei, Rachman dan Savitri (2012) menegaskan bahwa visi dan nilai-nilai bersama itu harus berdampak pada organisasi. Dengan kata lain, visi dan nilai-nilai bersama yang berdampak perlu selalu ada [*condition sine qua non*] dalam kepemimpinan perpustakaan masa depan karena tidak akan mungkin terwujud kepemimpinan tanpa visi dan nilai-nilai bersama yang berdampak. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi termasuk organisasi perpustakaan, bahkan visi dan nilai-nilai bersama yang berdampak itu perlu dibangun dan dipelihara oleh pemimpin (Huse & Gabrielsson, 2012). Tanpa visi dan nilai-nilai bersama yang berdampak, niscaya kepemimpinan perpustakaan tidak akan mampu menciptakan sasaran luhur masa depan perpustakaan yang menjadi dambaan bersama dan tugas agung yang harus dicapai bersama dalam sebuah organisasi perpustakaan. Untuk itulah pemimpin perpustakaan harus dapat membatinkan [melakukan internalisasi] dan melembagakan [melakukan institusionalisasi] visi dan nilai-nilai bersama perpustakaan yang sifatnya spiritual-profetis dan humanistik tersebut dalam organisasi perpustakaan sehingga visi dan nilai-nilai bersama tersebut dapat menjadi rujukan, panduan, dan panutan serta kendali bagi semua anggota organisasi termasuk anggota perpustakaan perguruan tinggi. Jika hal tersebut mampu dilakukan oleh pemimpin perpustakaan, maka visi dan nilai-nilai bersama

kepemimpinan perpustakaan akan tertransformasi menjadi milik bersama dan kemudian akan tercipta suatu lingkungan bersama di dalam organisasi, termasuk organisasi perpustakaan perguruan tinggi. Dalam lingkungan bersama yang dijiwai oleh visi dan nilai-nilai bersama ini, niscaya semua anggota organisasi perpustakaan ingin melakukan sesuatu sebagai bagian organisasi perpustakaan, bukan sekadar bekerja untuk organisasi perpustakaan. Tak heran, Covey (2005) menarik simpulan sebagai berikut: "Kepemimpinan adalah menciptakan sebuah lingkungan sehingga orang ingin menjadi bagian dari organisasi dan bukan sekadar bekerja untuk organisasi. Kepemimpinan menciptakan lingkungan yang membuat orang ingin melakukan sesuatu, dan bukan harus melakukan sesuatu". Oleh karena itu, visi dan nilai-nilai bersama kepemimpinan perpustakaan masa depan harus dikembangkan, dilembagakan, dan diaktualisasikan dalam perpustakaan pemerintah.

Di samping visi dan nilai-nilai bersama yang berdampak, kreativitas dan inovasi juga merupakan substansi yang selalu melekat dalam keberadaan kepemimpinan perpustakaan masa depan (Adair, 2007; El-Meligi, 2005; Fitton et al., 2007). Dalam hal ini Adair (2005) menegaskan bahwa pemimpin selalu berurusan dengan kreativitas dan inovasi karena derajat kreativitas dan inovasi akan menentukan hidup matinya kepemimpinan dan pemimpin di dalam organisasi, bahkan hidup matinya organisasi itu sendiri. Dikatakan demikian karena hanya dengan kreativitas dan inovasi-lah seorang pemimpin akan mampu menemukan jalan-baru autentik untuk mencapai tujuan utama dan sasaran luhur bersama; hanya dengan kreativitas dan inovasi-lah kepemimpinan akan dapat menemukan jalan bersama terbaik untuk mencapai tujuan utama dan sasaran luhur bersama. Pada masa sekarang dan lebih-lebih masa depan yang disebut sebagai Abad Pengetahuan atau Abad Kreatif, keberadaan kreativitas dan inovasi semakin fundamental, sentral, dan strategis dalam kepemimpinan perpustakaan sebuah organisasi perpustakaan sehingga disebut sebagai modal kreatif-inovatif [*creative capital*]. Pada masa

depan jelas modal kreatif-inovatif akan semakin fundamental, sentral, dan strategis dalam berbagai lapangan kehidupan manusia – termasuk dalam kehidupan organisasi perpustakaan perguruan tinggi atau organisasi publik lainnya (Murphy dan Riggio, 2003). Karena itu, kepemimpinan perpustakaan masa depan harus memiliki modal kreatif-inovatif yang unggul supaya transformasi perpustakaan perguruan tinggi dan daerah dapat dijalankan dan digerakkan.

Selanjutnya keberadaan kepemimpinan perpustakaan masa depan tersebut juga terlekat transendentalitas/spiritualitas, intelektualitas, emosionalitas, adversitas dan ketubuhan [*bodily*] karena jiwa, pikiran, hati, mental, dan raga manusia secara terpadu membentuk identitas diri manusia (Bounfour and Edvinsson, 2005; Covey, 2005; Clegg, Courpasson, dan Phillips, 2006; Gardner, 2011). Dengan kata lain, transendentalitas/spiritualitas, intelektualitas, emosionalitas, adversitas, dan ketubuhan merupakan modal manusia (*human capital*) yang akan menentukan keberadaan kepemimpinan apapun – termasuk kepemimpinan perpustakaan masa depan. Dikatakan demikian karena transendentalitas/spiritualitas akan menjadikan kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan mampu menetapkan arah, merumuskan tujuan bersama, membangun visi-misi bersama, dan meyakini kebenaran arah-tujuan-visi organisasi secara jangka panjang dan jauh [*teleologis*], bahkan mampu membawa visi-misi spiritual ke dalam organisasi (Hendrawan, 2009); intelektualitas akan membuat kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan mampu memahami dengan tepat, menganalisis dengan tajam, menciptakan, merumuskan, merancang, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program organisasi secara logis, rasional, dan argumentatif berdasar pada informasi akurat, pengetahuan ilmiah, pikiran autentik cemerlang, dan gagasan brilian (Hartanto, 2009); emosionalitas akan membuat kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan mampu membangun simpati, empati, motivasi, etos, pathos, kendali-diri, semangat, kesadaran-diri, dan pengaturan-diri di dalam organisasi (Channer dan Hope, 2001; Covey, 2005;

Goleman, 1999; Hartanto, 2009); dan adversitas akan membuat kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan “berdaya tahan dan bertahan banting”, yaitu bersedia menghadapi masalah, berani menciptakan tantangan ideal, berdaya tahan tinggi waktu menjalani beratnya masalah dan mencapai tantangan, dan mampu mengubah masalah menjadi peluang bagi kemajuan organisasi (Stoltz, 2011); serta ketubuhan yang oleh Kasali (2013) disebut *myelin* – akan membuat kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan cerdas membawa diri dan mengelola energi fisik secara tepat, optimal, efektif, dan efisien untuk menggerakkan dan memberdayakan organisasi (Covey, 2005; Gardner, 2011; Kasali, 2013). Mengikuti pandangan Berger dan Redding (2010), semua hal tersebut harus dapat ditransformasikan menjadi aset manusia dan modal manusia/modal insani [*human capital*] – yang *intangibles* dan tersembunyi – oleh kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan masa depan supaya dapat berguna bagi transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi.

Selain itu, keberadaan kepemimpinan perpustakaan masa depan juga terlekat oleh humanitas [kemanusiaan] sebab kepemimpinan perpustakaan masa depan diabdikan bagi terciptanya warga perpustakaan atau pemustaka sebagai manusia pada satu sisi dan pada sisi lain diabdikan bagi terwujud dan terlindunginya harkat dan martabat manusia. Implikasinya, dimensi terdalam kepemimpinan perpustakaan masa depan adalah realisasi humanitas demi terlindungi dan berkembangnya humanitas publik, warga atau masyarakat pada umumnya (Bate, 2011; UNDP, 2006). Otoritas dan legalitas kepemimpinan atau pemimpin perpustakaan sesungguhnya merupakan dimensi tengah dan terluar kepemimpinan perpustakaan sehingga harus selaras dengan humanitas. Selaras dengan Middleton (2007) dapat dikatakan bahwa perpustakaan masa depan yang penuh perubahan harus melampaui otoritas (*beyond authority*) agar efektif dan konstruktif mendukung pelayanan publik yang memuaskan warga, dalam hal ini mendukung pelayanan perpustakaan yang

memuaskan para pemustaka. Maka dari itu, otoritas dan legalitas kepemimpinan perpustakaan masa depan tidak boleh berbenturan dan bertentangan, apalagi mengalahkan humanitas hanya demi mempertahankan otoritas dan legalitas kepemimpinan perpustakaan. Hendaklah otoritas dan legalitas kepemimpinan perpustakaan masa depan diarahkan bagi terlindungi dan berkembangnya kemanusiaan dan keberadaban baik dalam organisasi maupun warga perpustakaan. Oleh karena itu, pada masa sekarang dan lebih-lebih pada masa depan, kepemimpinan perpustakaan masa depan perlu mengedepankan humanitas dengan disokong penuh oleh otoritas dan legalitas perpustakaan.

Dalam kepemimpinan—termasuk kepemimpinan perpustakaan masa depan—juga selalu melekat substansi *coaching* sehingga salah satu perbedaan mendasar antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin [baca: manajer] terletak pada ada tidaknya *coaching* dan ada tidaknya peran *coach*. Tidak mengherankan, Morgan (2005), Rachman dan Savitri (2012), dan Weiss & Kolberg (2003) menegaskan bahwa *coaching* adalah jantung kepemimpinan sehingga kemampuan melakukan *coaching* dan membangun budaya *coaching* merupakan kemampuan kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin merupakan seorang *coach* sekaligus seorang pembangun budaya *coaching*. Di sinilah efektivitas dan intensitas *coaching* menentukan efektivitas dan intensitas kepemimpinan perpustakaan. Oleh karena itu, dengan *coaching* efektif dan intensif, penemuan arah yang jelas, visi dan nilai-nilai bersama yang kuat, kreativitas dan inovasi yang tinggi, modal insani yang bermutu, dan humanitas yang mantap dalam sebuah organisasi perpustakaan niscaya dapat dicapai atau diwujudkan oleh pemimpin perpustakaan. Di samping itu, budaya mutu yang unggul dapat diwujudkan karena *coaching* mengandaikan pemimpin sebagai seorang kreator andal sekaligus pembangun budaya *coaching*. Lebih lanjut, dengan *coaching* yang efektif dan intensif, dapat dicapai pengembangan modal insani yang bermutu dalam organisasi termasuk organisasi perpustakaan perguruan tinggi pada masa

depan. Masa depan yang penuh turbulensi, disrupsi, *chaos* [kesemrawutan], dan perubahan tidak terduga jelaslah memerlukan kepemimpinan yang terlekat kapabilitas *coaching* yang efektivitas dan efektivitasnya kuat pada satu sisi dan pada sisi lain memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagai pembangun budaya *coaching* yang mantap di dalam organisasi. Dalam konteks kepemimpinan perpustakaan, pemimpin perpustakaan masa depan harus mampu menjadi seorang *coach* yang efektif sekaligus seorang pembangun budaya *coaching* yang andal supaya mampu melakukan transformasi masa depan perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan public, dalam hal ini pelayanan perpustakaan kepada pemustaka.

Berdasarkan redefinisi keberadaan kepemimpinan perpustakaan masa depan tersebut, selanjutnya dapat dilakukan konstruksi atau diformulasi karakteristik kepemimpinan perpustakaan masa depan yang secara konstruktif, efektif, dan efisien mampu mendukung dan menggerakkan transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi pada satu sisi dan pada sisi lain mampu memberdayakan perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik yang semakin kompleks dan pluralistik. Konstruksi atau formulasi karakteristik kepemimpinan perpustakaan masa depan yang dimaksud tampak pada perubahan atau pergeseran orientasi, posisi, peran dan fungsi, model atau teori, dan budaya kepemimpinan perpustakaan masa depan yang semua itu disebut *leadershift* oleh Gobillot (2009) dan Clayton (2004). Oleh sebab itu, berlandaskan redefinisi kepemimpinan perpustakaan masa depan tersebut harus dilakukan perubahan atau pergeseran orientasi kepemimpinan aparatur pemerintah: (i) dari orientasi kewenangan semata menjadi orientasi publik atau warga; (ii) dari orientasi vertikal menjadi orientasi horizontal-non-linier; (iii) dari orientasi patrimonial atau feodal-hierarkis menjadi orientasi demokratis; (iv) dari orientasi “birokrat atau pejabat” semata menjadi orientasi “pelayan warga”; (v) dari orientasi personal-tunggal menjadi orientasi tim kolaboratif, (vi) waktu

dan beban kerja menjadi orientasi kinerja; (vii) dari orientasi sebagai agen kestabilan perpustakaan menjadi agen perubahan birokrasi; (viii) dari orientasi sebagai penguasa menjadi orientasi sebagai pembelajar; (ix) dari orientasi kewenangan dan kekuasaan formal [*authority* dan *power*] semata menjadi orientasi pengakuan dan kepercayaan publik; dan (x) dari orientasi masa lalu dan masa kini menjadi orientasi masa depan.

Sesuai dengan orientasi baru tersebut, hendaklah pemimpin perpustakaan masa depan berfokus pada melayani publik atau warga perpustakaan daripada melayani pihak-pihak lain; mengabdikan kepada publik atau warga, tidak boleh mengabdikan kepada atasan semata [menjadi *servant leader*]; memiliki keterlibatan sangat tinggi bersama staf di dalam proses birokrasi, bukan malah menjaga jarak dengan staf dan proses perpustakaan [menjadi *engaged leader*]; menampilkan kecerdasan, kemampuan, dan kinerja lebih hebat dan tangguh daripada staf dalam menggerakkan dan memberdayakan perpustakaan perguruan tinggi untuk peningkatan mutu pelayanan kepada pemustaka [menjadi *superleader*]; bersedia, berkomitmen, dan mampu mengubah staf menjadi pemimpin di bidang tugas masing-masing [menjadi *transformational leader*]; mampu memberi imajinasi dan inspirasi kepada staf dan publik [menjadi *inspiring leader*]; bersedia dan mampu membangun kebersamaan dan kesahabatan [*partnering*] dengan seluruh staf dalam organisasi guna meningkatkan mutu pelayanan publik [menjadi *democratic leader*]; menempatkan diri sebagai pembelajar bersama-sama staf atau pengikut [menjadi *learning leader*]; dan memiliki keberanian dan kesanggupan melakukan perubahan organisasi perpustakaan demi peningkatan pelayanan publik [menjadi *change leader*]; serta senantiasa berpikir dan bertindak jauh ke masa depan secara strategis, bukan jangka pendek secara taktis saja [menjadi *visionary leaders* atau *strategic leaders*].

Pada masa sekarang dan lebih-lebih pada masa depan, kepemimpinan perpustakaan masa depan tidak bisa lagi diposisikan sebagai kepemimpinan birokratis, kepemimpinan

aristokratis yang serba menuntut pelayanan, kepemimpinan hierarkis yang memandang organisasi bertingkat-tingkat, dan kepemimpinan personal yang melakukan personalisasi organisasi, apalagi kepemimpinan politis yang mengutamakan pertimbangan politis dalam organisasi perpustakaan dan pelayanan. Demi masa depan perpustakaan perguruan tinggi Indonesia, sesuai orientasi kepemimpinan yang dikemukakan di atas, kepemimpinan perpustakaan masa depan perlu ditempatkan atau diposisikan sebagai (i) kepemimpinan publik, (ii) kepemimpinan demokratis, (iii) kepemimpinan pelayanan, (iv) kepemimpinan perubahan, (v) kepemimpinan istimewa sekaligus kepemimpinan transformasional (vi) kepemimpinan terlibat dalam semua lini tugas [*engaged leadership*], (vii) kepemimpinan kolaboratif, (viii), kepemimpinan pembelajaran, (ix) kepemimpinan inovatif, dan (x) kepemimpinan visioner. Di samping itu, masa depan perpustakaan Indonesia juga memerlukan kepemimpinan horizontal, bukan hierarkis. Dengan kepemimpinan seperti tersebut, transformasi masa depan perpustakaan dan peningkatan pelayanan publik (baca: pelayanan perpustakaan) akan dapat digerakkan demi tercapainya visi, misi, dan tujuan perpustakaan masa depan Indonesia sekaligus dapat dibuka ruang terang bagi masa depan perpustakaan Indonesia khususnya perpustakaan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, J. E. (2005). *How to grow leaders: The seven key principles of effective leadership development*. Kogan Page Publishers.
- Adair, J. E. (2007). *Leadership for innovation: How to organize team creativity and harvest ideas*. Kogan Page Publishers.
- Basuki, S. (2008). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Bate, J. (Ed.). (2011). *The public value of the humanities*. A&C Black.
- Berger, P. L., & Redding, S. G. (Eds.). (2010). *The hidden form of capital: Spiritual influences in societal progress*. Anthem Press.
- Bounfour, A., & Edvinsson, L. (2005). A public policy perspective on intellectual capital. *Perspectives on intellectual capital*, Elsevier, Oxford.
- Channer, P., & Hope, T. (2001). The emotionally intelligent leader. In *Emotional Impact* (pp. 25-26). Palgrave Macmillan, London.
- Clegg, S. R., Courpasson, D., & Phillips, N. (2006). *Power and organizations*. Sage.
- Covey, S. R. (2005). Four Traits of Great Leaders: Find your special role and purpose. *Leadership Excellence*, 22(11), 4.
- El-Meligi, A. M. (2005). *Leading Starts in the Mind*. World Scientific.
- Fernandez-Armesto, F. (2009). History beyond History: New Adventurers on the Frontiers of Traditional Historiography. A Review Essay. *Comparative Studies in Society and History*, 51(1), 212-219.
- Fitton, A., Goodman, D. M., & O'Connor, E. (2007). *Worldviews: Contact and Change*. Pearson Education Canada.
- Gardner, H. E. (2011). *Leading minds: An anatomy of leadership*. Basic Books.
- Goethals, F. (2009). The unified business model framework. *Little Economie & Management*, 9, 1-47.
- Goleman, D. (1999). What makes a leader?. *Clinical laboratory management review: official publication of the Clinical*

- Laboratory Management Association*, 13(3), 123-131.
- Griffin, J. (2009). *On human rights*. OUP Oxford.
- Hall, T., & Yarhi-Milo, K. (2012). The personal touch: Leaders' impressions, costly signaling, and assessments of sincerity in international affairs. *International Studies Quarterly*, 56(3), 560-573.
- Hartanto, F. M. (2009). *Paradigma baru manajemen Indonesia: menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebajikan dan potensi insani*. PT Mizan Publika.
- Hendrawan, S. (2009). *Spiritual Management*. PT Mizan Publika.
- Huse, M., & Gabrielsson, J. (2012). Board leadership and value creation: An extended team production approach. *The SAGE handbook of corporate governance*, 233-253.
- Kasali, R. (2013). *MYELIN*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, E. P. D. T. (2008). Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia. *Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*. Dalam http://staff.ui.ac.id/internal/0900300014/publikasi/ReformasiBirokrasi_dan_GoodGovernance_EP_TK_reviseed.pdf.
- Lojeski, K. S. (2009). *Leading the virtual workforce: How great leaders transform organizations in the 21st century*. John Wiley & Sons.
- Middleton, M. (2003). Skills expectations of library graduates. *New Library World*.
- Milner, E., & Joyce, P. (2005). *Lessons In Leadership: Meeting The Challenges Of Public Services Management*. by Routledge 2 Park Square. *Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN*.
- Morgan, J. (2005). Global trends in candidemia: review of reports from 1995–2005. *Current infectious disease reports*, 7(6), 429-439.
- Murphy, S. E., & Riggio, R. E. (2003). Introduction to the future of leadership development. In *The future of leadership development* (pp. 27-34). Psychology Press.
- Pendleton, D., & Furnham, A. (2012). The impact of personality

- on leadership. In *Leadership: All You Need To Know* (pp. 135-154). Palgrave Macmillan, London.
- Rachman, E., & Savitri, S. (2012). Berubah Kok Susah.
- Rost, J. C. (1993). Leadership development in the new millennium. *Journal of Leadership Studies*, 1(1), 91-110.
- Verschuur, C. (2009). Modeling the effect of channel number and interaction on consonant recognition in a cochlear implant peak-picking strategy. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 125(3), 1723-1736.
- Weiss, T., & Kolberg, S. (2003). *Coaching competencies and corporate leadership*. CRC Press.

BAB 7

CARA PENGUKURAN KINERJA PUSTAKAWAN

Oleh Fitri Handayani, M.A.

7.1 Pendahuluan

Layanan perpustakaan mengalami perubahan yang sangat cepat dalam dua puluh tahun terakhir. Saat ini, sumber daya elektronik, jaringan, dan *World Wide Web* mewakili sebagian besar layanan perpustakaan dan informasi. Perpustakaan akademik “juga harus dapat menunjukkan nilai dari apa yang mereka lakukan dan memberikan bukti dampak yang mereka buat”, sehingga penting untuk menggunakan metode untuk menemukan data penilaian. Pustakawan harus menjadi staf pengelola informasi dalam beberapa dukungan, dan kegiatan teknis untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas . Layanan berkualitas berarti sumber daya dan layanan yang memenuhi harapan pengguna atau pemustaka. Dalam hal ini tentunya pustakawan dituntut untuk memiliki kompetensi agar dapat memajukan perpustakaan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pustakawan dapat memperoleh angka kredit yakni penilaian angka berdasarkan prestasi kerja saat pustakawan melaksanakan kegiatan yang menjadi butir-butir penilaian sebagai pemenuhan syarat pengangkatan dan kenaikan pangkat atau jabatan. Penilaian prestasi kerja pustakawan dapat dilakukan dan diukur setelah adanya evolusi. Secara historis, pengukuran kinerja di perpustakaan terbatas pada pelacakan sumber daya yang masuk (*input*) perpustakaan terhadap *output* statistik yang diperoleh dengan mengukur layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, studi evaluasi berbasis hasil telah muncul untuk mencoba melacak, secara statistik, layanan nilai tambah yang diberikan perpustakaan kepada penggunaanya.

7.2 Pengukuran Kinerja Pustakawan

Pengukuran kinerja adalah proses menciptakan indikator terukur yang dapat dilacak secara sistematis untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memperoleh tujuan yang telah ditentukan (GAO). Pada perpustakaan pengukuran kinerja dapat membantu membuktikan tingkat keberhasilan yang dicapai perpustakaan dalam memenuhi misi dan tujuan Perpustakaan.

Kinerja pustakawan menjadi penting karena menentukan pelayanan yang prima dari perpustakaan. Menurut Riniwati (2016), kinerja mengacu pada bagaimana atau sejauh mana seorang individu memberikan kontribusi terhadap kinerja pekerjaan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan yang diinginkan, dalam hal ini berkaitan dengan peran individu tersebut, dengan menitikberatkan pada tercapai atau tidaknya Kompensasi. diberikan proporsional atau relevan dengan organisasi. Kutipan tersebut jelas menunjukkan bahwa kinerja karyawan akan berdampak langsung pada organisasi. Begitu juga dengan perilaku pustakawan dapat berdampak pada kelangsungan layanan perpustakaan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, citra atau masa depan perpustakaan akan memburuk seiring dengan menurunnya kinerja pustakawan. Indikator kinerja digunakan untuk alat perencanaan dan evaluasi, memiliki beberapa sasaran utama yaitu (Purnomowati, 2000):

1. sebuah kontrol atau pengawasan proses manajemen;
2. dasar rujukan dan diskusi bagi staf, lembaga induk dan pemustaka dan
3. menjadi perbandingan kinerja bagi beberapa perpustakaan dan jasa informasi yang memiliki visi dan misi yang hampir sama.

Pada perpustakaan pengukuran kinerja juga dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan sebagai berikut (Yusrawati, 2016):

1. Perwujudan pertanggung jawaban finansial bagi pemerintah.

2. Staf perpustakaan dapat mengetahui prestasi yang mereka miliki, mengetahui apa yang harus ditingkat serta untuk mengetahui berapa finansial yang harus dibutuhkan.

Bahrudin (2020), juga memaparkan bahwa dalam menentukan indikator kinerja yang tepat, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain; Akankah indikator kinerja membantu mengelola perpustakaan, lembaga pendanaan, dan populasi yang dilayani? Apakah pustakawan mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perpustakaan mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya? Bagaimana tingkat upaya staf perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai indikator kinerja tertentu? Di sisi lain, pengembangan indikator kinerja tertentu membutuhkan waktu dan sumber daya lain yang tepat, termasuk pengetahuan tentang statistik. Apakah pihak ketiga memerlukan pelaporan data di area layanan tertentu? Jika demikian, perlu diputuskan apakah data yang sama juga dapat digunakan untuk menghasilkan pencapaian indikator kinerja tertentu.

7.2.1 Jenis Pengukuran

Pada pengukuran kinerja terdapat beberapa aspek yang akan diukur, yakni: biaya *input*, *output* (luaran), efektivitas dan ekstensivitas (Purnomowati, 2000).

1. Pengukuran Biaya *Input*

Input perpustakaan merupakan sumberdaya yang telah disediakan serta dapat digunakan dalam mendukung jasa dan produk perpustakaan. Hal ini dapat diukur dalam bentuk; staf, peralatan, sistem, koleksi, gaji, komunikasi, pembelian koleksi, pengolahan koleksi, dan sebagainya.

2. Pengukuran *output* (luaran)

Output (skor) adalah skor yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (kontribusi), contoh layanan peminjaman, layanan fotokopi, dan sebagainya. Produk (hasil) dapat diukur tidak hanya dari jumlah layanan yang

dihasilkan, tetapi juga dengan isu-isu terkait seperti: kualitas produk, ketepatan waktu layanan, ketersediaan dan kemudahan akses. Jumlah hasil, misalnya: jumlah persewaan, jumlah permintaan pencarian, jumlah fotokopi, sedangkan kualitas hasil dapat berupa: relevansi himpunan, ketepatan jawaban, relevansi dari hasil pencarian. Ketepatan waktu pelayanan, misalnya: waktu tunggu proses persewaan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencarian atau fotokopi. Ketersediaan layanan dapat dinyatakan dalam bentuk: jumlah jam buka perpustakaan, jangka waktu pinjaman, jumlah karyawan yang tersedia, dan sekaligus kemudahan akses, misalnya: jarak antara layanan dan fisik. pengguna atau waktu, persentase koleksi yang dapat dipinjam, proporsi koleksi yang salah susun, proporsi koleksi yang dapat langsung digunakan pemakai dan lain-lain.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas sebuah perpustakaan yang dilihat dari pandangan pemakai. Hal ini dapat diukur dari kepuasan serta jumlah jasa yang dipergunakan sang pemustaka yakni dilihat dari kunjungan, jumlah pemustaka, permintaan, sirkulasi; serta kepuasan pemustaka akan jasa layanan seperti kualitas, keakuratan dan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses bahan pustaka. Efektivitas juga mencakup seberapa penting bagi pemustaka mengenai: ketersediaan bahan pustaka yang dibutuhkan, kemudahan untuk mengaksesnya, kedalaman serta cakupan, serta adanya manfaat yang dirasakan pemustaka dalam menggunakan layanan tersebut. Adapun untuk melihat tingkat ekstensivitas dampak sebuah perpustakaan dapat diukur atau dinilai dari ekstensivitas jasa atau bagaimana jasa yang ada pada perpustakaan bisa menembus pasar yakni dilihat dari jumlah dan profit target sasaran pemustaka yang dicapai baik dilihat dari jenis pekerjaannya, umur pemustaka atau masyarakat, jenis

kelamin, geografi, bahasa, dan jenis informasi yang dibutuhkan.

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara (Wibowo, 2016):

1. Terpenuhinya kebutuhan atau syarat yang diberikan oleh pemakai
2. Standar kinerja yang bagus agar dapat menciptakan perbandingan
3. Adanya pemantauan terhadap kinerja
4. Mementingkan adanya kualitas dan ada nya prioritas
5. Mengusahakan tidak adanya konsekuensi dari kualitas yang rendah
6. Adanya pertimbangan terhadap sumber daya
7. Mengusahakan adanya perbaikan kinerja sebagai umpan balik .

Evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai evaluatif terhadap perilaku atau pencapaian seseorang menjadi dasar dalam keputusan dan rencana pengembangan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap sebuah kemajuan kegiatan yang mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran dari sebuah organisasi, hal ini juga mencakup efektivitas serta efisiensi dari penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, kualitas, hasil kegiatan yang dapat dibandingkan dengan target, serta efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan. Penilaian pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menilai hasil kinerja (*performance outcome*) atau perilaku (*personality*). Adapun penilaian tersebut terdiri atas tiga penilaian, yaitu perilaku (*proses*), *output* (produk langsung suatu aktivitas program), dan *outcome* (*value added* atau dampak aktivitas atau program).

Mahmudi (2005) mengatakan bahwa adapun tujuan dari pengukuran kinerja adalah (1) mengetahui sejauh mana capaian tujuan dari organisasi, (2) sebagai alat pembelajaran pegawai, (3) referensi atau rujukan untuk perbaikan kinerja

berikutnya, (4) sebagai referensi bagi keputusan dalam memutuskan *reward* dan *punishment* bagi pegawai, (5) memotivasi pegawai, (6) membangun akuntabilitas publik.

7.2.2 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. McAshan dalam Sutrisno (2011) juga mengemukakan kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki dan merupakan bagian dari dirinya, serta dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik sebaik mungkin. Undang-undang perpustakaan nomer 43 tahun 2007 mendefinisikan pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi tentang kepustakawanan baik diperoleh dari pendidikan atau pelatihan serta bertanggung jawab pada pengolahan dan layanan perpustakaan. Kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan sangat berkaitan dengan kinerja yang dimilikinya. Muheriono (2012) mengatakan bahwa kompetensi pustakawan dengan kinerja yang dimiliki oleh pustakawan tersebut harus ada relevansinya dan merupakan hal yang sangat penting. Pustakawan dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya (*the right man the right job*).

Karakteristik Kompetensi Pustakawan

Spencer dalam Prihadi (2004) mengemukakan bahwa adanya lima karakteristik dari kompetensi, yaitu :

1. Motif (*motive*) adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan.
2. Sifat (*traits*) adalah respon seseorang secara karakteristik fisik terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*Self – Concept*) adalah sikap atau karakter yang sudah dimiliki oleh seseorang.
4. Pengetahuan (*Knowledge*), adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang baik informasi terhadap suatu bidang tertentu atau sebuah kompetensi yang kompleks.

5. Keterampilan (*Skill*). kemampuan dalam melaksanakan suatu tugas baik dari segi fisik maupun mental.

Kompetensi adalah hal yang harus dimiliki seorang pustakawan. Beberapa jenis kompetensi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pustakawan yaitu (Wicaksono, 2004):

- a. Manajemen Informasi

Keahlian pustakawan dalam mengorganisir data untuk disediakan bagi pemustaka yang disebut dengan *task achievement* yaitu kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik, serta berorientasi pada hasil, mengelola kinerja, pengaruhi, inisiatif, inovasi serta kemampuan teknis atau gagasan.

- b. Interpersonal

Keahlian pustakawan yang berkaitan dengan adanya keahlian komunikasi baik dengan pengguna seperti berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. Secara universal kompetensi disebut dengan keahlian *relationship* yaitu berhubungan dengan metode komunikasi agar bekerja dengan baik serta memuaskan kebutuhan pemustaka. Kompetensi *relationship* berkaitan tentang kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar individu, serta penyelesaian konflik.

- c. Teknologi Informasi

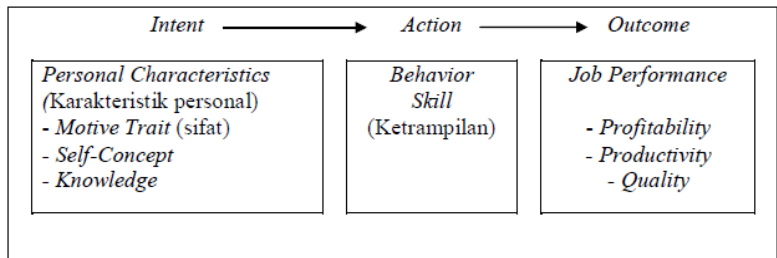
Keahlian pustakawan dalam memanfaatkan berbagai macam fitur teknologi informasi dalam pengerjaan tugas atau pekerjaan yang disebut dengan *transfer skill* yaitu keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan area kerja baru.

- d. Manajemen

Keahlian pustakawan untuk mengerjakan aktivitas manajemen administrasi di Perpustakaan atau keterampilan untuk melaksanakan tugas- tugas sesuai dengan aturan yang ada yang disebut dengan *task achievement* yaitu jenis kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik.

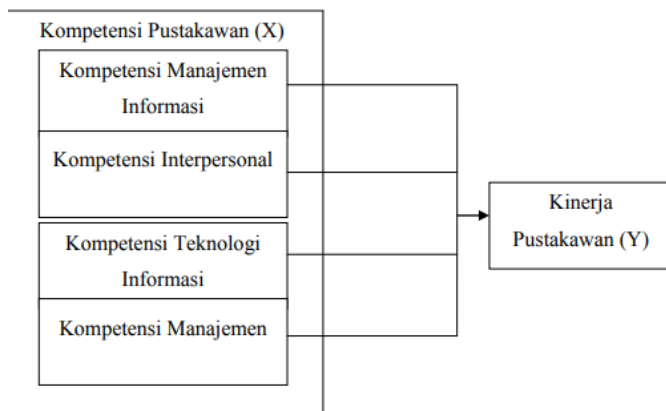
Kompetensi yang berkaitan dengan kinerja dalam suatu model alur sebab-akibat yang menampilkan tujuan, sikap, konsep diri, serta kompetensi pengetahuan yang selanjutnya mengukur kinerja kompetensi mencakup niat, aksi serta hasil akhir. Misalnya, motivasi berprestasi, kemauan kokoh melakukan lebih baik dari pada standar yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal, menampilkan sikap penentuan tujuan dan bertanggung jawab atas hasil akhir yang telah diperhitungkan.

Hal tersebut tergambar pada tabel kompetensi dan kinerja sebagai berikut:



Sumber: Spencer & Spencer dalam Palan, 2007.

Berdasarkan alur gambar di atas dapat disimpulkan pengetahuan dan keterampilan personal kompetensi pustakawan hal utama yang harus dikembangkan guna meningkatkan kinerja. Selanjutnya organisasi juga harus menciptakan serta mengembangkan motivasi untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kompetensi dari seorang pustakawan akan berpengaruh terhadap kinerja pustakawan tersebut. Adanya kompetensi yang tidak bagus atau kurang dari pustakawan akan mengakibatkan terhambatnya tujuan dari perpustakaan. Secara sederhana adanya hubungan kompetensi pustakawan dengan kinerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Adaptasi teori Wicaksono (2004) dan teori Spencer dalam Palan (2007).

Dari adaptasi teori berdasarkan gambar di atas dapat kompetensi pustakawan terbagi atas: kompetensi pustakawan kompetensi manajemen informasi, kompetensi interpersonal, kompetensi teknologi informasi dan kompetensi manajemen merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pustakawan.

7.3 Penilaian Angka Kredit Pustakawan

Angka kredit merupakan nilai angka yang diberikan atas prestasi yang dicapai oleh seorang pustakawan dalam melaksanakan butiran-butiran tugas sebagai pemenuhan standar pengangkatan serta kenaikan pangkat atau jabatan. Butir kegiatan (pustakawan) merupakan penjelasan dari setiap kegiatan yang telah dirincikan pada lampiran KEPMENPAN No.132/KEP/M.PAN/12/2002 mengenai kegiatan pustakawan. Adapun angka Kredit Kumulatif digunakan menilai Kenaikan Jabatan atau Pangkat pustakawan dengan nilai minimal 80%. AK didapatkan dari unsur utama dan maksimum serta 20% AK berasal dari unsur penunjang yang diberikan dalam bentuk Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

DUPAK adalah daftar usulan yang terdiri dari prestasi kerja seorang pustakawan yang diusulkan menggunakan angka kredit dalam jangka waktu tertentu. DUPAK tersebut

diserahkan dan akan dinilai oleh sekretariat tim penilai, untuk pemeriksaan administrasi dan kebenaran DUPAK. Hasil dari penilaian tim penilai akan dirapatkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan dalam menentukan angka kredit DUPAK melalui pemungutan suara dengan ketentuan jumlah anggota tim penilai yang hadir paling sedikit setengah tambah satu dari jumlah anggota tim penilai (Yusrawati, 2016).

7.3.1 Evaluasi Kinerja Pustakawan melalui ISO

Evaluasi kinerja pustakawan dalam organisasi perpustakaan bertujuan untuk melihat kinerja yang dihasilkan pustakawan dalam mencapai tujuan perpustakaan. Adanya perkembangan teknologi informasi mengakibatkan pustakawan harus meningkatkan kompetensi untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai dengan baik, agar tingkat kesenjangan dalam menjalankan tugas dapat diatasi dengan mempertimbangkan aspek kompetensi yang dimiliki pustakawan dalam meningkatkan kinerjanya. Evaluasi kinerja pustakawan dapat diukur dengan menggunakan beberapa standar seperti ISO atau PAK.

International Organization for Standardization disingkat ISO dalam sudut pandang pengelolaan Perpustakaan adalah standar internasional menyangkut bidang manajemen mutu kegiatan produksi barang atau jasa layanan perpustakaan termasuk kualitas layanan kepada pemustaka yang berdasarkan manajemen mutu internasional.

Standar ISO disetujui secara internasional oleh para ahli sebagai formula yang menggambarkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu mengenai membuat produk, mengelola proses, memberikan layanan atau memasok bahan-standar mencakup berbagai macam kegiatan. Standar adalah kebijaksanaan yang disaring dari orang-orang dengan keahlian dalam materi pelajaran dan yang mengetahui kebutuhan organisasi yang mereka wakili, sumberdaya manusia seperti produsen, penjual, pembeli, pelanggan, asosiasi perdagangan, pengguna, atau regulator. Perpustakaan sebagai sebuah lembaga pengolah, penyedia, dan pendistribusian informasi,

saat ini dituntut untuk memberikan layanan prima kepada pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan demikian perkembangan di dunia perpustakaan, khususnya perkembangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, maka ISO 11620:1998 direvisi menjadi ISO:11620:2008. Penilaian ISO 9001:2008 tidak memberikan penilaian pada gedung perpustakaan melainkan manajemen sistem yang dimiliki perpustakaan tersebut. Salah satunya dapat dicapai melalui implementasi *the total quality management* seperti penyusunan standard operasional layanan (SOP), penataan koleksi, ruangan, sarana, dan SDM.

Daftar dan deskripsi indikator kinerja juga dirangkum. ISO 11620:2008 memberikan terminologi standar dan definisi singkat dari indikator kinerja. Selanjutnya, ISO 11620:2008 berisi deskripsi singkat tentang indikator kinerja dan pengumpulan serta analisis data yang diperlukan. ISO 11620:2008 berlaku untuk semua jenis perpustakaan di semua negara. Namun, tidak semua indikator kinerja berlaku untuk semua perpustakaan. Batasan penerapan indikator kinerja individu juga dicantumkan untuk setiap indikator kinerja. ISO 11620:2008 tidak menentukan indikator kinerja untuk semua layanan, kegiatan, dan penggunaan sumber daya perpustakaan, baik karena indikator kinerja tersebut belum diusulkan dan diuji pada saat perumusan ISO 11620:2008, atau karena memang demikian. tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.

Tidak hanya PAK, ISO 11620- 1998 yang saat ini sudah diperbarui dengan ISO 11620-2008 diimplementasikan pada bibliotek dalam taraf pengembangan dini, misalnya penataan Standar Operasional Pelayanan(SOP), penyusunan koleksi, ruangan, fasilitas, serta sumber energi manusia dalam perihal ini pustakawan. Dalam evaluasi ini pustakawan diharuskan melaksanakan butir-butir aktivitas kepustakawanan cocok dengan penataan rencana operasional pustakawan. Standar kinerja pustakawan mempunyai 11 jenis pengukuran yaitu: (1) Akses informasi gratis, (2) Informasi sebagai komoditas, perpustakaan yang dapat digunakan bersama, (4) Sektor

perpustakaan dan informasi: pengetahuan inti, keterampilan dan atribut, (5) Penunjukan layanan perpustakaan dan informasi, (6) Perpustakaan dan pedoman privasi, (7) Pekerjaan non-standar, (8) Perilaku profesional, (9) Layanan perpustakaan umum, (10) Peran dan tanggung jawab pemberi kerja dalam pendidikan dan pengembangan profesional, (11) Staf perpustakaan senior dan penunjukan layanan informasi .

7.3.2 Evaluasi standar kinerja berdasarkan PAK

Undang- undang No 43 Tahun 2007, mengatakan pustakawan merupakan seorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh baik pembelajaran serta/ ataupun pelatihan kepustakawanan dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan serta pelayanan pustaka. Wujud penghargaan atas kinerja yang dicapai pustakawan merupakan peningkatan jabatan ataupun pangkat. Peningkatan pangkat tersebut membutuhkan kinerja yang bagus ataupun prestasi kerja. Prestasi kerja pustakawan merupakan hasil kerja pustakawan yang dalam beberapa waktu tertentu berdasarkan surat tugas, kemudian melakukan proses pengusulan, pengecekan serta evaluasi oleh tim penilai dengan ketentuan yang berlaku serta penetapan PAK oleh pejabat yang berwenang. Prestasi kerja pustakawan ini bisa dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan dalam kegiatan pembinaan, peningkatan pangkat atau jabatan serta pengembangan karir pustakawan.

Adapun syarat- syarat yang wajib dipenuhi dalam pengukuran kinerja yakni (Mutia, 2009):

1. Tertentu serta jelas guna menjauhi kesalahan interpretasi.
2. Bisa diukur secara obyektif baik secara kualitatif ataupun kuantitatif.
3. Menanggulangi aspek- aspek yang relevan.
4. Wajib berarti bermanfaat guna menampilkan keberhasilan input, output, hasil/ outcome, khasiat ataupun akibat dan proses.

5. Fleksibel serta sensitif terhadap transformasi penerapan.
6. Efisien, dalam makna informasinya gampang diperoleh, diolah, dianalisis dengan anggaran yang ada.

Selain syarat pengukuran kinerja di atas pustakawan juga harus memiliki sikap profesionalisme agar kinerja yang dilakukan dapat diisikan pada PAK dimana pustakawan dapat bekerja mandiri dengan keahlian yang dimiliki dan dapat meningkatkan kreativitas dalam pekerjaannya dapat menciptakan sebuah karya sebagai pengembangan kompetensi yang dimilikinya. Dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya, pustakawan memerlukan apresiasi yang bertujuan memberikan dorongan atau semangat motivasi bagi pustakawan untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. PAK memiliki tujuan untuk memberikan apresiasi kinerja profesionalisme pustakawan, khususnya pustakawan Pegawai Negeri Sipil, dan pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2013 bertepatan pada 12 Nopember 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (Yusrawati, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Kompasiana. "Menentukan Indikator Kinerja Perpustakaan dengan SNI ISO 11620:2014. Diakses pada tanggal 5 April 2022, pada <https://www.kompasiana.com>.
- Mahmudi (2005) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Muheriono (2012) *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Grafindo.
- Priyadi, S. F. (2004) *Assessment Centre: Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purnomowati, S. (2000) 'Mengukur kinerja perpustakaan', *Baca*, 25(3-4).
- Riniwati, H (2016) *Manajemen Sumberdaya Manusia. Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: UB Press.
- Wibowo (2016) *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wicaksono, H. (2004) 'Kompetensi Perpustakaan dan Pustakawan dalam Implementasi Teknologi Informasi di Perpustakaan', *Visi Pustaka*, 6(2).
- Yusrawati (2016) 'Evaluasi Kinerja Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Melalui Standar PAK dan ISO 11620-1998', *Libria*, 8(1).

BAB 8

LAYANAN SIRKULASI DAN REFERENSI

Oleh Elva Rahmah, S.Sos, M.I.Kom.

8.1 Pendahuluan

Layanan perpustakaan berkembang dari waktu ke waktu, meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka. Awalnya, layanan perpustakaan berarti menyediakan semua bahan perpustakaan bagi pelanggan yang datang ke perpustakaan dan menanyakan informasi yang mereka inginkan. Perpustakaan tidak aktif pada saat itu. Perpustakaan saat ini terlibat atau proaktif dalam menawarkan semua jenis koleksi kepada komunitas yang mereka layani. Selain itu, perpustakaan menyiapkan segala jenis informasi yang dibutuhkan serta layanan temu kembali informasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna.

Layanan adalah kegiatan yang secara langsung terkait dengan pemustaka dan pada saat yang sama, berfungsi sebagai ukuran keberhasilan perpustakaan. Pemustaka dapat merasa senang dan puas ketika mendapatkan pelayanan yang baik. Tujuan dari layanan perpustakaan adalah untuk memastikan bahwa pemustaka puas dengan informasi yang diberikan oleh pustakawan. Bab ini dimulai dengan layanan sirkulasi dan layanan referensi. Berikut ini adalah tujuan utama di mana pembaca dapat memahami layanan sirkulasi dan pembaca juga dapat menjelaskan layanan referensi di bagian berikutnya.

8.2 Layanan Sirkulasi

Peminjaman, pengembalian, perpanjangan peminjaman, dan pemesanan bahan pustaka semuanya ditangani oleh layanan sirkulasi perpustakaan. Selain itu, juga memberikan konsekuensi jika pemustaka melanggar peraturan

perpustakaan dan melakukan kegiatan lain yang relevan. Semua tugas ini dapat diselesaikan secara manual atau dengan bantuan komputer.

8.2.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Layanan Sirkulasi

Layanan sirkulasi adalah istilah luas yang mengacu pada berbagai operasi yang berkaitan dengan melayani kebutuhan pemustaka, termasuk tidak hanya peminjaman tetapi juga pengembalian dan perpanjangan waktu peminjaman koleksi, serta pengumpulan data statistik perpustakaan (Rochmah, 2016). Sirkulasi, juga disebut layanan pinjam meminjam, telah berubah sangat pesat dalam dekade terakhir dan kadang-kadang telah digabungkan dengan unit lain menjadi unit yang lebih besar yang disebut layanan akses, layanan publik, atau dalam beberapa situasi, layanan pengguna (Su, 2008). Menurut Bafadal (dalam Luthfiyah, 2020) menjelaskan tanggung jawab utama bagian sirkulasi adalah melayani peminjaman koleksi, pengembalian, dan statistik pengunjung.

Tujuan layanan sirkulasi perpustakaan adalah membantu mempermudah dan memperlancar proses peminjaman koleksi, melayani pengembalian atau kebutuhan pemustaka. Fungsi dari layanan sirkulasi adalah untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang melibatkan pengguna perpustakaan di ruang sirkulasi agar layanan berjalan dengan lancar, mudah, aman, dan nyaman, serta pengguna perpustakaan tertarik untuk mengunjungi dan meminjam koleksi perpustakaan.

8.2.2 Peraturan dan Tata Tertib Layanan Sirkulasi

Peraturan dan tata tertib layanan dibuat untuk pedoman bagi pustakawan dan pemustaka. Tujuan penyusunan peraturan dan tata tertib untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Isi peraturan dan regulasi layanan setiap perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Berikut ini adalah isi umum dari peraturan tersebut.

1. Keanggotaan, berkaitan dengan penjelasan persyaratan menjadi anggota perpustakaan

2. Jam buka layanan, berkaitan dengan ketentuan mulai dibukanya jam layanan dan jam tutup layanan
3. Ketentuan peminjaman, mulai dari jangka waktu dan jumlah buku yang dipinjam dengan mempertimbangkan keadaan koleksi dan pemustaka. Peraturan ini juga merinci jumlah buku yang boleh dipinjam, jangka waktu peminjaman, serta apakah peminjaman boleh diperpanjang dan kalau boleh berapa lama waktunya
4. Sanksi, harus dinyatakan dengan jelas terutama berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

8.2.3 Sistem Pelayanan Layanan Sirkulasi

Beberapa sistem peminjaman dikenal dengan sistem layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian sumber daya perpustakaan).

1. Sistem Buku Besar

Sistem buku besar ini merupakan pendekatan register di mana dalam setiap peminjam mendapat bagian satu halaman dalam buku besar. Halaman tersebut terdapat kolom nama peminjam, nomor induk, alamat, pengarang, judul, nomor panggil buku (nomor klasifikasi buku), tanggal peminjaman, tanggal kembali dan tanda tangan peminjam.

Tabel 9.1. Sistem Buku Besar

Nama Anggota :						
No. Induk :						
Alamat :						
No.	Pengarang	Judul Buku	No. Buku	Tgl. Pinjam	Tgl. kembali	Tanda Tangan
1.						
2.						
Dst						

2. Sistem Browne

Sistem Browne di mana setiap anggota perpustakaan mendapat tiket peminjaman. Setiap pemustaka yang mau meminjam buku harus membawa tiket ini. Pemustaka bisa meminjam buku sesuai dengan jumlah tiket yang

dimilikinya. Biasa jumlah tiket yang dimiliki pemustaka berbeda-beda masing perpustakaan tergantung kepada jumlah koleksi dan jumlah anggota perpustakaan masing-masing, tetapi yang biasanya ada 3 (tiga) tiket, 4 (empat) tiket dan 5 (lima) tiket. Tiket peminjaman tersebut berisi informasi, nama, nomor anggota, dan alamat anggota. Biasanya tiket ini berbentuk kantong.

3. Sistem Newark

Pemustaka diberikan kartu pinjaman dalam sistem ini. Nomor registrasi, nama, alamat, masa berlaku, tanda tangan anggota, kolom nomor pemanggilan buku, dan kolom tanggal pengembalian semuanya terdapat pada kartu ini. Kartu harus dibawa setiap kali anggota meminjam atau mengembalikan buku.

4. Sistem Sulih (*Dummy*)

Pada saat peminjaman buku, sistem sulih menggunakan salinan karton sebagai pengganti aslinya. Nama peminjam, nomor telepon, dan tanggal pinjaman semuanya tercantum pada lembar kertas yang ditempatkan di Sulih tersebut.

5. Sistem *No Carbon Required* (NCR)

Sistem NCR menyediakan formulir yang harus diisi oleh peminjam. Nama, alamat, penulis, judul, dan nomor klasifikasi ditulis dalam formulir. Formulir pinjaman ini dicetak di atas kertas khusus yang memungkinkan penyalinan langsung tanpa perlu karbon.

6. Sistem *Book Issue Card* (BIC)

Sistem peminjaman dengan menggunakan kartu berukuran 7,5 cm x 12,5 cm. Dalam sistem ini terdapat dua versi. Pada sistem pertama, bagian atas kartu tertulis kata pengarang dan judul, dan bagian bawahnya tertulis kolom tanggal dan peminjam.

7. Sistem Islington (Variasi Brown)

Mesin pencetak huruf timbul, kartu plastik, klip kertas, label tanggal, kantong buku, dan kartu buku semuanya diperlukan untuk sistem ini. Setiap peserta menerima kartu plastik dengan nama dan alamat mereka di

bagian depan. Prosedur peminjaman sama dengan Sistem Brown, kecuali peminjam harus menggunakan alat cetak khusus untuk membubuhkan kartu anggota pada kartu buku. Alat ini menekan kartu plastik ke kartu buku, sehingga nama peminjam muncul di kartu buku.

8. *Token Charging*

Sebuah kartu digunakan dalam sistem ini. Setiap anggota menerima kartu keanggotaan satu tahun. Token adalah kartu karton berukuran 4x6 cm atau lebih besar yang memiliki identitas perpustakaan.

9. Sistem Kartu Tebu (*Punched Card*)

Pemustaka menerima kartu anggota dari plastik, kartu tebu, dua kartu untuk setiap buku yang dipinjam, dan kantong buku untuk setiap buku yang dipinjam di bawah sistem kartu tebu, yang membutuhkan peralatan komputer dan mesin tebu otomatis.

10. *Photocharging* Berbasis Sistem Foto

Mesin photocharging, komputer, alat baca mikrofilm, kartu keanggotaan, dan kartu transaksi semuanya diperlukan dalam sistem ini. Satu set biasanya mencakup banyak warna, kantong buku, dan label pada setiap buku. Nomor induk, penulis, dan judul semuanya ditampilkan pada label ini, tetapi tidak ada kolom untuk tanggal.

11. Sistem Peminjaman Berbantuan Komputer

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi berdampak positif terhadap sistem peminjaman bahan pustaka dengan bantuan komputer digunakan sebagai alat pencatat peminjaman dan pengembalian koleksi. Sistem ini menyediakan berbagai fasilitas seperti pencarian data peminjaman, pembuatan surat tagihan keterlambatan pemustaka, penghitungan jumlah peminjaman, penelusuran informasi, dan memasukan dan mengedit data anggota dan koleksi. Petugas bagian sirkulasi hanya dengan mengetik nomor identitas pemustaka dan nomor registrasi buku pada *keyboard* maupun dengan sistem *barcode reader scanner* setiap transaksi.

8.3 Layanan Referensi

Proses komunikasi antara pemustaka dan pustakawan dikenal sebagai layanan referensi. Koleksi referensi merupakan sarana dasar dari sumber informasi. Koleksi referensi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemustaka mencari keterangan tertentu. Koleksi referensi penting untuk mengecek istilah, data, pembuka jalan atau pemberi pengetahuan dasar akan suatu subjek, sumber keterangan tambahan dan petunjuk kearah mana suatu informasi atau bahan pustaka dicari.

8.3.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Layanan Referensi

Kata referen berasal dari bahasa Inggris *to refer*, yang artinya menunjuk ke. Menunjukkan ke pada sumber untuk memberikan penjelasan, jawaban, atau informasi tentang sesuatu. Salah satu tugas utama yang dilakukan di perpustakaan adalah layanan referensi, yang melayani atau menyajikan koleksi referensi kepada pemustaka. Layanan referensi ini membantu pemustaka dalam menemukan atau mencari informasi dengan menjawab pertanyaan dari pemustaka menggunakan koleksi referensi, serta memberikan bantuan di mana mendapatkan koleksi referensi yang diperlukan dan cara menggunakannya (Luthfiyah, 2020).

Tujuan utama dari layanan referensi adalah untuk membantu pemustaka dalam menemukan bahan atau informasi yang dibutuhkan melalui penggunaan koleksi referensi (Rochmah, 2016). Selanjutnya, tujuan layanan referensi adalah untuk (1) memungkinkan pemustaka menemukan informasi dengan cepat dan tepat; (2) untuk memungkinkan pemustaka menelusuri informasi dengan lebih banyak variasi pilihan; dan (3) untuk memungkinkan pemustaka menggunakan koleksi secara lebih efisien (Saleh, 1994; Kalsum, 2016).

Fungsi layanan referensi dapat dilihat dari tiga komponen sebagai berikut.

1. Informasi

Pustakawan menanggapi pertanyaan pemustaka mengenai informasi yang mereka butuhkan.

2. Bimbingan

Memberikan petunjuk kepada pemustaka tentang cara mencari dan menemukan koleksi referensi yang sesuai, serta bagaimana menggunakannya untuk mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan.

3. Pemilihan dan penilaian

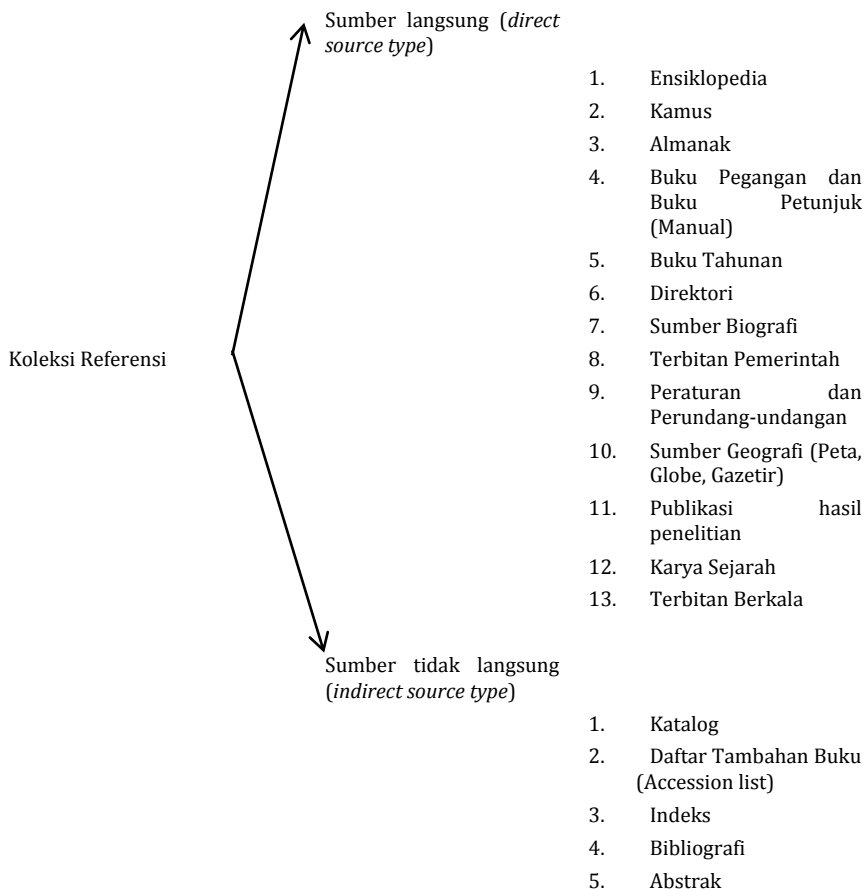
Memberikan bimbingan atau pemahaman tentang bagaimana memilih dan menilai koleksi referensi ilmiah yang berkualitas tinggi untuk memperoleh sumber informasi yang bermanfaat semaksimal mungkin.

8.3.2 Tugas Layanan Referensi

Pelayanan referensi bertugas membantu pemustaka untuk menegaskan pertanyaan dengan benar berkaitan dengan hal yang dipikirkan, seperti bagaimana memanfaatkan informasi karena akan mempengaruhi pemilihan sumber. Pustakawan rujukan dapat memberitahu pemustaka tentang sumber relevan mana yang harus mereka gunakan untuk menemukan informasi atau dapat langsung menelusur secara langsung ke sumber informasi. Penelusuran dapat juga menggunakan alat-alat telusur yang terdapat di pusat informasi. Pustakawan layanan referensi membantu pemustaka dalam mencari informasi dengan: (a) menerima pertanyaan dan menanggapiya menggunakan koleksi referensi; (b) memberikan bantuan dalam menemukan dan mencari informasi yang diperlukan; dan (c) memberikan bantuan dalam penggunaan koleksi referensi (Kalsum, 2016).

8.3.3 Jenis-jenis Koleksi Referensi

Koleksi referensi berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber langsung (*direct source type*) dan sumber tak langsung (*indirect source type*).



Gambar 9.1 Jenis-jenis koleksi Referensi

Koleksi referensi dipisahkan menjadi dua kategori, sumber langsung dan sumber tidak langsung, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.1. Sumber langsung adalah bahan pustaka yang dapat menyampaikan informasi secara langsung. Ensiklopedia, kamus, almanak, buku pegangan dan manual, buku tahunan, direktori, sumber biografi, publikasi pemerintah, peraturan dan perundang-undangan, sumber geografis, publikasi hasil penelitian, karya sejarah, dan majalah adalah contoh dari jenis bahan yang dapat digunakan sebagai sumber langsung.

1. Ensiklopedia

Ensiklopedia adalah kumpulan referensi yang dikelompokkan menurut abjad atau tema yang menawarkan informasi (deskripsi singkat) tentang berbagai item atau pengetahuan (Saleh, 1994). Ensiklopedia terdiri dari ensiklopedia umum, ensiklopedia khusus dan ensiklopedia internasional.

2. Kamus

Kamus memuat informasi kata dasar dari suatu bahasa yang berkaitan dengan ejaan, arti, asal kata dan pengucapan yang disusun menurut abjad. Selain itu kamus biasanya dilengkapi dengan sinonim, antonim, sintaksis dan lain-lain. Ada juga yang hanya memuat sebagian keterangan saja. Istilah lain juga digunakan dalam menyebutkan bentuk kamus antara lain daftar kata, takarir, glosarium, leksikon, dan sebagainya. Kamus menurut jumlah bahasa dibagi tiga yaitu ekabahasa, dwibahasa, dan anekabahasa. Menurut isinya kamus bisa dilihat dari kamus umum, kamus khusus, dan kamus subjek. Jika dilihat dari jumlah kandungan kosakata atau istilah yang terdapat dalam kamus bisa dibedakan menjadi kamus singkat, kamus sedang dan kamus lengkap.

3. Almanak

Almanak merupakan ikhtisar data yang bermanfaat, termasuk data statistik tentang suatu negara, kepribadian, peristiwa, atau subyek. Informasi yang terkandung dalam almanak ini bersifat terkini atau informasi lama.

4. Buku Pegangan (*Hand Book*) dan Buku Petunjuk (*Manual*)

Buku referensi yang memuat suatu bidang ilmu untuk dipraktekkan atau mengajar disebut dengan buku pegangan. Buku pedoman merupakan buku yang berisi petunjuk praktis mengerjakan sesuatu atau menggunakan alat tertentu.

5. Buku Tahunan (*Yearbook* atau *Annual*)

Buku tahunan membuat informasi mengenai perkembangan atau kejadian dalam kurun waktu satu tahun atau rekaman informasi yang disajikan dalam bentuk

statistik yang terbit setiap tahun. Informasi yang terdapat dalam buku ini berkaitan dengan perkembangan lembaga atau organisasi dalam waktu satu tahun. *Yearbook* merupakan buku tahunan yang mempublikasi atau menawarkan informasi tentang peristiwa terkini dengan cara terurai menggunakan data statistik. *Annual* merupakan buku tahunan yang dirilis setiap tahun dan menyoroti peristiwa atau kemajuan terbaru dari tahun sebelumnya dan biasanya tidak fokus pada data statistik.

6. Direktori

Direktori merupakan publikasi berkala berisi nama orang atau organisasi, alamat, fungsi yang di susun secara alfabetis. Lebih lanjut Thomas Landau (dalam Rahmah, 2018) mengatakan direktori tidak hanya memberikan nama-nama dari orang-orang dan organisasi-organisasi, akan tetapi ia pun memberikan alamat, fungsi, afiliasi-afiliasi, dan sebagainya. Direktori terdiri dari direktori topografi, direktori telepon dan direktori perdagangan umum.

7. Sumber Biografi

Kata "biografi" berasal dari kata Yunani "bios" dan "graphein", yang masing-masing berarti "kehidupan" dan "tulisan". Biografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang kehidupan seseorang sejak lahir sampai sekarang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, berdasarkan etimologi kata tersebut. Auto biografi adalah jenis biografi yang berfokus pada satu orang, cakupan isinya lebih luas dari biografi pada umumnya.

Secara garis besar, biografi berisikan keterangan-keterangan mengenai: (a) informasi yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, data kematian (jika sudah meninggal), keadaan keluarga, kualifikasi kedudukan, pendidikan, kegiatan, hobi, alamat, jabatan yang di pegang, sumbangan dalam bidangnya dan sebagainya; (b). temuan atau pencapaian tokoh; dan (c) latar belakang teori, prinsip, konsep, dan sudut pandang tokoh.

8. Terbitan Pemerintah

Materi referensi terbitan pemerintah yang diterbitkan secara resmi yang berisi informasi tentang topik pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden adalah contoh publikasi pemerintah di Indonesia. Tersedia pula Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang merupakan pelengkap dari publikasi-publikasi sebelumnya.

9. Peraturan dan perundang-undangan

Peraturan dan perundang-undangan merupakan bahan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi resmi dan memuat informasi tentang pedoman pengendalian kepentingan umum.

10. Sumber-Sumber Geografi

Secara umum, sumber-sumber geografi yang berupa peta, atlas, globe, dan gazetteer merupakan koleksi referensi yang berisi penyajian informasi geografis mengenai letak, luas, dan kondisi geografis lainnya.

11. Publikasi hasil penelitian

Materi tentang hasil investigasi atau kajian yang menawarkan temuan dan kesimpulan yang disampaikan kepada lembaga atau pembimbing tertuang dalam publikasi hasil penelitian. Publikasi hasil penelitian terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian.

12. Karya Sejarah

Koleksi referensi berisi informasi berkaitan dengan peristiwa atau kejadiannya nyata dimasa lampau.

13. Terbitan Berkala

Bahan referensi berupa buku-buku yang ditulis oleh berbagai penulis dan berisi informasi, berita, dan artikel yang umumnya *up to date* memuat informasi terbaru. Koran, majalah, buletin, jurnal, brosur, dan pamflet adalah contoh terbitan berkala.

Rujukan tidak langsung adalah jenis bahan referensi yang tidak dapat secara langsung memberikan informasi yang dicari, tetapi dapat mengarahkan kepada sumber informasi. Sumber tak langsung ini terdiri dari katalog perpustakaan, daftar tambahan buku, indeks, bibliografi dan abstrak.

1. Katalog

Katalog memuat informasi bibliografi lengkap suatu bahan pustaka. Katalog bertujuan membantu pemustaka mencari koleksi perpustakaan dan mengungkap isi koleksi perpustakaan.

2. Daftar tambahan buku (*Accesion List*)

Daftar tambahan buku merupakan suatu daftar tambahan buku yang terdapat di perpustakaan dan memuat informasi yang sama dalam katalog.

3. Indeks

Indeks menurut Lasa (dalam Rahmah, 2018) merupakan petunjuk berupa angka, huruf, atau tanda lain yang memandu pencari informasi ke sumber yang diidentifikasi oleh tanda untuk informasi yang lebih lengkap.

4. Bibliografi

Bibliografi adalah daftar terbitan baik bentuk buku maupun bahan pustaka lain yang diterbitkan oleh suatu daerah atau negara. Ciri-ciri bibliografi sebagai berikut: (a) disusun menurut abjad pengarang, (b) buku tidak ditemukan langsung, (c) memuat informasi tentang keberadaan buku dan; (d) berbeda dengan katalog.

5. Abstrak

Abstrak merupakan petunjuk berupa angka, huruf, atau tanda lain yang memandu pencari informasi ke sumber yang diidentifikasi oleh tanda untuk informasi yang lebih lengkap dalam suatu tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kalsum, U. 2016. Referensi sebagai layanan, referensi sebagai tempat: sebuah tinjauan terhadap layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi', *Jurnal Iqra' Volume*, 10(1), pp. 132–146.
- Luthfiyah, F. 2020. Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan. *Journal el-Idare*, 1(2), pp. 189–202. Available at: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/676/608>.
- Rahmah, E. 2018. Akses dan Layanan Perpustakaan. *Prenadamedia Group*, (1), p. 248 hlm.
- Rochmah, E. A. 2016. Erma Awalien Rochmah', *Pengelolaan Layanan Perpustakaan*, 04(46), pp. 277–292.
- Saleh, A. R. 1994. Pelayanan Sirkulasi dan Referensi. p. 110.
- Su, M. 2008. Beyond circulation: The evolution of access services and its relationship to reference librarianship', *Reference Librarian*, 49(1), pp. 77–86. doi: 10.1080/02763870802103795.

BAB 9

BENTUK USER EDUCATION

Oleh Rahmita Sari, S.Pd. M.A

9.1 Pengertian *User Education*

User Education merupakan sebuah program yang telah dirancang oleh bagian pelayanan di sebuah perpustakaan. Program ini bertujuan untuk memberi informasi terkait perpustakaan, diantaranya fasilitas perpustakaan, cara mengakses koleksi dan tata tertib yang berlaku di sebuah perpustakaan. Belum diketahui sejarah pasti tentang user education karena belum dilakukan oleh mayoritas negara di dunia. Ini berarti hanya beberapa negara-negara industri telah melakukan studi tentang user education dan beberapa negara telah berevolusi untuk pengembangan bidang ilmu Informasi Perpustakaan dan juga untuk pengembangan profesi perpustakaan.

Beberapa Negara berkembang belum mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mengkaji atau mempelajari perkembangan *user education*. Adapun pengertian “user education adalah instruksi yang diberikan kepada pemakai agar mereka dapat menggunakan perpustakaan dengan baik. User education adalah suatu proses dimana pemustaka untuk pertama kali diberi pemahaman dan pengertian sumber-sumber perpustakaan, termasuk pelayanan dan sumber-sumber informasi yang saling terkait, bagaimana menggunakan sumber-sumber tersebut, bagaimana pelayanannya dan di mana sumbernya.” (Cahyono, 2012).

Keberhasilan dan sasaran user education dibagi menjadi tiga hal yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Secara umum program user education adalah sebuah upaya yang dilakukan perpustakaan untuk datang memanfaatkan perpustakaan sebagai penunjang proses pembelajaran. User education dalam hal ini merupakan pengenalan pertama antara calon pemustaka

perpustakaan dengan sumber-sumber informasi serta layanan perpustakaan agar pemustaka mengerti bagaimana menggunakan sumber-sumber yang sudah disediakan.

9.2 Tujuan *User Education*

Tujuan user education adalah untuk memberitahu serta mengenalkan segala aspek yang terkandung di sebuah perpustakaan agar perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. “kegiatan *user education* bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pemustaka bagaimana caranya memanfaatkan perpustakaan dengan maksimal. Dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan pemustaka akan tertarik dan kemudian memanfaatkan perpustakaan.” (Nusantari, 20122).

Adapun bentuk kegiatan user education yang bisa dilakukan oleh suatu perpustakaan menurut Yusuf (2010) adalah sebagai berikut :

1. Menerangkan kepada para pengunjung atau pembaca bagaimana cara menggunakan perpustakaan dengan baik seperti mengenalkan tata tertib dan peraturan perpustakaan.
2. Menerangkan kepada siswa dan guru mengenal keberadaan dan kemanfaatan perpustakaan melalui momentum yang tepat, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya yang sejenis.
3. Mengadakan kegiatan pameran sederhana tentang masalah perpustakaan, perbukuan, pendidikan, dan sejenisnya dengan melibatkan guru dan siswa.
4. Jika memungkinkan, sewaktu-waktu bisa diadakan kegiatan pemutaran film dan atas nama perpustakaan di sekolah.
5. Secara berkala, misalnya setengah tahun atau setahun sekali diadakan berbagai kegiatan perlombaan seperti lomba minat baca, lomba membaca cepat, dan lomba lainnya.
6. Para petugas perpustakaan itu sendiri harus bersifat ramah dan selalu ingin menolong atau membantu dalam masalah yang berkaitan dengan informasi.

Pada perpustakaan perguruan tinggi user education dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dijelaskan oleh Donnelly (dalam Okoye, 2013) adalah sebagai berikut:

- a. General orientation, library talk and library tour given to new students*
- b. Introduction of new students, some of whom have never made use of well established libraries, to the complexities of university library facilities.*
- c. Librarians familiarizing users, who have little or no information seeking skills at all with a broad range of library resources in order to develop library skills,.*
- d. Librarians educating users on how to access resources manually through a card catalogue or electronically using on-line public access catalogues.*
- e. Librarians educating students through credit-earning course work.*

Pada pelaksanaan user education di perpustakaan perguruan tinggi, bisa dilakukan dengan pengenalan perpustakaan dan mahasiswa baru dapat diajak berkeliling melihat fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan, pustakawan juga diharapkan dapat membimbing mahasiswa dalam mengakses koleksi yang membutuhkan keterampilan dalam pemanfaatannya seperti akses katalog online atau jenis koleksi elektronik lainnya.

9.3 Bentuk User Education

Perpustakaan harus mempertimbangkan lagi metode apa yang sesuai dengan situasi pemustaka agar user education dapat berlangsung dengan efektif dan menghasilkan output sesuai yang diharapkan. "materi yang diberikan kepada pemustaka dapat bermacam-macam, antara lain: 1. Sistem layanan, 2. Sistem keanggotaan, 3. Sistem pengolahan, 4. Peraturan dan tata tertib perpustakaan, 5. Akses informasi/ temu balik, 6. Sarana temu kembali informasi." (Rangkuti, 2014).

Perkembangan teknologi yang tengah terjadi menjadi sorotan khusus oleh beberapa perpustakaan, karena perkembangan teknologi maka informasi dapat dituangkan ke dalam media elektronik agar mempermudah pemustaka dalam mengaksesnya, seperti yang dikemukakan oleh Yulia (2009) “dewasa ini pola kebutuhan informasi mulai berubah dari buku menjadi berbagai jenis media. Bahan non buku merupakan alat yang paling baik untuk menyebarkan informasi, dengan adanya perubahan pola ini maka perpustakaan perlu menyesuaikan koleksinya sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu dengan menyediakan sumber daya informasi dalam berbagai format atau bentuk.” Timbulnya fenomena ini menjadi pekerjaan baru bagi pustakawan untuk mendukung perubahan tersebut agar media elektronik (*e-content*) dapat dimanfaatkan secara maksimal, salah satu caranya adalah merancang sebuah program berupa kegiatan untuk memperkenalkan koleksi elektronik (*e-content*) tersebut kepada calon pengguna, sehingga pengguna mempunyai kemampuan dalam mengakses *e-content* tersebut dengan tepat dan benar.

Salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh suatu perpustakaan adalah user education (*user education*) sebagai upaya sosialisasi koleksi elektronik di perpustakaan tersebut. Salah satu tujuan dari *user education* adalah untuk mengetahui kebutuhan informasi pengguna oleh karenanya user education seharusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, seperti pendapat Yulia (2009) “kajian kebutuhan informasi pengguna sebaiknya dilakukan secara rutin sehingga kebutuhan informasi pengguna yang mutakhir selalu diketahui oleh perpustakaan, yang mengakibatkan efektivitas dalam pemanfaatan koleksi.”

Okoye (2013) “*every university library prides itself of the usability of its resources and to ensure that these resources effectively utilized calls for library user education. To remain focused, there is the need to state objectives of the instruction.*” Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu kebanggaan bagi perpustakaan perguruan tinggi dengan keterpakaian koleksi yang telah disediakan dan untuk memastikan keefektifan keterpakaian koleksinya dengan melakukan user education.

Menurut Suleiman (2012), *“majority of new students entering universities are seriously facing problems that stresses independent of thought and action. They don't know how to deal with new environment, they need carefully and special guides which help them to deal with various sources of information independently.”* Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa baru yang memasuki universitas menghadapi masalah serius saat melakukan sebuah kegiatan baru, terkadang mereka tidak tahu cara mengatasi masalah di lingkungan baru, mereka membutuhkan panduan yang cermat dan khusus yang membantu mereka untuk mendapatkan berbagai sumber informasi secara mandiri.

Keberhasilan pendidikan bisa diukur dari tujuan pendidikan itu sendiri. Bloom (2001) mengatakan bahwa taksonomi tujuan pembelajaran/pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Pentingnya *user education* bagi mahasiswa sudah jelas harus diperhatikan agar kemampuan akses terhadap koleksi dengan mudah.

Program *user education* seharusnya lebih kreatif dalam pelaksanaannya sehingga memicu semangat peserta dan memahami kebutuhan informasi peserta pada program *user education*. Melihat hasil tersebut perlu dilakukan evaluasi apakah metode dalam pembelajaran pada program *user education* sudah sesuai dengan yang diharapkan, perkembangan teknologi menjadi peluang bagi pustakawan karna koleksi elektronik dapat memudahkan pustakawan dalam pelaksanaan program *user education*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi setiap segmen literasi informasi dan telah menciptakan lingkungan yang jauh lebih praktis di dalam pengguna pendidikan.” Senada dengan penemuan Wickramanayake (2017) Beberapa dekade yang lalu bahkan sebelum penemuan internet, perpustakaan menggunakan beragam media seperti kaset audio, kaset video, proyektor overhead, multimedia proyektor, panduan subjek, *pathfinders*, dan lainnya untuk menyampaikan orientasi perpustakaan,

instruksi perpustakaan, instruksi bibliografi dll. Media ini digunakan ditatap muka mengajar atau sebagai metode belajar. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan penemuan internet, sebagian besar teknik-teknik ini digantikan oleh perpustakaan, yaitu dengan menggunakan media online atau instruksi berbasis web, sebagian besar dianggap sebagai jarak dan dikembangkan untuk digunakan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, metode ini membantu pustakawan untuk menjangkau sejumlah besar penonton di waktu yang sama. Tidak ada batasan ruang dan waktu.”

Di sisi lain Penelitian yang dilakukan Seneviratne (2009) menerangkan bahwa “kegiatan pengajaran perpustakaan di Moratuwa University secara bertahap berubah menjadi program literasi informasi yang dilakukan di dalam kelas. Dari tahun 2000, perpustakaan Universitas Moratuwa membuat program yang berbeda seperti membuat panduan pengguna, mengembangkan dan memodifikasi situs web mereka mengintegrasikan tutorial literasi informasi atau panduan pengguna, dokumen petunjuk atau *virtual tour* dan pertanyaan yang sering diajukan, dll. Selain itu, dari tahun 2002, perpustakaan mengadakan alat bantu audio visual untuk program orientasi pengguna dan reguler program pendidikan pengguna untuk membuat siswa sadar akan perkembangan perpustakaan situs web, katalog akses publik online, dan jurnal elektronik. Semua pembelajaran bertahap ini dilakukan pada setiap kelas di Moratuwa University.”

Selain itu sikap ramah serta pembawaan pustakawan dalam menyampaikan materi juga sangat perlu diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Adeyemo (2018) Staf perpustakaan harus siap untuk hadir menyampaikan materi untuk mahasiswa dengan cara yang ramah, ini akan mendorong siswa bersemangat memperhatikan apa yang disampaikan.” Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa lebih senang mendengarkan informasi yang datang dari hal yang bisa menarik perhatiannya atau hal yang disukainya terlebih dahulu, hal ini bisa menjadi evaluasi bagi perpustakaan agar

memperhatikan hal sekecil apapun dalam program pendidikan pemustaka sehingga dapat memberi dampak positive terhadap pemamfaatan dan tingkat akses koleksi elektornik yang telah disediakan di perpustakaan.

Pustakawan harus siap setiap saat ketika pemustaka membutuhkan informasi diharapkan pustakawan selalu *stand by* berada di setiap ruangan di perpustakaan, sehingga pemustaka bisa bertanya kapan saja ketika membutuhkan informasi yang diinginkan. Pustakawan adalah penghubung antara seluruh informasi yang di sediakan dengan penggunaanya. Pustakawan sebagai penghubung yang selalu berkontribusi dalam mempertemukan informasi dengan pemakai, oleh karenanya pustakawan harus mempunyai keahlian dalam hal tersebut.

Masruri (2008) menyebutkan bahwa “tugas pustakawan sebenarnya yang paling pokok adalah menjadi penghubung antara dunia informasi dengan dunia pengguna. Jika pustakawan tidak mempunyai keahlian dalam menentukan klasifikasi koleksi, tentu akan mengakibatkan koleksi itu jauh tempatnya dari bayangan pengguna.” Dari pendapat Masruri di atas menunjukkan bahwa pustakawan seharusnya mempunyai keahlian dalam melayani kebutuhan pemustaka agar informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan. Intisarinnya adalah pustakawan sangat berperan penting bagi mahasiswa dalam mengakses koleksi informasi yang disediakan, karena pustakawan merupakan ahli informasi yang mengetahui letak, jenis, dan segala kebutuhan mahasiswa, bukan hanya hal itu pustakawan juga dituntut menjadi ahli informasi yang siap pasang badan jika terdapat permasalahan dalam mengakses *e-content* sehingga diharapkan jumlah akses *e-content* di perpustakaan dapat terus meningkat.

Program pendidikan pemustaka dapat meningkatkan segala aspek yang ada di perpustakaan, khususnya aspek psikomotor yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengakses koleksi elektronik, pentingnya program pendidikan pemustaka dilakukan oleh perguruan tinggi juga dijelaskan dalam hasil penelitian oleh Rangkuti

(2014) “pendidikan pengguna merupakan sarana yang ampuh untuk mempromosikan perpustakaan, sehingga pengguna dan masyarakat di sekitarnya akan menaruh kepercayaan terhadapnya.” Hal ini senada dengan penelitian Adeyemo (2018) Setelah program pendidikan pengguna, siswa harus terus memanfaatkan sumber daya perpustakaan, karena pengetahuan dan keterampilan ditingkatkan melalui penggunaan dan selalu mempraktekkan sumber daya perpustakaan.” Program pendidikan pemustaka sudah seharusnya selalu digalakkan agar menjadi pembelajaran yang bermanfaat dalam keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menemukan informasi yang dibutuhkan di perpustakaan perguruan tinggi dan tingkat akses koleksi elektronik dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemo, O. 2018. User education in academic libraries and the information seeking behavior of users. *International Journal of Academic Library and Information Science*, 6(3), 57-62.
- Cahyono, T. Y. 2012. *Peranan user education dalam memahami karakteristik dan kebutuhan pemustaka*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang
- Masruri, A. 2008. *Dewey for windows sebagai media dalam penentuan nomor klasifikasi koleksi perpustakaan*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nusantari, A. M. 2012. *Strategi pengembangan perpustakaan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Okoye, M. O. 2013. *User education in federal university libraries: A study of trends and developments in Nigeria*. Master Thesis. Lincoln: University of Nebraska
- Rangkuti, L. A. 2014. Pentingnya pendidikan pemakai (User education) di perpustakaan perguruan tinggi. *Jurnal Iqra*, 1(12), 18-20.
- Seneviratne, T.M. 2009. Going the extra mile: Information skills development at University of Moratuwa. *Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka*, 13(1), 37-52.
- Wickramanayake, L. 2017. User Education and its present status in University Libraries in Sri Lanka: An overview. *Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka*. 19(1), 12-16.
- Yulia, Y. 2009. *Pengembangan koleksi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yusuf, P. M. 2010. *Pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah*. Jakarta: Kencana

BAB 10

PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* UNTUK LAYANAN PERPUSTAKAAN

Oleh Nove E Variant Anna, S.Sos., MIMS.

10.1 Pendahuluan

Artificial intelligence atau disebut AI merupakan konsep Yunani kuno yang berkaitan dengan mitos galatea. Diikuti oleh para filsuf dan ilmuwan yang juga mengeluarkan konsep AI dalam pemikiran mereka. AI modern muncul pada tahun 1980an, dimana penggunaan AI oleh industri yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang kompleks, seperti menyortir pesanan sesuai dengan spesifikasi customer (Fernandez, 2016b). AI banyak di persepsikan sebagai komputer atau mesin yang dapat berpikir seperti manusia, mesin yang dapat menirukan perilaku manusia (Harisanty *et al.*, 2022). Berdasarkan *Encyclopedia of Life Support Systems* "An area of study in the field of computer science. *Artificial intelligence is concerned with the development of computers able to engage in human-like thought processes such as learning, reasoning, and self-correction*". Saat ini banyak organisasi yang memanfaatkan *artificial intellignce* (AI) atau kecerdasan buatan untuk membantu dan meningkatkan daya saing. Jika sebelumnya AI banyak digunakan oleh organisasi besar berbasis teknologi dan organisasi berorientasi profit. Sehingga banyak contoh kasus penerapan AI dari oragnisasi tersebut. Namun, seiring berkembangnya jaman, pembahasan mengenai AI semakin berkembang dan tidak tertutup pada bidang tertentu saja, namun banyak dimanfaatkan di berbagai bidang seperti industri film, seni dan desain, kesehatan, pertahanan, pendidikan, dan lain-lain.

Di dunia pendidikan AI digunakan untuk proses

pembejalaran, mulai perancangan media belajar maupun penyampaian materi melalui *e-learning*. Selanjutnya, perpustakaan yang merupakan salah satu entitas yang mendukung proses pembelajaran di berbagai jenjang juga kerap kali mewacanakan AI sebagai sistem yang dapat mendukung pembelajaran civitas akademika.

Perpustakaan masih belum menerapkan AI secara intensive, melainkan masih berupa wacana dan experiemen pemanfaatan teknologi AI untuk peperustakaan, bidang di perpustakaan yang dapat terbantu oeh AI, proyek atau prototype teknologi berbasis AI, dan persepsi mengenai implementasi AI di perpustakaan. Namun wacana penerapan AI di perpustakaan ini sudah muncul sejak 30 tahun lalu yang digagas oleh Robert M. Mason, *president of the Metrics Research Corporation melalui intelligent agent* yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan perpustakaan (Heron, 2017). Mason mengharapkan bahwa terdapat sebuah sistem pintar yang dapat memprediksi informasi yang dibutuhkan pengguna menggunakan data hasil interaksi pengguna dan database perpustakaan. Saat ini hal tersebut banyak terwujud dalam bentuk rekomendasi.

Para kepala perpustakaan sudah mulai sadar akan kehadiran dan kebutuhan AI untuk mendukung layanan perpustakaan, ((Cox, Pinfield and Rutter, 2019; Ali, Naeem and Bhatti, 2020; Hervieux and Wheatley, 2021; Harisanty *et al.*, 2022). Selain membahas pentingnya teknologi AI untuk perpustakaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa impak AI untuk perpustakaan juga muncul seperti isu terkait etika dan kualitas data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Perpustakaan juga sudah membuka pintu seluas-luasnya untuk mengadopsi AI dalam meningkatkan layanan perpustakaan, terutama di perpustakaan perguruan tinggi. Hasil survey yang dilakukan oleh (Lund *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa para pustakawan memiliki pengetahuan yang cukup tinggi terkait dengan konsep *artificial intelligence* dan sangat optimis terhadap penerapan AI di perpustakaan di masa mendatang.

10.2 Teknologi AI di perpustakaan

Beberapa teknologi AI yang memungkinkan untuk mendukung layanan di perpustakaan perguruan tinggi juga menjadi bahasan yang hangat sebelum benar-benar diimplementasikan untuk perpustakaan. Teknologi AI yang banyak dibicarakan dan bisa diimplementasikan untuk perpustakaan antara lain chatbot, robotic, *Natural Language Processing* (NLP), *big data*, *text data mining*, *pattern recognition*, *image processing*, *expert systems*, *recommender systems*, *intelligent agent*, dan *virtual assistance*. Dari banyak teknologi atau teknik AI yang dapat diimplementasikan di perpustakaan membutuhkan ekosistem yang tepat sehingga perpustakaan dapat mengambil hasil yang maksimal dari pemanfaatan AI tanpa harus mengorbankan salah satu entitas di perpustakaan. Hasil survey sebelumnya di Canada, menyebutkan bahwa perpustakaan sudah memiliki teknologi berbasis AI, (12) para pustakawan juga sudah bekerja / bersinggungan dengan AI dalam kegiatan sehari-hari mereka (22%), dan perpustakaan sudah aktif memanfaatkan AI (8%) ((Hervieux and Wheatley, 2021). Salah satu contoh AI yang berada di kehidupan sehari-hari adalah Google dan Alexa. Teknologi AI tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu perpustakaan di berbagai bidang, antara lain:

10.3 Information Retrieval

Penelusuran informasi di perpustakaan sebelum adanya era teknologi sangat tergantung dengan katalog manual (katalog kartu), dimana sistem pembuatan katalog kartu menjadi kunci utama dalam keberhasilan penelusuran informasi. Namun, saat ini dimana sudah banyak koleksi perpustakaan dalam berbagai format mendorong perubahan pada penelusuran menggunakan katalog kartu. Saat ini katalog online mendominasi sistem pencarian di perpustakaan, bahkan tidak hanya fokus pada koleksi dalam bentuk buku, namun juga penelusuran artikel melalui database jurnal, penelusuran *e-book*, dan informasi online berbasis web. Sehingga menjadikan sistem penelusuran di perpustakaan harus sangat fleksibel

seperti penelusuran Google (Fernandez, 2016a). Penelusuran yang flexibel dan mudah memang kurang identik dengan perpustakaan, namun dengan adanya bantuan AI maka hal tersebut dapat terealisasi.

Pemanfaatan *intelligence agent* untuk penelusuran informasi sudah muncul sejak tahun 2008, melalui penggunaan robot yang dapat menemukan koleksi secara fisik (Heron, 2017), dan saat ini teknologi intelligent agent juga banyak dimanfaatkan untuk membantu pustakawan dan pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat dan tepat (Heron, 2017). AI juga digunakan untuk penelusuran informasi dengan natural language, yang diimplementasikan dalam bentuk chatbot yang dapat digunakan untuk menelusur informasi kesehatan. *Plutchik* chatbot didesain untuk menelusur, mencari, dan mengkomunikasikan informasi kesehatan dan berinteraksi dengan penyedia kesehatan dengan menggunakan bahasa natural (Bohle, 2018). Chatbot yang menguasai natural language membuat proses pencarian informasi yang dilakukan pengguna menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Pengguna bisa mencari informasi dengan kata kunci secara bebas.

AI yang embedded pada sistem penelusuran informasi diharapkan dapat membantu pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat dan tepat sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh manusia, dalam hal ini pengguna merasakan kemudahan dalam penelusuran informasi di perpustakaan, penelusuran informasi juga tidak hanya terbatas pada penelusuran melalui katalog namun dapat menelusur informasi dari berbagai sumber seperti database jurnal dan sumber internet, hasil penelusuran juga lebih tepat dan cepat. Pengguna juga dapat dengan mudah mendapatkan notifikasi mengenai informasi yang sesuai atau informasi terkait. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa AI akan sangat bermanfaat jika diterapkan pada penelusuran informasi di perpustakaan ((Lund *et al.*, 2020). Responden penelitian tersebut menjawab area yang paling banyak didukung oleh AI adalah information retrieval, disamping area layanan perpustakaan lainnya.

10.4 Cataloguing & Classification

AI diharapkan dapat membantu pustakawan dalam proses katalogisasi di perpustakaan ((Lund *et al.*, 2020). Selama ini pustakawan banyak menghabiskan waktunya pada proses katalogisasi koleksi perpustakaan terutama koleksi cetak dan non cetak. Banyak pustakawan yang mengharapkan bahwa kegiatan teknis katalogisasi dapat dibantu oleh AI (Harisanty, et.,al, 2022), pustakawan juga menginginkan proses katalogisasi otomatis dengan bantuan *expert system* ((Omehia and Mmejim, 2020). Demikian juga dengan klasifikasi terutama untuk koleksi digital dengan memanfaatkan machine learning untuk mengenerate nomor klasifikasi (Golub, Hagelbäck and Ardö, 2020). Akurasi algoritma pada machine learning menjadi kunci utama pada hasil klasifikasi otomatis. Experiment menggunakan machine learning untuk proses katalogisasi juga pernah dilakukan di British Library, dimana penggunaan machine learning yang dapat memberikan kode bahasa pada katalog secara otomatis (Morris, 2020).

Penerapan sistem klasifikasi otomatis ini masih dalam tahap uji coba dimana diperlukan data training dengan nomor DDC dalam jumlah yang besar agar hasil akurat. Saat ini masih belum ada sistem klasifikasi otomatis murni yang mampu mengklasifikasikan koleksi secara otomatis (Golub, Hagelbäck and Ardö, 2020). Perpustakaan juga harus mampu mengontrol data yang tidak terstruktur dengan membuat katalog berbasis linked data untuk menyediakan akses yang konsisten terhadap berbagai sumber informasi informasi dalam format full text (Schreur, 2020). Dengan konsep linked data dan semantic web, memungkinkan para kataloger keluar dari format katalog tradisional menjadi lebih bebas dan flexibel sesuai dengan sumber informasi yang semakin kompleks yang beredar di internet saat ini.

10.5 Research Support

Perpustakaan perguruan tinggi juga berperan sebagai reserach support bagi civitas akademika yang melakukan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan skripsi, thesis, disertasi.

Untuk mendukung riset perpustakaan menyediakan sumber informasi yang uptodate dan bereputasi seperti database journal dan buku-buku. Selain itu peprustakaan juga memberikan layanan akses mudah dan cepat ke sumber informasi yang dilanggan, menyediakan layanan teknologi informasi agar civitas akademika nyaman ketika menelsur informasi. Selain memberikan sumberdaya koleksi, perpustakaan juga memberikan layanan literasi informasi untuk mendukung proses penelitian. Layanan LI ini dikemas dalam format training, konsultasi, tutorial, dan panduan (*guide*).

Tidak hanya berhenti sampai pada penyediaan informasi untuk mendukung pelatihan, AI diharapkan mampu mendukung penelitian dengan memanfaatkan machine learning dalam menemukan topik-topik penelitian yang diinginkan oleh pengguna maupun merekomnedasikan topik yang berhubungan dengan topik yang diinginkan pengguna. Dengan AI dapat menemukan informasi yang relevan dengan penelitian secara cepat. Dengan memanfaatkan AI, informasi berbagai format, bahasa, dan gaya dapat dibuat dengan format yang baru dan mudah dipahami oleh pengguna (Fernandez, 2016b). Seperti penggunaan aplikasi penterjemah text dari satu bahasa ke bahasa yang lain, aplikasi perubah format dokumen yang dapat mempermudah peneliti untuk menggunakan informasi ketika melakukan penelitian.

10.6 Reference Services

Layanan referensi atau layanan konsultasi merupakan layanan personalisasi dimana pengguna dapat menghubungi pustakawan untuk berkonsultasi tentang pemanfaatan perpustakaan. Pengguna dapat berinteraksi dengan pustakawan baik *face to face* maupun virtual. AI dapat diaplikasikan pada layanan referensi dalam berbagai bentuk antara lain chatbot yang dapat menjawab berbagai pertanyaan pengguna (Allison, 2012; Hilt, 2017). Library bot menggunakan intelligent agent dapat menjawab pertanyaan referensi sederhana atau *ready reference* (Herron, 2017), dan

pemanfaatan robot pintar untuk berinteraksi dengan user (Yao, Zhang and Chen, 2015). AI melalui teknik machine learning yang mampu memberikan rekomendasi informasi yang lebih advance bagi pengguna (Honghai, 2020).

Layanan referensi merupakan salah satu layanan yang menjadi prioritas untuk penerapan AI agar menghasilkan layanan konsultasi informasi yang maksimal bagi pengguna (Lund *et al.*, 2020). Para kepala peprustakaan dan pustakawan menyatakan bahwa layanan perpustakaan yang memungkinkan di terapkan AI adaah referensi, mereka menyatakan bahwa aktivitas konsultasi untuk pertanyaan-pertanyaan umum bisa dilakukan oleh robot atau chatbot, bahkan kedepan diharapkan robot pintar mampu menjawab pertanyaan kompleks dan membantu penelitian pengguna (Hilt, 2017). Dengan bantuan AI pada layanan referensi membantu pustakawan dalam menjawab pertanyaan umum dan teknis, sehingga pustakawan dapat fokus pada pertanyaan referensi kompleks dan dapat melalukan kegiatan produktif lainnya di perpustakaan, seperti pengembangan media pembelajaran bagi pengguna, membuat program training untuk pengguna, dan memiliki waktu untuk melakukan evaluasi pada layanan referensi.

10.7 Information Literacy

Literasi informasi juga tidak terlepas dari peranan AI, beberapa peprustakaan yang menerapkan AI dalam bentuk robot pintar yang dapat menemani pengguna anak-anak ketika membaca. Anak-anak sangat menyukai adanya robot yang dapat menemani mereka ketika membaca buku (Yueh *et al.*, 2020). Sering kali di perpustakaan umum layanan anak-anak hanya fokus pada koleksi dan tempat yang disediakan khusus, namun program membaca terstruktur belum dikembangkan dengan baik. Pustakawan juga terkendala waktu ketika harus mendampingi anak-anak untuk membaca. Dengan adanya robot pintar ini sangat membantu pustakawan untuk memandu anak-anak.

10.8 Communication & Public realtion

Hubungan antara perpustakaan dan penggunanya adalah hal penting yang perlu dibangun setiap saat. Hubungan yang baik seringkali terbina jika komunikasi berjalan lancar dan dilakukan secara konsisten. Respon cepat perpustakaan terhadap semua permintaan pengguna akan memberikan impresi baik bagi pengguna. Salah satu AI yang dapat dimanfaatkan dalam komunikasi dan *public relation* adalah dengan memanfaatkan robot. Terdapat empat jenis robotic yang dapat diaplikasikan di perpustakaan, yakni *self-reading* robot, *telepresence* robot, humanoid robot dan chatbot (Graham, 2019). Robot tersebut bisa dimanfaatkan oleh perpustakaan untuk berkomunikasi dengan user. Dengan tele-presence robot dapat membantu menjembatani komunikasi secara jarak jauh antara pengguna dan perpustakaan. Humanoid robot adalah human-like robot atau social robot yang dapat berkomunikasi dengan pengguna secara fisik (Nguyen, 2020). Sedangkan chatbot adalah platform pengiriman pesan secara realtime, disini pengguna dapat memanfaatkan chatbot untuk berkomunikasi dengan perpustakaan. Robot menjadi salah satu alternatif bagi perpustakaan untuk menjalin komunikasi dan memberikan pengalaman baru pengguna perpustakaan. Kemunculan robot di perpustakaan sudah tidak terelakkan lagi dan selama dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perpustakaan dan meminimalisir aspek-aspek yang merugikan, maka kehadiran robot di perpustakaan sangat menjanjikan (Tella, 2020).

Masih banyak lagi AI yang dapat digunakan untuk layanan perpustakaan, antara lain untuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan perpustakaan (Wan *et al.*, 2009; Iantovics, Kovacs and Laszlo, 2016; Herron, 2017; Omehia and Mmejim, 2020), membantu proses indexing otomatis (Golub, Hagelbäck and Ardö, 2020), membantu proses penciptaan konten (Yao, Zhang and Chen, 2015; Hilt, 2017), dimanaafatkan untuk layanan baca (Tella, 2020). Memanfaatkan AI untuk peprustakaan diperlukan perubahan mindset dari pimpinan perpustakaan, pustakawan, maupun pengguna. Banyak pegawai

yang merasa ketakutan akan kehadiran robot dan sistem pintar lainnya akan menggeser posisi mereka di sebuah organisasi, sehingga mereka cenderung skeptis. Hal tersebut dapat menghambat transformasi, termasuk di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Y., Naeem, S. Bin and Bhatti, R. 2020. Artificial intelligence tools and perspectives of university librarians: An overview', *Business Information Review*, 37(3), pp. 116–124. doi: 10.1177/0266382120952016.
- Allison, D. 2012. Chatbots in the library: Is it time?', *Library Hi Tech*, 30(1), pp. 95–107. doi: 10.1108/07378831211213238.
- Cox, A. M., Pinfield, S. and Rutter, S. 2019. The intelligent library: Thought leaders' views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries', *Library Hi Tech*, 37(3), pp. 418–435. doi: 10.1108/LHT-08-2018-0105.
- Fernandez, P. 2016a. Through the looking glass: envisioning new library technologies" How Artificial Intelligence Will Impact Libraries', *Library Hi Tech News*, 33(5). doi: <http://dx.doi.org/10.1108/LHTN-05-2016-0024>.
- Fernandez, P. 2016b. Through the looking glass: envisioning new library technologies" understanding artificial intelligence', *Library Hi Tech News*, 33(3), pp. 20–23. doi: 10.1108/LHTN-03-2016-0013.
- Golub, K., Hagelbäck, J. and Ardö, A. 2020. Automatic Classification of Swedish Metadata Using Dewey Decimal Classification: A Comparison of Approaches', *Journal of Data and Information Science*, 5(1), pp. 18–38. doi: 10.2478/jdis-2020-0003.
- Harisanty, D. *et al.* 2022. Leaders, practitioners and scientists' awareness of artificial intelligence in libraries: a pilot study', *Library Hi Tech*. doi: 10.1108/lht-10-2021-0356.
- Herron, J. 2017. Intelligent Agents for the Library', *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*. Taylor & Francis, 14(3–4), pp. 139–144. doi: 10.1080/15424065.2017.1367633.
- Hervieux, S. and Wheatley, A. 2021. Perceptions of artificial intelligence: A survey of academic librarians in Canada and the United States', *Journal of Academic Librarianship*. Elsevier Inc., 47(1), p. 102270. doi:

- 10.1016/j.acalib.2020.102270.
- Hilt, K. 2017. What does the future hold for the law librarian in the advent of artificial intelligence?', *Canadian Journal of Information and Library Science*.
- Honghai, G. C. 2020. LIBRARY REFERENCE SERVICES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE', *Villanova Journal of Science, Technology and Management*, 2(1).
- Iantovics, L. B., Kovacs, L. and Laszlo, G. 2016. Next Generation University Library Information Systems Based on Cooperative Learning', *New Review of Information Networking*, 21(2). doi: <https://doi.org/10.1080/13614576.2016.1247742>.
- Lund, B. D. et al. 2020. Perceptions toward artificial intelligence among academic library employees and alignment with the diffusion of innovations' adopter categories', *College and Research Libraries*, 81(5), pp. 865–882. doi: 10.5860/crl.81.5.865.
- Morris, V. 2020. Automated Language Identification of Bibliographic Resources', *Cataloging and Classification Quarterly*. Routledge, 58(1), pp. 1–27. doi: 10.1080/01639374.2019.1700201.
- Nguyen, L. C. 2020. The Impact of Humanoid Robots on Australian Public Libraries', *Journal of the Australian Library and Information Association*. Routledge, 69(2), pp. 130–148. doi: 10.1080/24750158.2020.1729515.
- Omehia, A. and Mmejim, I. C. 2020. Pros and Cons of Artificial Intelligence in 21 st Century Library and Information Service Delivery', *International Journal of Scientific Research in Education*, 13(March), pp. 220–227.
- Schreur, P. E. 2020. The Use of Linked Data and Artificial Intelligence as Key Elements in the Transformation of Technical Services', *Cataloging and Classification Quarterly*. Routledge, 58(5), pp. 473–485. doi: 10.1080/01639374.2020.1772434.
- Tella, A. 2020. Robots are coming to the libraries: are librarians ready to accommodate them?', *Library Hi Tech News*, 37(8), pp. 13–17. doi: 10.1108/LHTN-05-2020-0047.

- Wan, G. G. *et al.* 2009. Key issues surrounding virtual chat reference model A case study', *Reference Services Review*, 37(1). doi: 10.1108/00907320910937299.
- Yao, F., Zhang, C. and Chen, W. 2015. Smart talking robot Xiaotu: Participatory library service based on artificial intelligence', *Library Hi Tech*, 33(2), pp. 245–260. doi: 10.1108/LHT-02-2015-0010.
- Yueh, H. P. *et al.* 2020. Reading with robot and human companions in library literacy activities: A comparison study', *British Journal of Educational Technology*, 51(5), pp. 1884–1900. doi: 10.1111/bjet.13016.

BAB 11

LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS AI

Oleh Nove

11.1 Pendahuluan

Keberadaan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, big data, *internet of things* (IoT), layanan berbasis cloud, dan alat-alat cerdas, sebagai ciri dari Revolusi Industri 4.0 akan membuat banyak perubahan dunia pendidikan (Grewal, Motyka, & Levy, 2018). Perpustakaan telah mengalami beberapa kali evolusi dalam perkembangannya. Jika semula perpustakaan berfokus pada koleksi pustaka dan layanan, kini telah bergeser pada nilai tambah (Noh, 2015). Dengan demikian, perkembangan perpustakaan pada tahapan berikutnya sangat mungkin terjadi dan bisa diciptakan. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemustaka dan perkembangan teknologi informasi. Harapannya, berbagai penyesuaian dapat membuat perpustakaan semakin berharga dan memberi dampak yang semakin besar bagi dunia pendidikan.

Artificial Intelligence adalah salah satu cabang dari ilmu komputer yang berfokus untuk menciptakan mesin-mesin cerdas yang dapat bekerja dan bereaksi layaknya seorang manusia. Ada beberapa lingkup kerja yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* yaitu seperti, penyelesaian masalah (*problem solving*), dimana poin ini sangat bermanfaat bagi bidang pelayanan.

11.2 Jenis-jenis Layanan Pemustaka

Kegiatan perpustakaan merupakan kegiatan layanan atau jasa, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok layanan, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Maksud dari

layanan teknis adalah kegiatan *back office* perpustakaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penyajian bahan pustaka pada pemustaka, seperti kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Setelah bahan pustaka selesai diolah maka bahan pustaka siap disajikan kepada pemustaka agar dapat digunakan baik untuk dibaca di tempat, dipinjam, difotokopi atau sebagai informasi rujukan. Dalam hal ini, yang menanganinya adalah kegiatan layanan pemustaka atau layanan *front office* perpustakaan, yaitu layanan yang berhubungan langsung dengan pemustaka (selanjutnya disebut layanan perpustakaan).

Oleh karena kegiatan layanan perpustakaan berinteraksi langsung dengan pemustaka maka pemustaka dapat langsung menilai baik buruknya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepuasan pemustaka atas layanan yang disajikan.

Berikut ini jenis-jenis layanan pemustaka.

1. Layanan Ruang Baca

Perpustakaan menyediakan ruang baca bagi pemustaka untuk membaca berbagai macam koleksi yang ada di perpustakaan. Layanan ini disediakan untuk mengantisipasi pembaca yang tidak dapat atau tidak ingin meminjam koleksi, tetapi hanya butuh untuk membaca-baca di perpustakaan. Demikian pula apabila perpustakaan memiliki koleksi khusus atau koleksi audiovisual yang memerlukan sarana baca khusus yang hanya dapat dibaca di perpustakaan.

2. Layanan Sirkulasi Bahan Pustaka

Dalam layanan ini pemustaka yang sudah menjadi anggota perpustakaan dapat meminjam, mengembalikan, dan/atau memperpanjang peminjaman bahan pustaka yang masih dibutuhkan. Di beberapa perpustakaan, peminjam dapat memperpanjang peminjaman bahan pustaka melalui telepon atau e-mail, hanya dengan menyebutkan nomor anggota, batas pengembalian bahan pustaka, dan nomor panggil bahan pustaka yang dipinjam.

3. Layanan Referens

Layanan ini disediakan untuk membantu pemustaka

dalam mencari informasi melalui berbagai sumber informasi referensi yang memuat informasi teknis dan uraian singkat, seperti kamus, ensiklopedi, buku pegangan, direktori, almanak, dan buku tahunan.

4. Layanan Akses Internet

Di beberapa perpustakaan kini banyak yang menyediakan akses penelusuran ke pangkalan data online (melalui internet). Di samping penelusuran ke database online, dengan adanya layanan akses internet pemustaka dapat mencari informasi apa saja, baik yang bersifat ilmiah maupun hiburan melalui internet dan atau juga menggunakan sarana e-mail.

5. Layanan Koleksi Audiovisual (AV)

Dengan semakin berkembangnya jenis bahan pustaka sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, kini banyak perpustakaan yang memiliki koleksi Audiovisual, seperti kaset, microfis, mikrofilm, kaset video, dan CD/DVD ROM. Biasanya perpustakaan menyediakan ruang khusus AV karena untuk membaca koleksi AV diperlukan alat baca khusus.

6. Layanan Fotokopi

Layanan ini disediakan agar pemustaka yang tidak dapat atau tidak ingin meminjam koleksi tersebut untuk dibawa pulang, dapat memfotokopinya di perpustakaan. Layanan ini juga dapat meningkatkan keterpakaian koleksi yang tidak dapat dipinjamkan. Dengan adanya layanan ini maka pemanfaatan koleksi dapat lebih optimal karena bagi pemustaka yang bukan anggota perpustakaan dan tidak dapat meminjam koleksi yang dibutuhkan, tetap dapat membawa hasil fotokopinya untuk dibawa pulang meski tidak semua halaman dokumen dapat difotokopi.

7. Layanan Penelusuran Literatur

Pemustaka yang sedang mencari informasi mengenai suatu subjek dapat meminta bantuan pustakawan untuk mencarinya dari berbagai sumber baik sumber informasi yang ada di perpustakaan ataupun di luar perpustakaan.

8. Layanan Pendidikan Pemustaka dan Pelatihan Literasi Informasi

Layanan pendidikan pemustaka disediakan untuk membimbing pemustaka baru dalam menggunakan seluruh fasilitas, sumber informasi, mengetahui peraturan, dan tata tertib yang ada di perpustakaan. Melalui layanan ini maka perpustakaan juga tidak akan terlalu repot untuk selalu membimbing masing-masing pemustaka yang baru menggunakan jasa layanan perpustakaan. Namun dalam keseharian, pastinya tetap saja ada pemustaka baru yang memerlukan bantuan bimbingan dalam menggunakan OPAC atau sarana perpustakaan lainnya.

9. Pelatihan literasi informasi adalah pelatihan yang diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memiliki kemampuan dalam menemukan informasi, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisir, memahami berbagai jenis sumber informasi dan cara menelusurnya serta mampu mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif seperti pemahaman infrastruktur teknologi pada transfer informasi kepada orang lain, termasuk konteks sosial, politik dan budaya serta dampaknya. Dengan demikian, para pemustaka dapat mandiri memenuhi kebutuhan informasinya dengan menggunakan berbagai teknologi informasi dalam mencari dan memanfaatkan informasi tersebut.

10. Layanan Informasi Kilat (*Current Awareness Services*)

Layanan ini diberikan dengan tujuan agar pemustaka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya melalui pengiriman daftar isi jurnal terbaru (*current contents*). Biasanya banyak diterapkan di perpustakaan khusus.

11. Layanan Penyebaran Informasi Terseleksi (*Selected Dissemination of Information*)

Seperti halnya pada layanan Informasi Kilat maka layanan ini juga diselenggarakan dengan tujuan agar pemustaka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi, dengan

cara menyebarkan informasi terseleksi dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan bidang minat pemustaka. Biasanya perpustakaan mengumpulkan terlebih dahulu profil minat pemustaka. Layanan ini juga banyak diterapkan di perpustakaan khusus. Dengan menerapkan teknologi informasi di perpustakaan kegiatan ini lebih mudah dan cepat dilakukan.

12. Layanan Pembuatan Paket Informasi

Layanan ini diberikan perpustakaan bagi pemustaka yang sedang membutuhkan informasi lengkap mengenai suatu subjek. Biasanya bahan-bahan yang dikumpulkan dapat berupa artikel majalah dan/atau daftar buku mengenai subjek yang dicari tersebut.

13. Layanan Peminjaman Antarperpustakaan (*Interlibrary Loan Services*)

Layanan perpustakaan semacam ini diadakan berdasarkan kesepakatan kerja sama antarperpustakaan untuk dapat meminjamkan koleksi kepada pemustaka yang terdaftar sebagai salah satu anggota perpustakaan dari perpustakaan tersebut.

14. Layanan Penerjemahan

Layanan penerjemahan banyak diselenggarakan oleh perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya manusia yang memadai, baik dalam jumlah maupun kompetensi penguasaan berbagai macam bahasa asing.

15. Layanan Kelompok Pembaca Khusus (Anak, Remaja, dan Penderita Cacat)

Biasanya layanan ini diberikan oleh perpustakaan umum yang memang memiliki berbagai macam kelompok pembaca. Untuk kelompok pembaca anak-anak misalnya, perpustakaan dapat menyediakan layanan story telling atau pembacaan buku cerita. Dengan menceritakan suatu cerita yang penuh imajinasi dapat mendorong anak untuk mengembangkan imajinasi dan kegemaran membaca buku. Perpustakaan juga dapat menyediakan layanan bagi para penderita tuna netra, misalnya dengan menyediakan koleksi khusus braille.

16. Layanan Perpustakaan Keliling

Di Indonesia layanan ini diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan beberapa perpustakaan umum. Hal ini terutama ditujukan untuk menjangkau pembaca yang letak tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan sehingga kemungkinan mereka untuk datang ke perpustakaan sangat sulit.

Demikian penjelasan mengenai beberapa jenis layanan perpustakaan (Rahayu et al., 2014).

11.3 Pengertian AI

Artificial intelligence atau biasa disingkat AI adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. AI mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya menjadi informasi berguna agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan dalam Britannica, AI didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer digital atau robot yang dikontrol dengan komputer untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan kecerdasan. Konsep kecerdasan di sini merujuk ke karakteristik perilaku manusia. (Copeland, 2020) Sementara itu, menurut Cambridge Dictionary, AI adalah suatu studi untuk menghasilkan mesin yang memiliki kualitas seperti pikiran manusia, seperti kemampuan untuk memahami bahasa, mengenali gambar, menyelesaikan masalah, dan belajar. (Dictionary, n.d.)

Ada banyak definisi lain dari para ahli. Baik sebagai suatu kemampuan, maupun suatu bidang studi, atau bahkan suatu benda; para ahli umumnya mendefinisikan AI dengan kecerdasan manusia sebagai tolak ukurnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa apa yang sering disebut sebagai AI masih sangat jauh dari kecerdasan manusia secara umum. Karena hal itu, beberapa ahli sebenarnya mengkritisi penamaan dengan istilah *artificial intelligence* ini (Topics, 2022).

11.4 Sejarah AI dari Waktu ke Waktu

11.4.1 Sejarah AI: Sebelum Abad ke-20

Peradaban Yunani Kuno

Peradaban Yunani Kuno penuh dengan filsuf-filsuf besar yang karyanya masih bisa menjangkau kita. Filsuf besar memang tidak terbatas pada peradaban Yunani Kuno, namun tidak banyak yang karyanya sampai pada kita. Namun, konsep terkait AI dari Yunani Kuno kali ini lebih menuju ke mitos daripada pemikiran para filsuf mereka.

Dalam peradaban Yunani Kuno, terdapat mitos tentang Hephaestus, seseorang yang membuat pelayan-pelayan mekanis, menunjukkan konsep robot/mesin cerdas pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang saat itu sudah memiliki gambaran terkait makhluk cerdas yang fisiknya tidak terbuat dari daging sebagaimana manusia dan binatang. Banyak pula mitos-mitos lain yang serupa dengan itu. (Seiler & Jenkins, 2014)

Peradaban Islam di Abad Pertengahan

Pada tahun 1206, Al-Jazari mengembangkan robot *humanoid* pertama yang bisa diprogram dan berkerja secara mekanis (Seiler & Jenkins, 2014). Pada masa itu, peradaban Islam memang menghasilkan banyak temuan menarik yang bekerja secara mekanis. Banyak pula temuan alat-alat mekanis yang bekerja secara otomatis. Namun, Al-Jazari bisa selangkah lebih maju dengan mengembangkan tidak hanya alat otomatis, namun juga berbentuk *humanoid* dan dapat diprogram oleh penggunaanya.

Filsuf di Masa Enlightenment

Pada masa enlightenment, peradaban Barat menghasilkan filsuf-filsuf besar setelah berabad-abad sebelumnya terkekang dalam Dark Ages. Di antara filsuf yang terkenal dan banyak mempengaruhi peradaban Barat masa kini adalah Rene Descartes dan Thomas Hobbes.

Terkait kecerdasan buatan ini, Descartes menyatakan bahwa binatang pada dasarnya tidak lebih dari suatu mesin

yang kompleks. Sementara itu, Thomas Hobbes mempublikasikan *The Leviathan* yang memuat teori berpikir secara mekanis dan kombinatoris. (Seiler & Jenkins, 2014)

11.4.2 Sejarah AI: Abad ke-20

Pada abad ke-20 ini, komputer mulai banyak digunakan. Bahkan, pada Perang Dunia I dan II, komputer memegang peranan penting. Perang tersebut juga memicu temuan-temuan baru dalam bidang ilmu komputer. Ketika perang tersebut berakhir, perkembangan ilmu komputer pun menjadi makin cepat, termasuk pembahasan terkait AI ini.

1943

Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts mempublikasikan *A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity*. Karya ini memberikan dasar untuk konsep *neural networks* yang sangat vital bagi perkembangan AI. (Seiler & Jenkins, 2014) Bahkan, jika kita meninjau AI dan *machine learning* di zaman sekarang, konsep dasarnya tetaplah *neural networks*.

1950

Tahun 1950, seorang ilmuwan matematika, Alan M. Turing dalam tulisannya berjudul *Computing Machinery and Intelligence* memperkenalkan *Turing Test*, sebuah tes untuk menguji kecerdasan dari mesin. Sebelumnya, Alan Turing juga mengemukakan konsep *Universal Turing Machine* yang menjadi konsep penting untuk pengembangan komputer. (Seiler & Jenkins, 2014). Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Sampai sekarang, istilah *Turing Test* dan *Universal Turing Machine* tersebut masih sering digunakan dalam ilmu komputer dan AI.

Pada tahun ini, Isaac Asimov juga mempublikasikan tiga

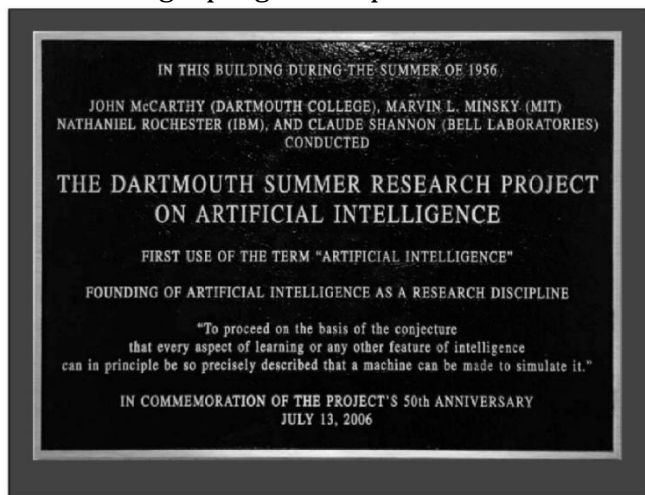
hukum robotika yang menyatakan bahwa suatu robot (Seiler & Jenkins, 2014)(Anyoha, 2017):

- tidak boleh menyakiti manusia atau mengizinkan tersakitinya manusia
- harus mematuhi perintah dari manusia, kecuali jika itu bertentangan dengan hukum pertama
- harus mempertahankan keberadaan dirinya selama itu tidak bertentangan dengan hukum pertama dan kedua

Bagaimana pun juga, hampir semua terobosan terkait AI sampai titik ini masih berada di tataran konsep/teori. Meski komputer sudah ditemukan, ide mengenai AI sangat sulit untuk diterapkan. Itu karena sebelum tahun ini, komputer belum memiliki memori untuk menyimpan perintah. Selain itu, harga komputer masih sangat mahal. (Lewis, 2015) Semua berubah ketika komputer mulai menggunakan memori dan harga komputer menjadi makin murah.

1955 - 1956

Pada tahun 1955, Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon mengembangkan program komputer bernama *Logic Theorist* dengan dana dari RAND Corporation. Program ini sering disebut sebagai program AI pertama.



Di tahun 1956, *Logic Theorist* itu dipresentasikan di

sebuah konferensi program AI bernama Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence DSRPAI. (Lewis, 2015) Saat konferensi inilah, istilah “*artificial intelligence*” pertama kali muncul tercetus dari John McCarthy. Pada saat itu pula, AI secara formal menjadi suatu bidang studi. (*History of Artificial Intelligence*, n.d.). Namun sayangnya project ini tidak berjalan semulus rencana awal, karena kurangnya komitmen dari para peneliti yang terlibat. Pengembangan AI saat itu cenderung lambat, tetapi project inilah yang memulai peluang AI hingga bisa berkembang seperti saat ini.

1960

Perkembangan pesat terjadi pada AI selama tahun 1960an, di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapat akses yang cepat dan murah. Beberapa algoritma machine learning juga mulai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. *Natural Language Processing* (NLP) pertama, bernama STUDENT adalah model AI yang dibuat di Lisp untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. STUDENT dianggap sebagai milestone awal dalam dunia AI – NLP

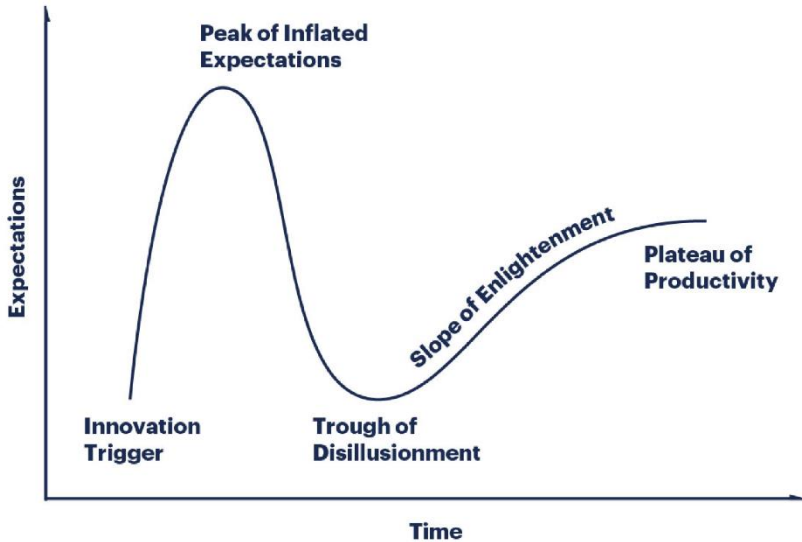
Pada tahun 60an juga muncul ELIZA. Masih menggunakan NLP, ELIZA adalah chatbot pertama sebelum dikenal Siri, Alexa, dan berbagai robot NLP yang ada sekarang. Pemerintah saat itu menaruh harapan besar akan kehadiran ELIZA karena potensinya untuk menerjemahkan bahasa dengan sangat baik melalui data processing. Harapan ini meyakinkan pemerintah untuk memberi dukungan modal besar pada pengembangan AI di tahun 60-an.

1970

Bahkan, tahun 1970, Marvin Minsky menyatakan, “Dalam tiga sampai delapan tahun, kita akan memiliki mesin dengan kecerdasan seperti manusia rata-rata”. (*History of Artificial Intelligence*, n.d.)

1972

Memasuk tahun 70, Japan menciptakan WABOT-1. Robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara.



1974 - 1980

Meski di periode sebelumnya AI berkembang sangat cepat, bahkan memberikan harapan besar, ternyata perjalanannya tidak bisa semulus itu. Pada periode ini, AI justru tidak bisa berkembang lebih jauh karena kemampuan komputer saat itu masih sangat rendah dan pendanaan untuk riset juga menurun. (Lewis, 2015) Karenanya, masa ini disebut sebagai “AI Winter”. (*History of Artificial Intelligence*, n.d.)

Fase AI Winter

Pemerintah dan korporat yang selama ini mendanai penelitian AI merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir para peneliti gagal memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan yang signifikan pada AI. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan.

Para peneliti menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar karena keterbatasan utama yang dihadapi adalah komputer yang belum memadai. Pada masa itu komputer yang

digunakan belum cukup canggih untuk memproses data dalam jumlah masif disertai dengan kinerja komputer yang lambat. Komunikasi pun terhambat dan mempersulit pengembangan, di mana seseorang harus tahu arti dari berbagai kata untuk dapat menciptakan satu kombinasi yang diharapkan.

1980 – 1987

Pada periode ini, John Hopfield dan David Rumelhart memperkenalkan algoritma *Deep Learning* yang saat ini banyak digunakan. John Hopfield juga terkenal dengan penemuan model *neural network* yang saat ini dikenal sebagai Hopfield Network.

Sementara itu, Edward Feigenbaum memperkenalkan *Expert System*, suatu program komputer yang mendapat pelatihan oleh orang-orang yang *expert* pada suatu bidang sehingga program itu bisa memberi saran pada orang awam di bidang itu. Industri juga banyak menggunakan *expert system* ini. (Lewis, 2015)

1987 – 1993

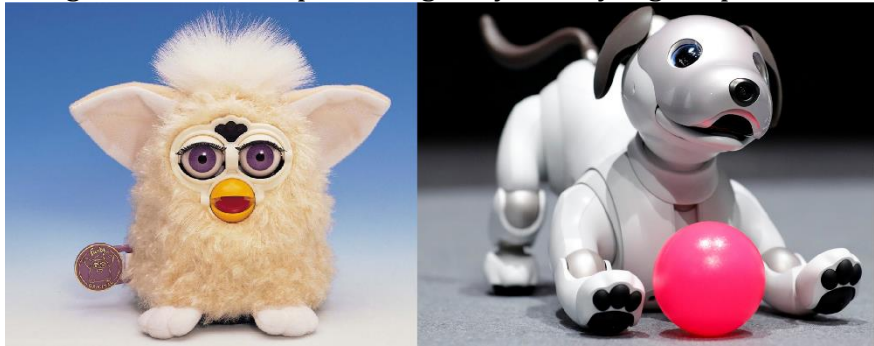
Pada periode ini, kembali terjadi *AI winter* bersamaan dengan jatuhnya pasar beberapa jenis komputer dan berkurangnya pendanaan dari pemerintah. (*History of Artificial Intelligence*, n.d.)

11.4.3 Sejarah AI di Akhir Abad Millenium: 1990

Memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI cukup baik untuk memasuki abad baru ini. Banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90an (Lewis, 2015).

Pada tahun 1997 mesin *Deep Blue* yang dikeluarkan IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu (Lewis, 2015). Pada tahun yang

sama pula Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon Systems yang diciptakan.



Tahun 1998 AI berkontribusi pada mainan anak-anak. Furby adalah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua. Dave Hampton dan Caleb Chung berhasil mengimplementasi AI tidak hanya dalam pekerjaan serius, tetapi juga untuk hiburan sehari-hari. Dilanjutkan dengan keluarnya Artificial Intelligence RoBOt (AIBO) oleh SONY pada tahun 1999. Robot berupa anjing ini mampu berinteraksi dengan dunia luar baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan AIBO dengan lainnya jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad 20 tersebut.

11.4.4 Sejarah AI: Abad ke-21

Faktor Perkembangan AI di Abad ke-21

Meski baru berlangsung dua dekade, perkembangan AI pada abad ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Terkait hal itu, ada dua faktor utama: penemuan kartu grafis atau GPU (*graphic processing unit*) dan sangat masifnya data yang tersedia. (Topics, 2022). GPU meski sesuai namanya berkaitan dengan pengolahan objek grafis, ternyata sangat cocok untuk diterapkan pada AI. Ini karena AI, terutama yang berbasis *neural network*, memerlukan banyak operasi dengan sifat paralel yang mana GPU didesain untuk mengoptimasi operasi paralel semacam itu. Sampai sekarang pun, GPU masih menjadi

sering pilihan untuk mengembangkan AI.

Hal yang kedua adalah sangat masifnya data. AI yang berbasis *machine learning* atau *deep learning* sangat bergantung pada banyaknya data yang diberikan padanya. Makin banyak data yang ada, AI akan makin banyak belajar dan bisa menguasai hal-hal yang makin kompleks.

11.4.5 Perkembangan AI di Abad ke-21

Karena dua hal itu, tentu dengan berbagai faktor lainnya, terdapat pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Sebelumnya pada *expert system*, para *expert* melatih AI secara langsung. Dengan masifnya data dan tingginya performa komputasi, AI bisa didesain agar belajar sendiri. Dengan cara itu, pada 2012, Google berhasil membuat AI yang mampu mengenali kucing pada sebuah video. (Topics, 2022) Sebuah pencapaian besar oleh perusahaan besar yang sekarang bisa dicapai dengan mudah oleh seorang mahasiswa biasa. Itu menunjukkan betapa pesatnya AI berkembang pada masa ini.

Korporat juga semakin marak menggunakan AI dan terus mengembangkan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Pada tahun 2009 Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada's self-driving test. Semua pencapaian dalam dua dekade ini menunjukkan bagaimana AI berkembang sangat cepat secara eksponensial. Dengan itulah, saat ini AI bisa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.

Sejarah AI Saat Ini

Untuk sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Kini penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas.

Siri yang dirilis Apple sejak 2011? Tentu menggunakan AI!

Belanja di Amazon dengan bantuan Alexa? Ada AI dibalikanya!

AlphaGo yang fenomenal karena mengalahkannya pemain Go profesional di tahun 2016? Itu adalah bentuk AI yang semakin canggih

Robot manusia bernama Sophia? Apalagi kalau bukan hasil kecanggihan AI!

Perkembangan AI yang sudah ada sejak 50 tahun lalu kini sudah mengalami banyak kemajuan. AI semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia, bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas suatu permasalahan.

11.5 Pentingnya Kehadiran *Artificial Intelligence* untuk Pelayanan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa di zaman penuh dengan kemudahan, modernitas dan perkembangan teknologi seperti sekarang ini telah membentuk pelanggan yang memiliki harapan-harapan lebih tinggi daripada sebelumnya. Layanan pelanggan harus memiliki strategi yang baik dalam membantu dan melayani kebutuhan produk atau layanan jasa dari para pelanggan. Contoh strategi layanan pelanggan seperti, menyusun kata-kata customer service dengan sebaik mungkin dan para karyawan di bidang pelayanan pelanggan harus memberikan pelayanan prima.

Dikarenakan para pelanggan memiliki harapan yang tinggi kepada layanan jasa, maka perusahaan sudah harus memulai personalisasi kepada para pelanggannya. Bagi rekan-rekan pembaca yang pernah menelepon salah satu nomor customer service untuk bertanya atau menyampaikan keluhan pasti pernah merasakan personalisasi. Contoh personalisasi disini seperti karyawan layanan pelanggan akan menanyakan nama Anda dan menyebut nama rekan pembaca kembali ketika mereka sedang menjelaskan sesuatu. Dengan kata lain, personalisasi akan membuat pelanggan merasa lebih dihormati dan diakui kehadirannya oleh customer service.

Nah, Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan menjadi sangat penting ketika perusahaan ingin melakukan personalisasi yang lebih terperinci dalam lingkup yang lebih

besar. Para pemasar atau marketing akan beralih ke Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan agar dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang jauh lebih baik. Dalam artian, pelanggan akan merasa jauh lebih puas, lebih tertarik dan lebih menyukai produk atau layanan jasa yang kita tawarkan.

11.6 Library 4.0 untuk Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan Inovatif

Keberadaan gawai saat ini membuat layanan perpustakaan juga berubah dari semula mengandalkan lokasi, luasan ruang, kelengkapan koleksi, atau sistem informasi; ke perpustakaan yang dapat menyediakan layanan yang dapat menjawab kebutuhan dunia pendidikan dalam hal menemukan rujukan berkualitas, penulisan rujukan yang baik, bahkan juga mengantisipasi plagiasi (Sanjaya, 2018).

Pengembangan asisten virtual yang cerdas dan membantu pemustaka mendapatkan kebutuhannya juga perlu dilakukan agar tetap menarik pemustaka dari generasi muda. Unika Soegijapranata mengembangkan **Vanika atau Virtual Assistant Unika**, salah satunya untuk tujuan tersebut.

11.7 Penerapan Berbasis AI di Pelayanan

Perpustakaan

Penerapan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan bukan untuk menggantikan pustakawan secara keseluruhan. Memang dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan kepastakawanan yang sudah digantikan oleh teknologi informasi, bahkan kadang menjadi yang mendominasi pekerjaan di perpuatakaan.

Penggunaan *artificial intellligence* berfungsi untuk membantu pustakawan dalam melakukan aktifitas kepastakawan, terkadang pustakwan menghadapi pekerjaan yang cukup banyak dalam durasi waktu terbatas, sehingga *artificial intellligence* bisa menjadi alat bantu. Dengan begitu hadirnya *artificial intellligence* sebagai solusi bagi pustakawan untuk melayani pengguna dengan maksimal tanpa

meninggalkan pekerjaannya sebagai pengelola informasi.

Sistem penggunaan teknologi informasi sudah umum dipakai, tetapi khusus penggunaan artificial intelligence sebagai pemandu otomatis di perpustakaan merupakan inovasi yang menarik dan unik untuk diterapkan. Pustakawan *artificial intelligence* merupakan konsep perpustakaan digital yang memberikan informasi menggunakan sistem yang terintegrasi secara langsung dengan informasi di perpustakaan. Pustakawan artificial intelligence akan menjadi perantara yang focus dan efisien bagi pengguna perpustakaan.

<http://repository.um.ac.id/98934/> chatbot

Perpustakaan, baik tradisional maupun digital, adalah sebuah institusi yang mengemban tanggung jawab dalam hal penyediaan dan penyebaran informasi bagi individu-individu yang membutuhkannya. Perpustakaan harus mampu meyakinkan setiap individu bahwa pustakawan mampu mencari dan memenuhi kebutuhan informasi dari setiap individu melalui berbagai cara (Stojanovski & Papić, 2012). Selain itu, perpustakaan harus mampu memberikan layanan referensi akademis bagi masyarakat karena saat ini banyak informasi yang tersedia dan dapat disadur secara langsung melalui internet tanpa tahu kredibilitas dan kualitasnya (Tutu, 2016). Li, Lizhen, & Yue (2007) turut menyampaikan bahwa perpustakaan harus mampu melakukan diversifikasi pada layanannya, tidak hanya sebagai penyedia informasi saja namun harus mampu memberikan layanan konsultasi referensi, penyediaan sumberdaya multimedia, layanan suara, layanan email dan lain sebagainya. Berdasarkan tugas-tugasnya, perpustakaan dinilai menjadi bagian penting dari terbangunnya peradaban manusia yang cerdas dan modern sehingga muncul urgensi untuk terus meningkatkan kualitas layanannya.

Pada dasarnya layanan perpustakaan hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi, saat ini muncul suatu tantangan baru bahwa perilaku manusia bersifat heterogen tergantung pada ruang dan waktu sehingga membuat kebutuhan informasi dari pengguna perpustakaan menjadi lebih kompleks bahkan berubah-ubah (Wang, 2016). Adapun

besarnya volume informasi di internet saat ini menyebabkan aktivitas pencarian dan seleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan memakan banyak waktu sehingga hal ini menjadi tidak efisien (Li, Lizhen, & Yue, 2007). Pang & Yan (2012) menyampaikan bahwa disamping mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan perpustakaan digital para pengguna perpustakaan tersebut menderita dengan banyaknya dan beragamnya sumber daya informasi padahal setiap informasi memiliki nilai yang berbeda di benak satu individu. Gbotosho (2019) menyampaikan dimana ledakan informasi saat ini menjadikan seseorang harus mendapatkan informasi yang relevan dengan waktu dan biaya yang minimum tanpa terbebani dengan informasi yang tidak relevan dalam jumlah besar. Berbagai tantangan tersebut menjadi permasalahan yang harus dijawab oleh penyedia jasa layanan informasi, atau dalam hal ini perpustakaan, sehingga pada akhirnya masyarakat mampu menciptakan pengetahuan-pengetahuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien

- System perangkat lunak Arduino uno sebagai sensor kebisingan yang dipergunakan sebagai alat inovasi teknologi di perpustakaan untuk dapat mengatasi kebisingan yang terjadi di perpustakaan, agar kenyamanan pemustaka lain dapat dirasakan dengan tenang. (Adipar, 2021).

Untuk mengenal beberapa bidang kecerdasan buatan yang dapat dimanfaatkan pada perpustakaan, maka dapat dilihat beberapa contoh berikut ini:

- a. Pengolah Bahasa Alami
Pengolah bahasa alami pada perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk menterjemahkan koleksi yang berbahasa asing menjadi bahasa Indonesia misalnya.
- b. Visi Komputer
Konsep visi komputer yang menggunakan kamera untuk menangkap objek dan mengidentifikasinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran dimensi

buku secara otomatis. Misalnya meletakkan buku dengan posisi tertentu, lalu kamera menangkap objek tersebut. Dengan bantuan kecerdasan buatan, dari hasil tangkapan kamera tersebut dapat diketahui panjang, lebar, dan ketebalan sebuah buku.

c. Pengenalan Percakapan

Dalam pengenalan percakapan ini perpustakaan dapat memanfaatkannya untuk menginputkan bahan pustaka dengan menggunakan perintah suara. Misal menyebutkan judul yang panjang dengan hanya menggunakan perintah suara, atau mencetak katalog buku menggunakan perintah suara.

d. Robotika

Konsep robotika ini adalah konsep yang paling familiar dengan manusia. Untuk penggunaan robot dalam dunia perpustakaan bisa dimanfaatkan sebagai robot yang dapat mengambilkan koleksi bahan pustaka di suatu tempat, dengan bantuan nomor rak, letak rak, dsb, maka robot dapat diinstruksikan untuk mengambilkan sebuah koleksi perpustakaan.

e. Sistem Pakar

Dengan menggunakan sistem pakar, dapat dibuat sebuah sistem layaknya seorang pakar perpustakaan. Pakar perpustakaan adalah pustakawan, karena pustakawan menyimpan banyak informasi mengenai perpustakaan baik secara teori maupun dalam praktiknya. Untuk penerapan sistem pakar ini misalnya dibuat beberapa pertanyaan yang nantinya hasil dari pertanyaan tersebut dapat dijadikan saran untuk mengambil suatu keputusan. Hasil ini bisa berupa saran buku yang nantinya akan dipinjam oleh pemustaka, dll

Contoh:

Sistem Pakar : bahan pustaka bidang apa yang Anda sukai?

Pemakai : teknologi informasi

Sistem Pakar : bahan pustaka bidang teknologi informasi apakah yang Anda ingin cari?

Pemakai : pemrograman

Sistem Pakar : bahasa pemrograman apa yang Anda ingin ketahui?

Pemakai : Java

Sistem Pakar : (lalu sistem pakar ini merekomendasikan beberapa judul buku tentang pemrograman Java)

f. Jaringan Saraf

Jaringan saraf untuk pemanfaatan perpustakaan dapat digunakan sebagai penemuan pola peminjaman buku pada pemustaka.

g. Agen Cerdas

Agen cerdas dapat dimanfaatkan sebagai pemandu dalam menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC) atau menciptakan OPAC assistant yang nantinya dapat dengan mudah melakukan pencarian mandiri tanpa bertanya kepada pustakawan dan hanya berinteraksi dengan agen OPAC tersebut (Dewi, 2020).

Lalu bagaimana AI dalam pengelolaan perpustakaan ?. Jika dikaji lebih dalam betapa aktivitas yang dulunya dilakukan secara analog dan membutuhkan sentuhan manusia, namun saat ini telah direduksi dengan diterapkannya terobosan kecerdasan buatan untuk beragam sistem di perpustakaan. Dahulu layanan sirkulasi dilayani petugas, namun kini bisa dengan self service. Teknologi menggunakan barcode kini sudah banyak beralih ke RFID. Kelebihannya antara lain bahwa jika pada sistem barcode maka barcode reader masih harus membaca satu-satu barcode pada buku, namun jika sistem RFID maka RFID reader pada KioskLangsung bisa membaca tumpukan buku-buku secara sekaligus.

Suatu contoh misalnya bagi perpustakaan yang memanfaatkan teknologi RFID, maka pada layanan peminjaman dan pengembalian buku sudah tidak lagi melalui bantuan petugas perpustakaan. Dalam konteks ini sudah digantikan dengan mesin. Fasilitas anjungan peminjaman mandiri seperti mesin ATM akan memudahkan pemustaka. Peminjaman mandiri dilakukan dengan meletakkan buku yang dipinjam

pada mesin Kiosk, kemudian men-scan ID pemustaka. Jika proses berhasil maka struk bukti peminjaman akan keluar dari mesin Kiosk tersebut.

Selanjutnya pada layanan pengembalian mandiri dengan mesin *book drop* yang diletakkan di luar Gedung perpustakaan, maka pemustaka bisa kapan saja mengembalikan buku, sehingga tidak harus terpancang pada jam buka layanan perpustakaan. Begitu juga pada sistem pengembalian, maka sistem akan mendeteksi sendiri baik ID peminjam maupun buku yang dikembalikan. Struk bukti pengembalian akan keluar dari mesin sebagai bukti jika transaksi pengembalian buku telah berhasil dilakukan.

Begitu pula melalui layanan sistem informasi online yang dikembangkan di perpustakaan, maka pemustaka dalam melakukan transaksi bisa dari manapun, artinya tidak harus datang secara fisik ke perpustakaan. Mereka bisa mengakses, seperti: cek buku yang dipinjam, cek denda keterlambatan pengembalian buku, cek status keanggotaan, cek batas akhir pinjaman, update data diri pemustaka, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti jika melalui online maka permasalahan beres. Ada beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan, misalnya kompetensi pemustaka yang masih kurang sehingga tidak bisa melakukan akses via online, daya listrik mati, maupun error pada sistem yang disebabkan karena gangguan pada jaringan.

Sebagai pengganti orang (satpam) yang bertugas mengecek, mengontrol, dan menjaga keamanan sirkulasi buku yang diambil secara ilegal, maka pada pintu masuk/keluar perpustakaan bisa dipasang RFID Gate. Hal ini berfungsi sebagai mesin anti pencurian (*electronic article surveillance*), sehingga alarm pendeteksi akan berbunyi sebagai penanda jika terjadi transaksi proses peminjaman yang tidak sesuai prosedur yang sah. Selanjutnya pembayaran denda keterlambatan pengembalian buku bisa dikembangkan berbasis digital yaitu menggunakan fasilitas kartu elektronik (*emachine*), sehingga tidak ada lagi transaksi pembayaran dengan uang tunai.

Bagaimanapun perkembangan pesat teknologi informasi mempengaruhi eksistensi generasi pemustaka milenial. Mereka tidak hanya cakap menggunakan teknologi tetapi juga memiliki kecakapan global berbahasa Inggris, kreatif, inovatif, berkarakter, berkepribadian, serta mampu berpikir kritis. Katakan kaum muda intelektual baik dari kalangan pengusaha, praktisi industri, akademisi, tenaga kependidikan, ASN termasuk para pustakawan, ternyata sangat lekat dengan perangkat digital. Betapa telepon pintar telah lekat dengan kesehariannya. Sejalan dengan tren dan gaya hidup masyarakat di era digital, menuntut peran pustakawan yang peka dan peduli terhadap kebutuhan pemustaka kekinian.

Program (*software*) automasi perpustakaan yang gratis seperti INLISLITE dan SLIMS juga mempermudah pustakawan mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan. Untuk menciptakan AI, maka pihak admin bisa mengembangkan dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan perpustakaan pada menu-menu yang disediakan dalam program tersebut.

Contoh lainnya adalah sistem bookless library, bahwa untuk membaca buku bisa diakses dengan gadget (laptop, tablet, dan smartphome) dalam hotspot intranet (tanpa koneksi data internet) via scan Quick Response (QR) ataupun browser. Teknologi ini dapat memberikan solusi smart dan ekonomis dalam membangun perpustakaan digital yang komprehensif dan sesuai kebutuhan pemustaka generasi digital. Sistem bookless library menjadi sistem perpustakaan digital yang bisa diakses dimana saja selama tercakup dalam area wifi.

Dengan sistem ini, maka tidak dibutuhkan lagi ruang atau gedung perpustakaan khusus untuk menampung banyaknya bahan perpustakaan, sehingga akan menghemat biaya.

Bookles library system memiliki keistimewaan dalam aspek *go green*, *go paperless*, dan *go wireless*. Selanjutnya karena berbasis teknologi digital mutakhir, maka juga lebih hemat investasi, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan citra perpustakaan, maupun akselerasi pembelajaran pemustaka digital menjadi semakin meningkat. Keuntungan dari sistem *bookles library*, antara lain:

- a. Tanpa buku cetak/konvensional;
- b. Tak perlu rak buku, karena semua buku dan konten dalam bentuk digital;
- c. Tidak perlu gedung khusus;
- d. Tidak pakai pulsa/data internet;
- e. Free maintenance, tidak perlu perawatan khusus;
- f. Spot baca bisa dimana saja;
- g. Area baca bisa dimana saja;
- h. Penempatan konten buku fleksibel, bisa di dalamruang maupun di luar;
- i. Search engine selalu ready, memudahkan untuk mencari literatur dalam berbagai kategori;
- j. Satu konten buku bisa diakses secara bersamaan dalam satu waktu;
- k. Fasilitas copy paste tersedia untuk penyuntingan;
- l. Dapat upload untuk tambah konten/buku pribadi;
- m. Layanan nonstop dan swalayan, karena memberikan layanan 24/7.

Bahkan terkait dengan pengelolaan SDM perpustakaan, maka tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Hal ini karena adanya sarana atau media bookless yang lengkap akan memacu meningkatnya kualitas SDM, yang jelas ada keunggulan SDM dalam keilmuan dan digital skill. Selanjutnya akan jauh lebih praktis dan efisien, karena dengan bookless maka menjadi anti kotor, anti hilang, maupun anti rusak dari koleksi perpustakaan. Dengan demikian saya rasa tidak membutuhkan SDM khusus untuk menjaga koleksi perpustakaan jika sudah digital. Namun ketersediaan SDM yang sedikit dan terbatas, bisa diberdayakan secara maksimal. Jadi tidak perlu SDM khusus yang menangani seperti halnya layanan koleksi buku cetak maupun foto kopi.

Massis (2018: 458) menyebutkan bahwa implikasi masa depan untuk AI di perpustakaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang menarik. Pendapat Massis senada dengan apa yang dikemukakan oleh Noh (2015) bahwa perpustakaan yang semula berfokus pada koleksi pustaka dan layanan, tetapi saat

ini telah bergeser pada nilai tambah.

Pelayanan yang penuh integritas wajib dipegang teguh oleh pustakawan. Sebagai pegawai maka zona integritas sangat perlu untuk memotivasi diri agar mampu memberikan pelayanan yang bersih dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas. Jangan sampai berbuat yang sekiranya melanggar aturan dan mencederai profesi pustakawan. Misalnya uang denda keterlambatan pengembalian buku jangan sampai masuk kantong pribadi, namun disetorkan sesuai prosedur yang ada. Pekerjaan manusia tergantikan oleh aplikasi dan mesin, bahkan robot yang dibuat cerdas. Namun sekalipun memiliki banyak kelebihan, sisi kritisnya bahwa hadirnya teknologi informasi dan komunikasi akan mengurangi relasi antar manusia. Bahkan sederhananya adalah meniadakan unsur manusia (dehumanisasi). Oleh karena mengingat tantangan ke depan bahwa bagi generasi milenial jauh lebih kompleks dan lebih berat, maka pustakawan dapat meredefinisi perannya. Misalnya aspek hospitality dan dalam mengajarkan nilai etika, sopan santun, budaya, empati sosial, yang semuanya tidak dapat diajarkan oleh mesin (Fatmawati, 2019).

11.8 Penutup

Kecerdasan buatan atau AI yang saat ini terdapat di sekitar kita, sebagaimana teknologi lainnya, merupakan hasil dari perjalanan panjang yang belum berakhir. Mulai dari angan-angan yang tidak lebih dari mitos, penjelasan ilmiah yang masih sebatas konsep, perkembangan komputer yang memicu pengembangan awal, sampai masifnya data yang juga memasifkan penerapan AI. Yang disampaikan di tulisan ini tentu hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang itu. Harapannya, bagian kecil itu tetap dapat memberikan gambaran besarnya.

Kita dapat melihat bagaimana perkembangan teknologi AI ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komputer. Perkembangannya terhenti sejenak ketika mencapai batas kemampuan komputer dan tumbuh pesat ketika terdapat inovasi di bidang komputer. Sekarang ini, perkembangan

teknologi komputer dan masifnya data masih terus tumbuh sehingga AI pun masih akan terus berkembang. Bahkan, di masa ini suatu AI bisa membuat AI lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipar, A. (2021). *Pengembangan Kecerdasan Buatan Berbasis Arduino Uno di Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI* [Universitas Muslim Indonesia].
<http://repository.umi.ac.id/287/>
- Anyoha, R. (2017). *The History of Artificial Intelligence*. Science in The News – Harvard University.
<https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/>
- Copeland, B. J. (2020). *Artificial Intelligence*. Britannica.
<https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
- Dewi, A. O. P. (2020). Kecerdasan Buatan sebagai Konsep Baru pada Perpustakaan. *Anuva*, 4(4), 453–460.
- Dictionary, C. (n.d.). *artificial intelligence*. Cambridge Dictionary. Retrieved April 16, 2022, from
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-intelligence>
- Fatmawati, E. (2019). REDEFINISI PUSTAKAWAN 4.0 DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 2019*, 27–34.
- History of Artificial Intelligence*. (n.d.). Council of Europe,. Retrieved April 16, 2022, from
<https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/history-of-ai>
- Lewis, T. (2015). *A Brief History of Artificial Intelligence*. Live Science. <https://www.livescience.com/49007-history-of-artificial-intelligence.html>
- Rahayu, Lisda, K, A., Ramatun, Sumiati, Opong, Makariam, Luthfiati, Permatasari, & Bentari, R. (2014). *Layanan Perpustakaan*. Universitas Terbuka.
- Seiler, E., & Jenkins, J. H. (2014). *Frequently Asked Questions about Isaac Asimov*.
http://www.asimovonline.com/asimov_FAQ.html#series13

Topics, A. (2022). *A Brief History of AI*. AI Topics – Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).
<https://aitopics.org/misc/brief-history>

BIODATA PENULIS



Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A.
Dosen Universitas Negeri Malang

Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Gus Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan studi doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi di kota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga pernah belajar sebentar di kampus UM, UNISMA dan UMM semasa pencarian jati diri di tanah kelahiran Malang. Semasa kuliah pernah aktif di beberapa organisasi internal kampus dan eksternal.

Selain belajar di lembaga pendidikan formal, penulis juga belajar di lembaga pendidikan non formal yakni di PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, PP.Ali Maksum Krapyak, serta

pernah singgah di beberapa pesantren diantaranya PP. Miftahul Huda Gading Kasri Malang, PP.Fathul Ulum Kwagean Kediri, PP.Lirboyo Kediri dalam rangka tabarrukan. Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif mengajar di Jurusan Sastra Indonesia, Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang dan di beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren di Malang Raya. Disamping kesibukan di dunia akademis penulis juga memiliki kegiatan pengabdian di masyarakat dengan mengisi seminar, workshop, dll.

BIODATA PENULIS



Dewi Maharani Rachmaningsih., S.Hum., M.A.

Praktisi dan akademisi di Program Studi Kearsipan dan
Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka

Penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan Pendidikan magister Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada. Memulai karir sebagai konsultan bidang perpustakaan kemudian merantau di Pekanbaru sebagai pustakawan di SMK Kehutanan. Kemudian mendapat kepercayaan sebagai dosen tetap ilmu komunikasi sekaligus ditempatkan di Perpustakaan Universitas Persada Indonesia YAI. Pada saat ini pindah homebase menjadi praktisi dan akademisi di Program Studi Kearsipan dan Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Semenjak kuliah, ia adalah aktivis literasi, sampai saat ini masih menjadi bagian dalam SLiMS Community Jakarta. Memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menggoreskan penda di bidang kearsipan, perpustakaan, informasi, komunikasi dan pendidikan jarak jauh.

BIODATA PENULIS



Prof.Dr.Djoko Saryono, M.Pd.
Dosen Universitas Negeri Malang

Penulis lahir pada 27 Maret 1862 di Madiun. Saat ini menjadi Guru Besar di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dan juga menjabat sebagai kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Dan telah menulis beberapa buku diantaranya: Pergulatan Estetika Sastra di Indonesia (2006), Kumpulan Puisi Arung Diri (2013), Kumpulan Puisi Arung Cinta (2015), Kumpulan Puisi Kemelut Cinta Rahwana (2015), Tafsir Kenthir Leo Kristi dalam (Pura-pura) Puisi (2016), Literasi, Episentrum Kemajuan Kebudayaan dan Peradaban (Pelangi Sastra: 2019).

BIODATA PENULIS



**Elva Rahmah, S.Sos, M.I.Kom.,
Dosen Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi**

Penulis lahir di Padang, 28 Juni 1980. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Padjadjaran Bandung (2005), meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Ilmu Informasi dan Perpustakaan) Universitas Padjadjaran (2010). Saat ini sedang menempuh Pendidikan *Doctor of Philosophy (Information Management)* di Universiti Teknologi MARA Malaysia. Penulis adalah staf pengajar Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, serta aktif menulis artikel dan menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah. Mengajar beberapa mata kuliah diantaranya mata kuliah Manajemen Koleksi; Ilmu Komunikasi; Akuisisi, Seleksi dan Retensi Arsip; dan Manajemen Korespondensi Formulir dan Laporan. Pernah menjabat sebagai koordinator Program Studi. Penerima penghargaan Dosen Berprestasi I tingkat Fakultas Bahasa dan Seni (2014); dan Dosen berprestasi dalam Bidang Publikasi Ilmiah dan HKI Peringkat III Universitas Negeri Padang (2018). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. Beberapa kegiatan ilmiah diikuti selama ini diantara sebagai nara sumber dalam kegiatan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah (IPI Sumbar). Untuk kegiatan penelitian penulis telah melakukan beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut: Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan;

Generasi Milenial Pada Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang bagi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Karya yang berupa buku yang dihasilkan diantaranya buku Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan: Teori dan Aplikasi (2015), Akses dan Layanan Perpustakaan Teori dan Aplikasi (2018), Manajemen Perpustakaan: Penerapan TQM dan CRM (2018), Manajemen Korespondensi, Formulir, dan Laporan (2019), Kompetensi Pustakawan di Era Disrupsi (2020), Buku Ajar: Manajemen Koleksi (2021) dan, *Book Chapter Globalisation of Cultural Heritage: Issues, Impacts and Challenges* (2021).

BIODATA PENULIS



Anita Tri Widiyawati, S.S.,M.A.

Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi
Publik di Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Penulis lahir di Jember pada 22 Maret 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Pendidikan S1 Sastra Indonesia diselesaikan pada Universitas Jember tahun 2008 dan menyelesaikan Studi S2 pada Program Studi Kajian Budaya dan Media minat Manajemen Informasi dan Perpustakaan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2011. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan prosiding internasional. Buku yang pernah ditulis adalah 'Manajemen Koleksi: *Collection Management*'; Menuju Tata Kelola Informasi: Sebuah Antologi Kepustakawanan Bagian 3: MANAJEMEN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN "Pentingnya Analisis Kualitas Layanan Perpustakaan Umum bagi Pemustaka Tunanetra dengan Metode LibQualTM"; Resiliensi, Inovasi dan Motivasi Pertemuan Tatap Muka Terbatas BAB I RESILIENSI DAN URGENSI PTMT "Resiliensi Hybrid Learning Pascapandemi Covid-19 pada Program Studi Ilmu Perpustakaan". Penulis dapat dihubungi melalui anitatriw@ub.ac.id atau anitatriwidiyawati@gmail.com

BIODATA PENULIS



Rahmita Sari, S.Pd. M.A

Tutor Pengajar pada Program Studi Ilmu Perpustakaan
Universitas Terbuka

Penulis lahir di Jambi, 29 Juni 1993. Latar belakang pendidikan Penulis S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Kemudian melanjutkan S-2 di Program Studi Kajian Budaya dan Media konsentrasi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis merupakan tutor pengajar pada Program Studi Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka. Sebelumnya penulis menjadi staf digital library di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

BIODATA PENULIS



Fitri Handayani, M.A

Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
IAIN Kerinci

Penulis lahir di Kab. Solok 8 April 1992. Penulis merupakan lulusan D3 dari Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan (IIPK) Universitas Negeri Padang (UNP), lulusan sarjana dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Negeri Sumatera Utara (USU) dan penulis meraih gelar magister dari Program Studi Manajemen Informasi dan Perpustakaan (MIP) Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya penulis pernah menjadi pengajar sekaligus Koordinator Kehumasan dan Pengembangan Perpustakaan di Universitas International Batam (UIB) dan saat ini penulis menjadi dosen PNS di IAIN Kerinci serta aktif dalam penulisan artikel dan kegiatan ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian penulis di antaranya sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan jurnal elektronik di Perpustakaan UGM (2018), Analisis kompetensi arsiparis profesional di Indonesia (2018), mengenai *Internet of Things, Knowledge Management* dan *Cloud computing* di Perpustakaan (2018-2019), Fenemisme gender: perempuan sebagai pustakawan di Kota Sungai Penuh (2021), *Information seeking behaviour: digital native* dalam penulisan karya ilmiah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci(2022), dan beberapa penelitian analisis semiotika lainnya.

BIODATA PENULIS



Nove E Variant Anna, S.Sos., MIMS.

Dosen Tetap Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Vokasi,
Universitas Airlangga, Surabaya

Penulis merupakan dosen tetap di Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan & Informasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian melanjutkan S2 di Monash University, Australia dengan mengambil Master of Information Management Professional, dan lulus pada tahun 2008. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Universiti Malaya, Malaysia di *Department of Library and Information Science, Faculty of Art and Social Sciences*, dengan topik disertasi instructional strategies pada layanan virtual referensi. Adapun mata kuliah yang pernah diampu oleh penulis antara lain sistem informasi perpustakaan, perpustakaan digital, referensi, tajuk subyek, dan kajian masalah perpustakaan.

BIODATA PENULIS



Fahrullah, S.I.Pust., M.Kom

Sekretaris Program Studi Sistem Informasi S1
Kepala Perpustakaan PSDKU UM Kota Samarinda

Penulis lahir di Samarinda tanggal 1 Mei 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sistem Informasi (Kampus Kota Samarinda) Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia sekaligus sebagai kepala perpustakaan. Menyelesaikan pendidikan S1 Sistem Informasi pada Program Studi Sistem Informasi STMIK Sentra Pendidikan Bisnis, S1 Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Menulis.